www.bpmfpijar.com EDISI 25 | FEBRUARI 2023

Refleksi Kritis & Kreatif

# SURAT KABAR PIJAR

# Kegagalan Rezim Representasi

**SOROT**
Menggugat Naarasi Advokasi di Balik Lembaga Mahasiswa

**OPINI**
Tangan Besi Rezim Representasi

## SUSUNAN PENGURUS

**Pemimpin Umum** : Parama Bisatya
**Sekretaris** : Sigit Bagas Prabowo
**Bendahara** : Rasya Marfianto
**Pemmpin Redaksi** : Michelle Gabriella
**Kadiv. Litbang** : Rafael Bermuda
**Kadiv. Artistik** : Gayuh Hana Waskito
**Kadiv. Perusahaan** : Adhysti Hukma S

**Koordinator Surat Kabar Pijar**
Cahya Saputra

**Tim Kreatif Surat Kabar Pijar**
Melvinda Eliana A, Steve Laurent Montong, Aliensa Zanzibariyadi, Bayu Tirta Hanggara

**Penyunting**
M. Fahrul Muharman, Dian Agustini, Roni, Ilham Maulana, Titik Nurmalasari, Michelle Gabriela, Parama Bisatya, Cahya Saputra

**Penulis**
Mochamad Zidan Darmawan, Muhammad Huda Alima Salim, Aghli Maula Hasby, Abraham Mahendra, Moh. Misbakhul Huda, Michelle Gabriella, Rafael Bermuda Leemardo, Annisa Ika Rahmawati, Novia Pangestika, Haycal Kullu Rantelino, Steve Laurent Montong, Hanifah Alyarowina Ammareza, Bintang Rhaissa Adelya, Hanif Salma T, Alfi Fernandes, Francois Rynasher Mamarimbing, Noor Safira Zalfa, Fais Adnan Hidayat, Angelina Tiara Puspitalova, Muhammad Ilham Elfarahni

**Ilustrator**
Bayu Tirta Hanggara, Raehan Mahardika, Wahyu Atika, Anas Abrar, Ariani Eka Putri, Gayuh Hana Waskito

**Fotografer**
Bayu Tirta Hanggara, Raehan Mahardika, Adimas Irawan

**Alamat Redaksi BPMF PIJAR**
Fakultas Filsafat - Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Humaniora No. 1, Bulaksumur, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

**Situs** : bpmfpijar.com
**Instagram** : @bpmfpijar
**ISSUU** : bpmfpijar
**Facebook**: BPMF PIJAR
**Twitter** : @bpmfpijar
**LinkedIn** : BPMF Pijar
**Surel** : bpmf.pijar@gmail.com

## DAFTAR ISI



**Sampul:**
Parama Bisatya
**Tata Letak:**
Bayu Tirta dan Parama Bisatya

# CELAH DARI PIJAR

Suara riuh dari mahasiswa kerap mengisi keheningan di sudut-sudut Fakultas Filsafat. Suara itu sayup-sayup mempertanyakan eksistensi pemerintahan mahasiswa di Fakultas Filsafat. “Mengapa Fakultas Filsafat tidak mempunyai wujud pemerintahan mahasiswa?" atau "Mengapa mahasiswa Fakultas Filsafat menolak perwujudan pemerintahan mahasiswa?”

Berbagai pertanyaan itu pun direspons dengan berbagai jawaban. Namun, yang pasti, absennya pemerintahan mahasiswa di Fakultas Filsafat seakan diterima begitu saja, selayaknya sesuatu yang tak dapat diganggu gugat. Berawal dari sinilah, BPMF Pijar mencoba menelusuri pelbagai hal yang bersembunyi di balik gaung penolakan pemerintahan mahasiswa.

Kami bangkit dari deretan kursi penonton dan bergerak merespons isu tersebut. Langkah awal yang kami lakukan adalah bergelut dalam tataran teori dan praktik guna membedah isu pemerintahan mahasiswa. Sampai pada akhirnya, pergelutan kami bermuara pada kesepahaman seluruh awak BPMF Pijar untuk mengangkat **“Kegagalan Rezim Representasi”** sebagai tema besar Surat Kabar Pijar edisi ke-25.

Kendati tema besar ini berhasil disepakati, dalam proses penggarapan Surat Kabar ini, kami tetap melalui berbagai dinamika dan keruwetan. Untungnya, berbagai keruwetan lunas kami hadapi. Nyatanya, Surat Kabar Pijar edisi ke-25 mampu terbit dan sampai di tangan pembaca. Lagi-lagi, Surat Kabar ini merupakan salah satu perwujudan dari seluruh upaya kami mempertahankan nyala api Pijar.

Dalam proses penggarapan, kami memperhatikan pula kemudahan pembaca Surat Kabar Pijar edisi ke-25. Kami tak luput meletakkan beberapa rubrik tematik, yakni Sorot, Dialektika, dan Riset. Sorot 1 menyoal perwujudan pemerintahan mahasiswa dalam dinamikanya di Fakultas Filsafat. Kemudian, Sorot 2 mengulas kritik mengenai eksistensi gaung alternatif pemerintahan mahasiswa di Fakultas Filsafat. Lebih lanjut, kedua tulisan tersebut akan diperkuat dengan adanya Riset mengenai berbagai bentuk pemerintahan mahasiswa, kritik terhadap pemerintahan mahasiswa, dan alternatif dari bentuk pemerintahan mahasiswa.

Tak berhenti pada Sorot dan Riset, dalam rubrik Dialektika pun kami mencoba menyelami eksistensi pemerintahan mahasiswa dengan nuansa filosofis. Selain itu, berbeda dengan Surat Kabar Pijar edisi lalu, dalam edisi ini kami memberi sedikit sentuhan humor dengan hadirnya Komik Strip. Rubrik tersebut berperan sebagai selipan hiburan bagi pembaca dalam mengilhami Surat Kabar Pijar edisi ini.

Terakhir, atas nama Surat Kabar Pijar edisi ke-25, kami mengajak para pembaca untuk mempertanyakan ulang dan bahkan menggugat kokohnya menara rezim representasi mahasiswa. Kami pun percaya bahwa kesadaran tidak jatuh dari langit. Ia harus dihadirkan dan terus diupayakan untuk digugat. Akhir kata, selamat menggugat yang keparat dan selamat ber-Pijar. **[Tim Redaksi]**

**Selamat membaca dan berefleksi!**

*Kami menerima tulisan opini dengan ketentuan 5000-7500 karakter.*
*Kirimkan tulisan Anda ke surel BPMF Pijar (bpmfpijar@gmail.com) dengan subjek "Opini".*

Dok. Istimewa

# Tragikomedi Rezim Representasi

***Layaknya arena komedi, pemerintahan mahasiswa justru lebih mampu "menghibur" daripada menyelesaikan masalah. Kehadirannya tak lebih dari tontonan akhir pekan.***

"Yang pasti nantinya ini akan pecah telur, ada perempuan pertama setelah 74 tahun menjadi Ketua DPR," ucap Puan Maharani, ketika berhasil menyandang posisi sebagai Ketua DPR 2019-2024 (Kompas, 2019).

Posisi Puan sebagai Ketua DPR digadang-gadang menjadi representasi perempuan dalam kursi perwakilan rakyat. Ia dinilai dapat mendorong kehadiran perempuan secara kuantitas. Namun, hal tersebut hanyalah strategi memanfaatkan popularitas perempuan sebagai target meraih suara maupun simpati, tanpa pernah benar-benar membawa kepentingan perempuan untuk keluar dari sistem politik yang patriarkis (Krook, 2009).

Dalam arena politik elektoral, masalah dalam klaim representasi bukanlah hal baru. Klaim ini mengisyaratkan suatu identitas yang tunggal. Seakan kepentingan "yang-diwakili" telah sepenuhnya diemban oleh "yang-mewakili". Padahal, kepentingan yang dihadirkan hanya berdasarkan pemaknaan elit secara *top-down*, tanpa mempertimbangkan agregasi kepentingan yang *bottom-up* berasal dari rakyat (Dirga, 2015). Oleh karena itu, politik berbasis representasi hanya mengeksklusikan satu di antara yang lain.

Selama ini kita seakan menghirup opium dan terlelap dengan keyakinan bahwa demokrasi memang berjalan seperti itu. Padahal, demokrasi jelas tidak sama dengan politik berbasis representasi (Tormey, 2015). Demokrasi hanya akan berjalan secara ideal ketika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk terlibat memengaruhi pembuatan keputusan tersebut (Dirga, 2015). Masalah semacam ini juga sedang kita alami dalam pemerintahan mahasiswa dengan klaim representasinya.

Terdapat perbedaan signifikan antara praktik pemerintahan mahasiswa yang sebenarnya dan tujuan pemerintahan mahasiswa yang dinyatakan. Apa yang disebut Pemilu di sebagian besar pemerintahan mahasiswa telah mengolok-olok demokrasi. Mulai dari partisipasi yang sedikit, aturan pemilihan yang salah urus, hingga status kelompok dominan yang mendesak pemilihan berdasarkan popularitas daripada kompetensi (Creamer, 1975). Mahasiswa sering kali mengambil posisi representatif, dalam pemerintahan mahasiswa, untuk sekadar mencari prestise dan status dominan. Sungguh penghinaan terhadap perbedaan epistemik tiap kelompok mahasiswa!

Klaim representasi dalam pemerintahan mahasiswa mengandaikan bahwa semua elemen terwakili secara sukarela karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan (Iman, 2015). Praktik pemerintahan mahasiswa, pada gilirannya, tidak menampakkan hal tersebut. Ugal-ugalan dalam melakukan analisis dan menata pemerintahan serta praktik penokohan menjadi persoalan keseharian dalam pemerintahan mahasiswa. Selain itu, keputusan yang dihasilkan oleh pemerintahan mahasiswa itu tidak mengandung kepentingan dan kebutuhan dari tiap-tiap elemen. Kehadirannya seakan menjadi ruang semua pihak yang berkepentingan berusaha mencari cara untuk mendominasi dan mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Di dalamnya terkandung inkonsistensi inheren, potensi dikooptasi, dan kehilangan independensi (Iman, 2015).

Di UGM sendiri, pemerintahan mahasiswa bak tragikomedi yang dibiarkan bermain sepanjang hari. Peningkatan angka golput pada 2018–2021 bertambah secara signifikan dari ±18.000–24.000 per tahunnya. Angka golput ini diiringi dengan penurunan pemilih sebanyak ±16.000–10.000 per tahunnya. Seakan tak mau usai, tragikomedi pemerintahan mahasiswa ini terus direproduksi oleh aktor baru dengan semangat yang lama; sama saja busuknya. Siapa yang sebenarnya mereka wakili selain dirinya atau kelompoknya sendiri?

Pemerintahan mahasiswa di UGM gagal mengambil peran-peran penting layaknya peran mahasiswa sebagai kelompok penekan. Awalnya isu pemerintahan mahasiswa yang independen dan demokratis gencar dilakukan. Namun pasca-NKK/BKK, rektorat mematikan fungsi pemerintahan mahasiswa (dulu DEMA sekarang BEM KM) dengan menjadikannya secara struktur di bawah Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan (Husin, 2014). Bukannya menekan, pemerintahan mahasiswa UGM justru menikmati tertekan. Hanya dua hal yang masih dipertahankan pemerintahan mahasiswa UGM saat ini antara ahistoris atau kebodohan yang "mengakar kuat menjulang tinggi".

Apa pun masalahnya, baik kesalahpahaman tentang representasi atau malfungsi jabatan, pemerintahan mahasiswa sangat nyaman menjalankan praktik "demokrasi" mereka. Kita yang disuguhkan tragikomedi ini sungguh terpingkal-pingkal dengan geliat mereka. Namun, BPMF Pijar sepakat untuk bangkit dari kursi penonton. Tragikomedi ini terlalu mengenaskan untuk dibiarkan berlangsung. Representasi pemerintahan mahasiswa UGM terlalu mengakar sampai-sampai ini menggeliat masuk ke fakultas. BPMF Pijar berusaha menghadirkan pintu masuk untuk mengacak-acak konsep "demokrasi" pemerintahan mahasiswa yang bersembunyi di balik narasi advokasi, pengembangan minat bakat, dan akal-akalan belajar politik bagi mahasiswa.

Normalisasi praktik representasi telah menjerumuskan kita semua ke dalam teater tragikomedi terlalu lama. Alih-alih melihat representasi pemerintahan mahasiswa sebagai problem struktural, akar kultural pun juga ikut disentuh. Iklim berkomunitas dan tujuan mendengarkan "yang membutuhkan" terpeyorasi menjadi berkelompok secara eksklusif dan mendengarkan "yang memberi keuntungan". Saatnya bangkit dan membunuh rezim representasi!
**[Penjaga Gerbang]**

---

**Daftar Pustaka**


Ardiansa, D. (2015, September 14). *Strategi Alternatif Politik Elektoral (kiri).* IndoProgress. https://indoprogress.com/2015/09/strategi-alternatif-politik-elektoral-kiri/

Creamer, D. (1975). Alternatives to Traditional Student Government. *Peabody Journal of Education*, *52*(2). http://dx.doi.org/10.1080/01619567509558537

Husin, L. H. (2014). *Gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan: studi kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari masa Orde Lama hingga pasca-reformasi*. PolGov.

Iman. (5 Mei 2015). *Membayangkan Absennya Lembaga Perwakilan Mahasiswa – BPMF Pijar*. BPMF PIJAR. Diakses 12 Februari 2023 dari https://bpmfpijar.com/membayangkan-absennya-lembaga-perwakilan-mahasiswa-membuka-alternatif-saluran-bagi-aspirasi-dan-opini-mahasiswa/

Kompas.com. (1 Oktober 2019). *Jadi Perempuan Pertama yang Jabat Ketua DPR, Puan Maharani: Pecah Telur.*. Kompas.com. Diakses 12 Februari 2023 dari https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/17570051/jadi-perempuan-pertama-yang-jabat-ketua-dpr-puan-maharani--pecah-telur-

Krook, A. P. o. P. S. a. W. G. a. S. S. M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University Press, USA.

Tormey, S. (2015). *The End of Representative Politics*. Wiley.

Ilustrasi: Raehan Mahardika

# Menggugat Narasi Advokasi di Balik Lembaga Mahasiswa

***Ketika narasi representasi telah mati dan gaung advokasi menjadi sosok penyelamat. Akankah kepentingan mahasiswa terwakilkan atau justru memang tidak butuh perwakilan?***

Pertanyaan, “Mengapa tidak ada lembaga mahasiswa di Fakultas Filsafat?” acap kali mengisi perbincangan-perbincangan kecil di kalangan mahasiswa baru Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM). Pertanyaan tersebut pun menuai berbagai jawaban. Mulai dari faktor historis, penolakan terhadap representasi mahasiswa, hingga penolakan terhadap struktur yang opresif. Kultur mahasiswa Fakultas Filsafat yang egaliter, anti-otoritarian, dan deliberatif mengisyaratkan antitesis dari bentuk lembaga mahasiswa yang secara inheren hierarkis dan opresif. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh Surya Iman, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2019, dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Bila ditilik ke belakang, keberadaan lembaga mahasiswa di Fakultas Filsafat memiliki catatan sejarah yang cukup panjang, khususnya pasca-Reformasi 1998. Menurut Aditya Pramono, Ketua Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat (LMFF) tahun 2004-2005, pasca-Reformasi 1998 kondisi kampus cukup progresif. Kemudian, pada 1999 muncullah wacana pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). “Pasca 1998, benih konflik antara mahasiswa Fakultas Filsafat dengan Keluarga Mahasiswa (KM) UGM sudah ada,” ungkap lelaki yang akrab disapa Pram tersebut.

Konflik tersebut lantaran dalam tubuh BEM KM UGM mulai didominasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dominasi tersebut, menurut Pram, bertolak belakang dengan Fakultas Filsafat yang dulunya menjadi markas orang-orang Partai Rakyat Demokratik. Akibatnya, dari 18 Fakultas di UGM, Fakultas Filsafat menjadi salah satu fakultas yang tidak melegitimasi pembentukan BEM di fakultas. “Kami tidak melegitimasi BEM lantaran mulai ‘hijau’,” jelas Pram.

Namun, pascapengukuhan UGM menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN) pada 2001, terjadi perubahan signifikan dalam struktur organisasi mahasiswa di Fakultas Filsafat. Menurut Pram, seluruh Badan Kegiatan Mahasiswa (BKM) di Fakultas Filsafat dirapikan struktur organisasinya, termasuk LMFF. Saat itu, dekanat mewajibkan adanya struktur lembaga mahasiswa sebagai wadah menyampaikan aspirasi. "Dekanat ingin 'membersihkan' dengan logika administratif dari PTN BHMN," lanjut Pram.

Kendati pembentukan LMFF merupakan permintaan administratif dari dekanat, Pram menceritakan bahwa LMFF saat itu juga masih cukup progresif. Menurut cerita Pram, beberapa anggota LMFF yang diundang dalam penyambutan mahasiswa baru di Graha Sabha Pramana membentangkan spanduk penolakan terhadap PTN BHMN. Spanduk tersebut bertuliskan, "Apa guna akal kita kalau uang yang berbicara?" Kenangan tersebut masih membekas dalam ingatan Pram.

Lebih lanjut, Pram menggambarkan struktur LMFF pada masanya. Menurut Pram, LMFF meliputi seluruh mahasiswa Fakultas Filsafat. Kemudian, pengurus LMFF kedudukannya sejajar dengan BKM lainnya. Pengurus LMFF inilah yang bertugas melakukan negosiasi dengan pihak dekanat terkait kepentingan mahasiswa Fakultas Filsafat. "Struktur organisasi ini merupakan permintaan dekanat saat itu," ucap Pram.
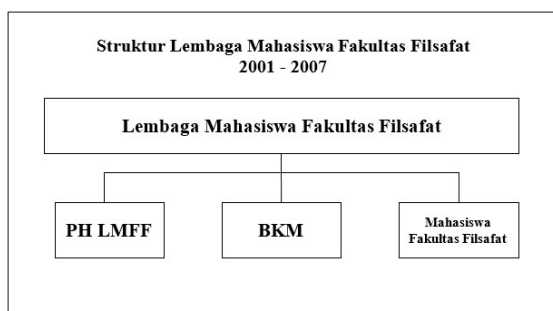
Selaras dengan Pram, Ahmad Romawi Yunani yang akrab disapa Amor, Ketua LMFF periode 2006-2007, juga mengungkapkan hal serupa terkait struktur LMFF. Amor menyebut bahwa karena kedekatan pengurus LMFF dengan pihak Dekanat, LMFF menjadi representasi mahasiswa. "Pengurus Harian LMFF ini menjadi representasi mahasiswa Fakultas Filsafat karena dekat dengan pihak dekanat," ungkap Amor.

***Kultur mahasiswa Fakultas Filsafat yang egaliter, anti-otoritarian, dan deliberatif mengisyaratkan antitesis dari bentuk lembaga mahasiswa yang secara inheren hierarkis dan opresif.***

Berkaitan dengan struktur kepengurusan LMFF, Amor juga menambahkan terkait mekanisme pemilihan ketua LMFF. Menurutnya, pemilihan Ketua LMFF dimulai dengan pencalonan dari tiap angkatan. Kemudian, dilanjutkan dengan debat terbuka di hadapan mahasiswa Fakultas Filsafat. "Dulu pas pemilihan Ketua LMFF *tuh* debat dan yang memilih yang datang debat aja," jelas Amor.

Dalam kepengurusannya, LMFF memiliki tugas pokok dan fungsi menaungi kegiatan-kegiatan yang belum diakomodasi oleh BKM. Promosi kegiatan kampus, menginisiasi unjuk rasa, dan surat-menyurat adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LMFF. Representasi Fakultas Filsafat dalam konsolidasi tingkat fakultas atau universitas, menurut Amor, menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi LMFF.

Setelah beberapa tahun berdinamika di Fakultas Filsafat, pada 2006 sampai dengan 2007, LMFF menemui ajalnya. Menurut Amor, minat mahasiswa Fakultas Filsafat kepada LMFF terus berkurang lantaran banyaknya masalah internal. Hal tersebut memaksa Amor untuk membubarkan LMFF. "LMFF bubar sendiri dan hilang sendiri," jelas Amor.

***Mahasiswa Fakultas Filsafat menolak direpresentasikan oleh lembaga mahasiswa dan hadirnya Forkom BKM dinilai lebih adil.***

**Urgensi Kehadiran (kembali) Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat**

Pasca-masa kepengurusan Amor, LMFF vakum selama beberapa saat. Namun, wacana pembentukan kembali lembaga mahasiswa di Fakultas Filsafat selalu muncul setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2013. Saat itu, sarana dan prasarana di Fakultas Filsafat kurang memadai. Lebih lagi, minimnya informasi seputar administrasi akademik menyebabkan beberapa mahasiswa kebingungan ketika mengalami kendala. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh Daniel Galih Irfan Yoga Aditama, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2013. "Sarana dan prasarana tidak harus mewah, tetapi setidaknya memadai," keluh Daniel.

Melihat momentum ini, Daniel yang saat itu juga menjadi anggota dari BEM KM UGM, membentuk Komisi Penyelamat Filsafat (KPF) bersama beberapa mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2013. Daniel menyatakan bahwa keresahan mereka juga dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2014. Mereka yang awalnya hendak membentuk Dewan Mahasiswa sebagai wadah menyalurkan aspirasi, akhirnya bergabung bersama KPF. "Inilah yang menjadi cikal-bakal hadirnya kembali LMFF," ungkap Daniel.

Akhirnya, pada bulan Januari 2015, Daniel bersama teman-temannya mendapatkan Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Filsafat atas pembentukan LMFF. Namun, hadirnya kembali LMFF tidak disambut baik oleh BKM lainnya. Sebab, sebelum LMFF dibentuk kembali, BKM telah memiliki forum bersama yang saat itu disebut Forum Komunikasi (Forkom) BKM. "Forum ini situasional saja. Ketika ada masalah, kita rundingkan bersama," ucap Jofie Dwana Bakti, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2014.

Kemudian, Jofie menjelaskan bahwa alasan utama penolakan BKM terhadap LMFF adalah klaim representasi mahasiswa Fakultas Filsafat. Menurutnya, mahasiswa Fakultas Filsafat menolak direpresentasikan oleh lembaga mahasiswa dan hadirnya Forkom BKM dinilai lebih adil. Sebab, semua mahasiswa Fakultas Filsafat dapat menyalurkan aspirasinya dalam forum. Selain itu, Forkom BKM juga mengakomodasi kebutuhan menyampaikan aspirasi kepada pihak dekanat. "Sebelum ada LMFF, Forkom BKM juga mengadakan Hearing Dekanat," lanjut Jofie.

Menanggapi masalah tersebut, Daniel menjelaskan bahwa kehadiran LMFF didasari oleh keresahan terhadap kondisi Fakultas Filsafat dan bukan sebagai representasi mahasiswa Fakultas Filsafat. Selain itu, LMFF dibentuk kembali sebagai wadah menampung keresahan mahasiswa Fakultas Filsafat untuk kemudian diadvokasikan kepada dekan. "Advokasi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, perlu paham regulasi," ucap Daniel.

***Ketika melihat universitas sebagai miniatur negara, maka dapat dinilai bahwa kebijakan dari lembaga eksekutif tidak perna menyentuh sampai akar rumput.***

Namun, menurut Jofie, advokasi yang dilakukan oleh LMFF tidak begitu dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Filsafat. Pasalnya, selama ini mahasiswa dapat menjalankan advokasinya melalui koordinasi antarteman. Ia juga mengungkapkan bahwa mahasiswa Fakultas Filsafat angkatannya dapat mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal tanpa bantuan LMFF. "Mereka ada, tetapi tidak berdampak," ungkap Jofie

Puncak perselisihan antara LMFF dengan Forkom BKM adalah diajukannya "Mosi Tidak Percaya atas Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat" oleh Forkom BKM. Dalam mosi ini, LMFF dinilai telah melanggar kewenangan Panitia Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru, melanggar fungsinya sebagai badan advokasi, tidak transparan dalam struktur organisasinya, dan mengadakan kegiatan yang bersinggungan dengan BKM lain. Mosi ini ditandatangani oleh Sande Monink, BPMF Pijar, Retorika, Lingkar Studi Filsafat Cogito, Panta-Rhei, dan Christian of Philosophy.

Setelah hadirnya mosi ini, diadakanlah dialog terbuka antara Forkom BKM dan LMFF. Dialog ini dihadiri juga oleh Misnal Munir yang saat itu menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Namun, menurut Jofie, dialog tersebut tidak menemukan titik tengah, meskipun mampu meredam aktivitas LMFF. "Kami tetap menolak hadirnya LMFF dan mereka tetap *ngotot* mendirikan LMFF," sambung Jofie.

Bagi Jofie, ketika melihat universitas sebagai miniatur negara, maka dapat dinilai bahwa kebijakan dari lembaga eksekutif tidak pernah menyentuh sampai akar rumput. Sama halnya aktivitas LMFF, menurut Jofie, dinilai tidak menyentuh mahasiswa Fakultas Filsafat saat itu. Oleh karena itu, Forkom dinilai sebagai alternatif yang lebih representatif dengan menghadirkan forum antar-BKM. Sepakat dengan Jofie, Surya juga mengaminkan bentuk Forkom sebagai alternatif.

Menurut Surya, kehadiran Forkom BKM saat ini sesuai dengan kultur mahasiswa Fakultas Filsafat. Pasalnya, bentuk forum ini memungkinkan pengambilan keputusan yang sifatnya egaliter dan deliberatif. Bagi Surya, bentuk lembaga mahasiswa harus disesuaikan dengan kondisi objektif dari mahasiswa itu sendiri. "Menilai kondisi mahasiswa Fakultas Filsafat, tentu lembaga yang sifatnya eksekutif atau eksekutor tidak akan cocok," jelas Surya.

Bentuk lembaga mahasiswa di Fakultas Filsafat, bagi Surya, masih dimungkinkan ketika berfungsi sebagai mediator. Pasalnya, kehadiran LMFF saat ini, menurut Surya, tidak lagi sebagai lembaga mahasiswa yang sifatnya eksekutif. Namun, dalam praktiknya sebagai mediator pun, LMFF patut dipertanyakan. "Eksistensi LMFF sudah tidak bisa dipahami, baik dalam bentuk maupun kinerjanya. Lebih baik direformasi, jika tidak dibubarkan saja!" pungkas Surya. **[Alim, Maul, Zidan]**

Ilustrasi: Raehan Mahardika

Ilustrasi: Wahyu Atika
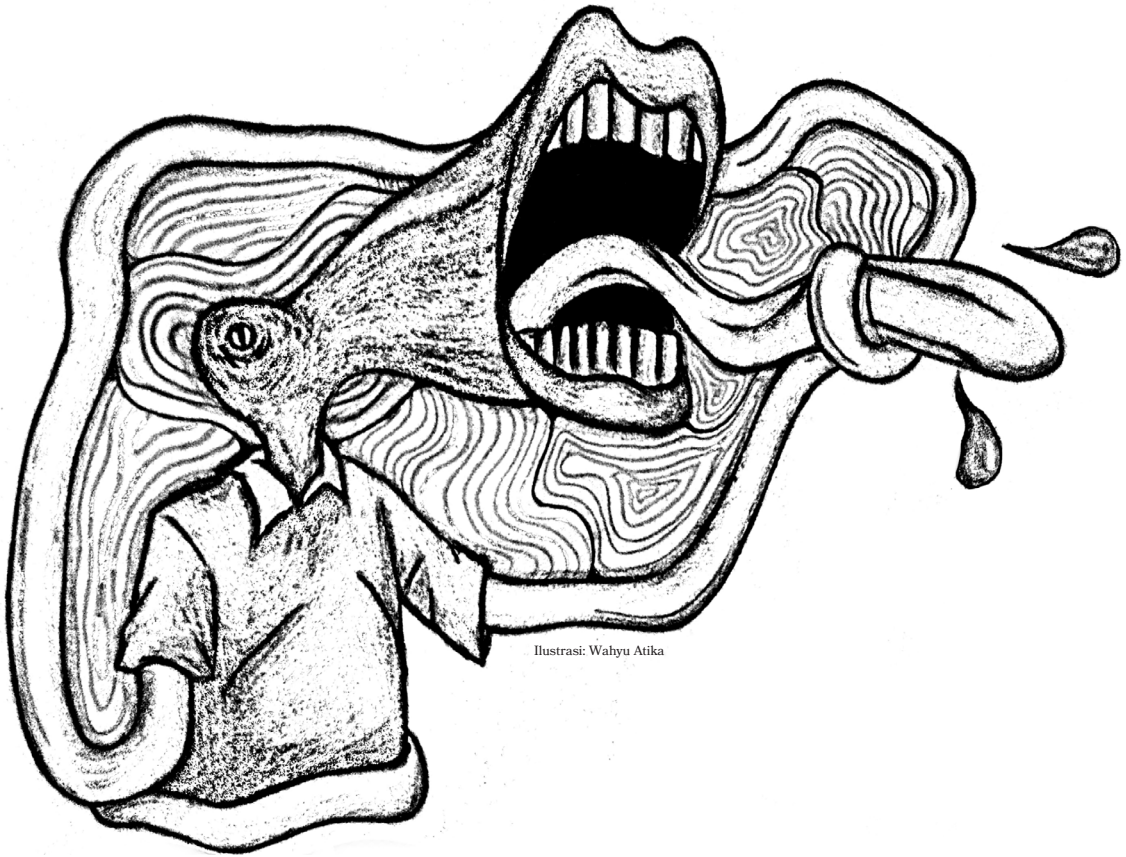
# Gaung Alternatif, Rentan Dominasi

***Selama ini kita terlelap dalam gaung rezim alternatif. Namun, bagaimana jika rezim alternatif ini justru hanya permainan dominasi?***

Penolakan terhadap kehadiran pemerintahan mahasiswa memiliki sejarah tersendiri bagi mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM). Pasalnya, wacana pemerintahan mahasiswa yang berfungsi sebagai advokator tidak cukup menjawab masalah mahasiswa Fakultas Filsafat. Hal tersebut menjadi titik berangkatnya sebuah Forum Komunikasi Mahasiswa Filsafat (Forkom) di tengah gaung penolakan terhadap pemerintahan mahasiswa.

Pembentukan Forkom ditujukan sebagai ruang musyawarah guna menghimpun setiap elemen mahasiswa Fakultas Filsafat. Forkom juga disebut menjadi sebuah wadah yang prestisius bersamaan dengan semangat egaliter yang dimiliki. Setidaknya hal tersebut yang diutarakan oleh Maheswara Nusantoro, Koordinator Forkom 2017.

Apabila ditarik sejarahnya, Forkom pertama kali berdiri secara legal formal pada tahun 2017. Pada saat itu, Maheswara Nusantoro yang kerap disapa Hesa, menilai kurangnya pergerakan mahasiswa dalam tubuh Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat (LMFF). Oleh sebab itu, ia menggagas Forkom sebagai harmonisasi antara pergerakan mahasiswa dengan kelembagaan mahasiswa di Fakultas Filsafat. “Aku berinisiatif sama teman-teman, bagaimana caranya kita yang secara pergerakan sudah bagus, dapat bagus juga secara kelembagaannya,” ujar Hesa.

Kendati demikian, Forkom bukanlah hal yang asing di telinga mahasiswa Fakultas Filsafat. Pasalnya, sedari 2014, mahasiswa Fakultas Filsafat telah memiliki wadah untuk menghimpun tiap kepentingan yang ada. Wadah tersebut juga disebut Forkom. Namun, berbeda dengan sekarang, Forkom dahulu belum diakui secara legal oleh dekanat Fakultas Filsafat. Menurut Rangga Kala Mahaswa, Ketua Lingkar Studi Filsafat (LSF) Cogito 2014, munculnya Forkom Filsafat pada 2014 tidak terlepas dari peristiwa "Mosi Tidak Percaya terhadap LMFF".

***Pasalnya, sedari 2014, mahasiswa Fakultas Filsafat telah memiliki wadah untuk menghimpun tiap kepentingan yang ada. Wadah tersebut juga disebut Forkom.***

Akibat hadirnya mosi tersebut, menurut Rangga, kepercayaan mahasiswa Fakultas Filsafat terhadap LMFF kian menurun. Bahkan, lanjut Rangga, dari kejadian di masa lalu, sering dijumpai narasi-narasi dari mahasiswa Fakultas Filsafat yang bertendensi kontra terhadap LMFF. "Pada akhirnya, keberpihakan mahasiswa beralih ke Forkom yang dirasa sebagai forum yang bersifat kolektif kolegial dalam menangani permasalahan mahasiswa," jelas Rangga.

Pernyataan Rangga tersebut diamini oleh Hesa dengan menyebut bahwa semangat Forkom sudah ada sejak sebelum tahun 2017. Menurut Hesa, perbedaan Forkom sekarang terletak pada sistem dan mekanisme forum. Ia menegaskan, Forkom sekarang jauh lebih terorganisasi dibanding yang lalu. "Kalau dulu, Forkom itu tidak ada wadah yang jelas, jadi *waton* kumpul-kumpul saja. Nah, sekarang wadahnya jelas dan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," tambah Hesa.

***"Forkom juga mempunyai tugas dan fungsi advokasi,"***

Hesa juga menjelaskan bahwasanya banyak kecurigaan dari mahasiswa Fakultas Filsafat saat proses pembentukan Forkom. Guna menjawab kecurigaan tersebut, Hesa melakukan uji publik di selasar Fakultas Filsafat. Namun, menurut Hesa, uji publik tersebut berbuah hujatan dari beberapa mahasiswa Fakultas Filsafat. "Tidak mudah mendirikan Forkom. Tidak sedikit yang menganggap aku sedang berusaha mendirikan BEM," tutur Hesa.

Hesa menegaskan pembentukan Forkom tidak ada hubungannya dengan negara mahasiswa. Karena, bagi Hesa, tujuan Forkom adalah wadah bagi suara mahasiswa Fakultas Filsafat agar terdengar, terwakilkan, dan tersalurkan. Selain itu, Hesa juga menambahkan bahwa fungsi tertinggi dari tercapainya forum adalah untuk menyelaraskan kesepakatan dari seluruh BKM. "Sederhana saja, kalau ada pendiskusian untuk mencapai satu kesepakatan, ya lewat Forkom," sambung Hesa.

Saat ini, Forkom Filsafat berperan sebagai pemecah permasalahan mahasiswa Fakultas Filsafat dengan mekanisme forum. Hal tersebut disampaikan oleh Farid Al-Qadr, Koordinator Forkom 2022. Menurut Farid, tugas Forkom sekarang ialah memastikan ruang-ruang komunikasi antar-elemen di Fakultas Filsafat untuk tetap ada. "Forkom juga mempunyai tugas dan fungsi advokasi," sambungnya.

Farid tidak memaknai advokasi secara gamblang sebab, bagi Farid, advokasi mengaminkan berbagai bentuk. Farid mengamini bahwa advokasi berfungsi menengahi kesepakatan antara masyarakat sipil dan pemangku kepentingan guna menciptakan kebijakan yang akomodatif. Farid juga menyebutkan bahwa, advokasi di Fakultas Filsafat tidak hanya milik sekelompok, beberapa kelompok, atau bahkan satu orang saja. "Semua orang berhak dan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi," ujarnya.

Lebih lanjut, perbedaan Forkom dengan pemerintahan mahasiswa pada umumnya terdapat pada poin representasinya. Farid menjelaskan bahwa, secara mendasar, Forkom tidak merepresentasikan relasi identitas seluruh mahasiswa Fakultas Filsafat. Menurut Farid, Forkom tidak lebih dari kumpulan mahasiswa Fakultas Filsafat. "Forkom berwujud sebagai *student union,*" tegas Farid.

***"Forkom seharusnya bisa merangkum isu untuk kemudian diobrolkan dengan pihak fakultas, itu sebenarnya kuasa Forkom yang agak luput di tahun ini,"***

**Kehadiran Forkom bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat**

Albertus Arioseto, Pemimpin Redaksi LSF Cogito 2022, mengungkap bahwa awalnya ia hanya mengetahui Forkom sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan acara-acara di Fakultas Filsafat. Kemudian, setelah mengetahui tugas pokok dan fungsi Forkom, ia menilai kinerja Forkom masih kurang maksimal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Padahal, menurut Albert, Forkom memegang peran penting sebagai jembatan antara mahasiswa dan dekanat. "Forkom seharusnya bisa merangkum isu untuk kemudian diobrolkan dengan pihak fakultas, itu sebenarnya kuasa Forkom yang agak luput di tahun ini," jelasnya.

Kendati demikian, Albert tidak memungkiri adanya kinerja Forkom dalam pengawalan beberapa isu, salah satunya ialah pembangunan sekretariat BKM. Albert menyampaikan bahwa Forkom telah berupaya menyampaikan masalah tersebut ke dekanat. Akan tetapi, dekanat menolak karena Forkom belum mampu menunjukkan urgensi pembangunan sekretariat BKM. Imbasnya, menurut Albert, BKM dipaksa mencari solusi sendiri. "Jika ingin mengawal isu-isu seperti ini, seharusnya tidak hanya berkomunikasi dengan dekanat, tetapi juga mengoordinasi mahasiswa untuk menunjukkan bahwa kondisinya darurat untuk mengadakan sekretariat BKM," tegas Albert.

Senada dengan Albert, Vigo Joshua, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2021, mengutarakan keresahannya terhadap kinerja Forkom dalam pengawalan isu. Ia mengambil contoh salah satu isu mengenai dosen yang tetap dipertahankan pihak fakultas meskipun sudah banyak komplain dari mahasiswa terhadap dosen tersebut. "Forkom seharusnya hadir dengan melakukan komunikasi kepada dekanat mengenai isu tersebut," ungkap Vigo.

> *jika tujuan Forkom dibentuk hanya untuk mengambil dominasi advokasi LMFF, maka Forkom berpotensi memiliki kuasa dominan.*

**Forkom Sebagai "Lembaga" Advokasi Alternatif?**

Kendati Forkom digadang-gadang sebagai alternatif dari bentuk pemerintahan mahasiswa pada umumnya, tak lantas menjadikan Forkom sempurna tanpa cacat. Vigo menyebut bahwa jika tujuan Forkom dibentuk hanya untuk mengambil dominasi advokasi LMFF, maka Forkom berpotensi memiliki kuasa dominan. Ia juga menuturkan bahwa ketika mengupayakan forum yang setara bagi mahasiswa Fakultas Filsafat, maka paradigma kuasa dominannya harus dihilangkan. Hal tersebut tidak terlepas dari pengurus Forkom yang juga tergabung ke dalam BKM-BKM. "Pasti akan ada BKM yang lebih menguasai atau lebih berpotensi dikembangkan di Fakultas Filsafat untuk mengembangkan wacana tertentu," terang Vigo.

Senada dengan Vigo, Albert menyebut bahwa Koordinator Forkom seharusnya tidak boleh sekaligus menjabat sebagai pemimpin BKM. Menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan dwifungsi kuasa. Albert menjelaskan bahwa Koordinator Forkom yang masih tergabung ke dalam satu BKM akan menimbulkan potensi tumpang tindih keobjektivitasan dalam mengawal suatu isu. Lanjut Albert, hal tersebut tidak terlepas dari kuasa dan posisi Forkom yang lebih tinggi dari BKM-BKM dan lebih dekat ke pihak Fakultas. "Tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan kekuasaan," tegasnya.

> *"Sekarang pertanyaannya, apakah perwakilan Forkom sudah menjadi penyambung lidah bagi organisasi (BKM) yang dasarnya berbeda-beda?"*

Lebih lanjut, Vigo menyebut bahwa Forkom seharusnya menjadi badan yang setara di antara BKM-BKM meski memiliki fungsi koordinasi advokasi. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami tiap BKM akan berbeda mengingat masing-masing BKM memiliki latar belakang historis dan keresahan yang berbeda-beda pula. "Sekarang pertanyaannya, apakah perwakilan Forkom sudah menjadi penyambung lidah bagi organisasi (BKM) yang dasarnya berbeda-beda?" tanya Vigo.
**[Bram, Cahya, Huda]**
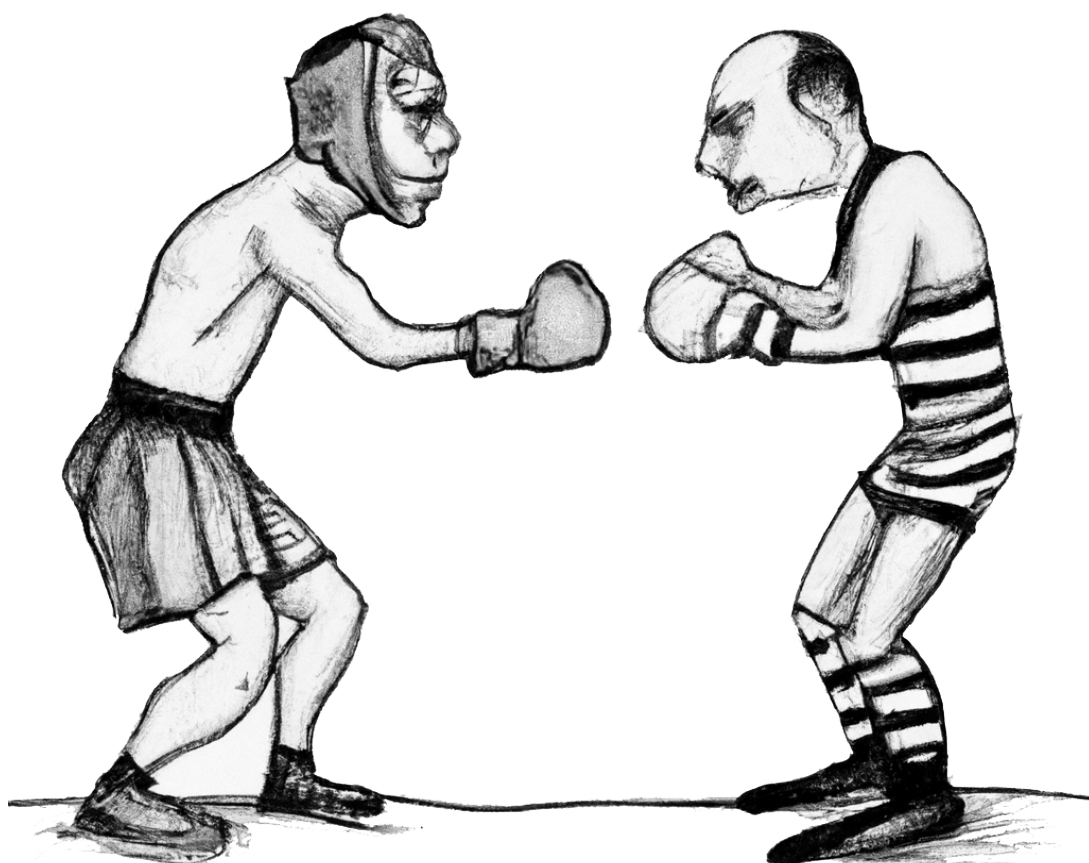
Dok. Istimewa

# Alternatif Pemerintahan Mahasiswa, Tak Luput Dari Masalah

Ilustrasi: Bayu Tirta

Pemerintahan mahasiswa (*student government*) di pelbagai belahan dunia memiliki sejarah yang cukup panjang. Di Amerika, guna mengakui secara formal pelibatan mahasiswa dalam tata kelola perguruan tinggi, dibentuklah komite nasional yang menghasilkan luaran berupa dokumen *Joint Statement on Right and Freedoms of Students*. Secara sederhana, pemerintahan mahasiswa merupakan representasi mahasiswa yang dipilih guna mengambil peran dalam tata kelola dan pengambilan kebijakan lingkup perguruan tinggi (Amey & David, 2020, 1433–1435). Ukuran, ruang lingkup, dan kompleksitas pemerintahan mahasiswa sangat bervariasi dan bergantung kepada kondisi realitas tiap-tiap perguruan tinggi. Bentuk umum dari pemerintahan mahasiswa pun beragam; seperti Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, Serikat Mahasiswa, Asosiasi Mahasiswa, dan lain sebagainya (Luescher, 2020).

Pemerintahan mahasiswa sering kali dianggap sebagai medium pengembangan otonomi mahasiswa dan pembentuk identitas profesional mahasiswa di masa depan (Dorozhkin et al., 2016). Namun, dalam praktiknya, kehadiran pemerintahan mahasiswa justru menimbulkan beberapa masalah. Don Creamer (1975) memberi gambaran beberapa permasalahan dalam praktik pemerintahan mahasiswa. *Pertama*, pemerintahan mahasiswa sering dijadikan sebagai ajang mencari prestise dan status dominan untuk menciptakan bentuk birokrasi yang tidak logis dan tidak produktif. *Kedua*, eksistensi pemerintahan mahasiswa ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan tata kelola perguruan tinggi yang menjadi tempat naungan pemerintahan mahasiswa itu sendiri. *Ketiga*, pemilihan umum dalam pemerintahan mahasiswa selalu problematik. Hal itu bisa dilihat mulai dari partisipasi mahasiswa yang sedikit hingga pembentukan aturan yang tidak demokratis. Pemerintahan mahasiswa sering kali diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. *Keempat*, pemerintahan mahasiswa, dalam praktiknya, tidak memenuhi esensi sebuah lembaga pendidikan tempat mereka bernaung. Oleh karenanya, Creamer menyimpulkan bahwa eksistensi pemerintahan mahasiswa ini tidak ada hubungannya dengan pengembangan kompetensi mahasiswa sama sekali.

Pemerintahan mahasiswa di Indonesia, setidaknya di Universitas Gadjah Mada (UGM), memiliki perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan dialektis antara kondisi objektif dan faktor subjektif. Kondisi sosial-politik nasional dan aktivitas politik mahasiswa UGM mengondisikan hadirnya pemerintahan mahasiswa. Pada 1950, pemerintahan mahasiswa memanifestasikan dirinya dalam bentuk Keluarga Mahasiswa (KM) UGM. Di dalamnya terdapat Dewan Mahasiswa (DEMA) yang menjalankan fungsi eksekutif dan Majelis Mahasiswa (MM) yang menjalankan fungsi legislatif (Husin, 2014). Namun, dengan dinamika kondisi sosial-politik dari tahun 1950 hingga pasca-Reformasi 1998, KM UGM mengalami berbagai perubahan, baik dalam aktivitas politiknya maupun dalam struktur organisasinya. Kini, DEMA UGM bertransformasi menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan MM menjadi Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) (Husin, 2014).

Seiring dengan dinamika bentuk pemerintahan mahasiswa tingkat universitas, lembaga tingkat fakultas pun akhirnya menyesuaikan. Kini, bentuk pemerintahan mahasiswa dalam tataran fakultas mengadopsi pelbagai struktur dan penyebutan. Contohnya, di Fakultas Ilmu Budaya UGM, pemerintahan mahasiswa menyebut dirinya sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa dengan formatur "eksekutif" yang menjalankan koordinasi berbagai elemen tanpa adanya struktur legislatif (pengawas). Kemudian, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pemerintahan mahasiswa menyebut dirinya sebagai DEMA guna menjalankan fungsi eksekutif dan MM guna menjalankan fungsi legislatif dengan mengadopsi struktur kolektif kolegial (Susilo, 2021). Lantas, bagaimana dengan pemerintahan mahasiswa di Fakultas Filsafat?

Di Fakultas Filsafat sendiri, praktik pemerintahan mahasiswa diadopsi oleh Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat (LMFF) yang terbentuk pasca-Reformasi 1998 seiring dengan pembentukan BEM tingkat universitas. LMFF mengeklaim dirinya sebagai representasi mahasiswa Fakultas Filsafat. Klaim ini terbukti dengan adanya alur koordinasi yang diwakili oleh LMFF ketika menyangkut kepentingan mahasiswa Fakultas Filsafat. Aditya Pramono, Ketua LMFF 2004–2005, menyatakan bahwa LMFF menjadi perwakilan dari mahasiswa Fakultas Filsafat ketika berhubungan dengan pihak eksternal (Pram, 2022). Ahmad Romawi Yunani, Ketua LMFF 2006–2007, juga menyatakan bahwa LMFF merepresentasikan mahasiswa Fakultas Filsafat ketika menjalin hubungan dengan pihak dekanat terkait urusan kemahasiswaan (Yunani, 2022). Klaim representasi ini cukup problematik. Pasalnya, alih-alih membawa kepentingan mahasiswa Fakultas Filsafat, LMFF justru menjadi "corong" dari dekanat saat itu. Walaupun perwakilan LMFF menolak dikatakan sebagai pemerintahan mahasiswa, tetapi dalam praktiknya, LMFF mengambil wacana pemerintahan mahasiswa itu sendiri. Secara formatur, LMFF mengambil fungsi "eksekutif" layaknya pemerintahan mahasiswa lainnya (Pram, 2022).

**Bersembunyi di Balik Narasi Advokasi, Gagal Juga**

Berbagai penolakan dilontarkan kepada LMFF dari mahasiswa yang tergabung dalam Badan Kegiatan Mahasiswa (BKM) Fakultas Filsafat. Penolakan ini menyulut konflik di antara keduanya hingga akhirnya LMFF membubarkan diri pada 2007. Akan tetapi, wacana pembentukan kembali LMFF terus bergulir pada tahun-tahun selanjutnya. Pada akhirnya, LMFF dibentuk kembali pada 2015 dengan dalih sebagai lembaga advokasi di Fakultas Filsafat (Daniel, 2022). Dalam pembentukan LMFF ini pun, berbagai penolakan muncul. Salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk Mosi Tidak Percaya LMFF yang ditandatangani oleh Sande Monink, BPMF Pijar, Retorika, Lingkar Studi Filsafat Cogito, Panta-Rhei, dan Christian of Philosophy. Poin utama dari mosi ini adalah penolakan terhadap klaim representasi mahasiswa Fakultas Filsafat dan perubahan nama LMFF yang cenderung berbentuk pemerintahan mahasiswa (Mosi Tidak Percaya LMFF, 2015).

Buntut dari mosi tersebut, akhirnya pemerintahan mahasiswa (baca: LMFF) mencoba menyembunyikan dirinya dengan dalih sebagai lembaga advokasi secara struktur organisasi. Namun, dalam praktiknya, ia tetap tidak mampu menjawab permasalahan mahasiswa Fakultas Filsafat. Jofie, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2014, mengungkapkan bahwa hingga 2019 kinerja advokasi LMFF tidak pernah menyentuh mahasiswa Fakultas Filsafat. Adapun, menurutnya, permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Filsafat dapat diselesaikan dengan jalur koordinasi antarindividu (Jofie, 2022).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Putu Lingga, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2014. Ketika dirinya mengalami masalah keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Lingga tidak menyelesaikan masalahnya melalui LMFF, tetapi berkoordinasi langsung antarteman. Kendati, Lingga pun mengungkapkan bahwa cukup sulit dilakukan ketika melibatkan antarangkatan (Lingga, 2022). Melihat pelbagai masalah yang muncul ke permukaan dari tahun ke tahun terkait LMFF, BPMF Pijar mencoba melakukan jajak pendapat terkait kinerja advokasi LMFF dengan total 27 responden, yakni 6 responden angkatan 2020, 13 responden angkatan 2021, dan 8 responden angkatan 2022.

**Tabel 1. Meninjau Kinerja Advokasi LMFF**

| Pertanyaan | Jawaban | | |
|---|---|---|---|
| | Angkatan 2020 | Angkatan 2021 | Angkatan 2022 |
| | **Tanggapan mahasiswa Fakultas Filsafat terkait Pembayaran dan Keringan UKT** | | |
| Apakah anda mengalami kendala dalam pengajuan keringanan UKT, keringaan dengan presentase tententu, pengembalian (refund) UKT dengan presentase tertentu, penundaan pembayaran UKT, dan/atau pengajuan cuti mahasiswa? | **Pernah 33.3%** | **Pernah 15.4%** | **Pernah 12.5%** |
| Terkait pertanyaan diatas, apakah anda menerima bantuan advokasi LMFF? | Tidak 50% | Tidak 100% | Tidak 100% |
| | Bantuan informasi 50% | - | - |
| | **Tanggapan mahasiswa Fakultas Filsafat terkait Kinerja advokasi LMFF** | | |
| Apakah anda merasakan bantuan advokasi dari kehadiran LMFF? | Bantuan informasi 33.3% | Bantuan informasi 21.4% | Bantuan informasi 37.5% |
| | Tidak 66.7% | Tidak 78.6% | Tidak 62.5% |
| Apa kritikmu terhadap advokasi LMFF? | Saya tidak merasakan kinerja advokasi LMFF 16.7% | Saya tidak merasakan kinerja advokasi LMFF 38.5% | Saya tidak merasakan kinerja advokasi LMFF 25.0% |
| | LMFF kurang meberikan argumentasi yang kuat dalam membela hak-hak mahasiwa ketika berhadapan dengan pihak dekanat 33.3% | LMFF tidak memasukan analisis komperhensif dalam kajiannya. LMFF sebagai lembaga advokasi juga tidak melakukan pendekatan dan tidak menyediakan ruang diskusi terkait masalah yang dialami mahasiswa Fakulta Filsafat 15.4% | Informasi dari LMFF tidak terlalu membantu 12.5% |
| | LMFF hanya menjadi humas dan publikasi dekanat. Padahal, advokasi tidak sebatas publikasi 33.3% | Alih-alih melakukan advokasi, LMFF lebih kepada humas dekanat 7.7%<br>LMFF secara stuktur organisasi menyerupai lembaga eksekutif. Seharusnya, seharusnya fokus saja advokasi yang komperhensif 7.7%<br>Tidak ada bantuan signifikan yang ditawarkan oleh LMFF 15.4% | LMFF sebagai lembaga advokasi juga tidak melakukan pendekatan kepada mahasiswa 25.0% |
| | LMFF tidak mewadahi seluruh keluh kesa mahasiswa Fakultas Filsafat 16.7% | Belum ada 15.4% | Belum ada 37.5% |

Hasilnya, dari 15,4% mahasiswa angkatan 2021 dan 12,2% mahasiswa angkatan 2022 yang mengalami kendala dalam pengajuan keringanan UKT, tidak menerima bantuan advokasi dari LMFF. Adapun, bantuan yang diterima oleh angkatan 2020 hanya berupa layanan informasi. Layanan ini pun dinilai tidak membantu oleh 12,5% mahasiswa angkatan 2022. Bahkan, 33,3% mahasiswa angkatan 2020 dan 7,7% mahasiswa angkatan 2021 menilai kinerja LMFF hanya sebatas humas dekanat Fakultas Filsafat. Kemudian, 16,7% mahasiswa angkatan 2020, 38,5% mahasiswa angkatan 2021, dan 25% mahasiswa angkatan 2022 tidak merasakan kinerja advokasi dari LMFF. Kendati LMFF mencoba menawarkan layanan informasi, 15,4% mahasiswa angkatan 2021 menilai bahwa bantuan tersebut tidak membantu secara signifikan. Akibatnya, beberapa kritik dilontarkan terhadap kinerja advokasi LMFF. Sebesar 33,3% mahasiswa angkatan 2020 dan 15,4% mahasiswa angkatan 2021 mengungkapkan bahwa praktik advokasi LMFF tidak memadai, salah satunya dari segi kajian yang tidak komprehensif.

Lebih lanjut, 7,7% mahasiswa angkatan 2021 justru menilai bahwa LMFF menyerupai lembaga eksekutif mahasiswa dalam struktur organisasinya. Hal tersebut juga sempat diungkapkan oleh Lingga. Menurut Lingga, struktur organisasi LMFF menyerupai pemerintahan mahasiswa. Dengan adanya kabinet dan orientasi hubungan dengan pihak eksternal, menurut Lingga, struktur LMFF menyerupai struktur BEM KM UGM. Hal ini membuat tugas advokasi menjadi melebar. Struktur organisasi yang seharusnya disesuaikan dengan tugas dan peranan sebagai BKM Advokasi menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya (Lingga, 2022).

**Tabel 2. Meninjau Bentuk LMFF**

| Pertanyaan | Jawaban | | |
|---|---|---|---|
| | Angkatan 2020 | Angkatan 2021 | Angkatan 2022 |
| Apakah LMFF mengambil bentuk student government? | Ya (16.7%) | Ya (35.4%) | Ya (25.0%) |
| | Terlihat dari stuktur organisasi dan tupoksi advokasi di dalamnya. | LMFF menjadi representasi mahasiswa filsafat ketika berhubungan dengan pihak dekanat. | Karena seakan-akan setauku dia seperti seakan-akan merepresentasikan seluruh kesatuan mahasiswa Filsafat. |
| | | Secara struktur internal, LMFF mengambil bentuk kabinet seperti BEM KM UGM. Selain itu, LMFF juga mengambil nama sebagai Lembaga Mahasiswa. | |
| | Tidak 50,0% | Tidak 46.2% | Tidak 12.5% |
| | Mereka (LMFF) menyatakan tidak sebagai student government dan hanya sebatas advokasi | LMFF bukanlah organisasi yang mengatur mahasiswa mana pun. LMFF juga bukan merupakan *student representation* karena LMFF tidak merepresentasikan mahasiswa, kecuali segelintir orang saja—banyak aspirasi yang didorong LMFF juga merupakan aspirasi anggotanya. | - |
| | LMFF tidak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk apapun untuk mengatur mahasiswa, atau sekurangnya, mengoordinir. | | |
| | Mungkin 33.3% | Mungkin 38.5% | Mungkin 62.5% |
| | Saya tidak tahu stuktur dan tupoksi LMFF baik sebagai *student government* maupun sebagai lembaga advokasi | Sependek pengetahuan saya, karena LMFF yg sering seolah2 merepresentasikan dan mewakili fakultas filsafat di event2 eksekutif | Seperti yang pernah dijelaskan dalam BKM EXPO, LMFF memiliki kerja yg sama dengan student government terutama di bagian komunikasi. |
| | | Saya tidak tau kerjanya LMFF | |
| | | Saya tidak tahu stuktur dan tupoksi LMFF baik sebagai *student government* maupun sebagai BKM biasa | |

Lagi-lagi, pemerintahan mahasiswa yang mencoba bersembunyi di balik narasi advokasi, dalam praktiknya, telah gagal. Setelah mencermati kegagalan dan faktor yang membuat LMFF gagal menjadi lembaga, pertanyaan selanjutnya adalah perlukah eksistensi LMFF? Melihat kegagalan secara struktural dan kultural LMFF, tentu eksistensinya perlu dipertanyakan. Ditambah lagi, pemerintahan mahasiswa yang mengadopsi bentuk negara akan gagal karena masalah representasi itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih membutuhkan suatu wadah guna menyalurkan kepentingannya.

**Forkom Filsafat, Alternatif?**

BPMF Pijar kemudian mencoba menyelidiki eksistensi subjek lain yang, mungkin, dapat menjadi komunikator permasalahan masalah mahasiswa filsafat, yakni Forum Komunikasi (Forkom) Fakultas Filsafat. Forum ini berbentuk musyawarah kultural yang kemudian menjadi sarana penentuan keputusan. Farid, Koordinator Forkom 2022, menyatakan ketika mahasiswa Fakultas Filsafat membuat keputusan, memang mereka mengadakan musyawarah atau forum yang gunanya untuk mengejawantahkan seluruh suara mahasiswa Fakultas Filsafat. Forkom sendiri tidak merepresentasikan relasi identitas seluruh mahasiswa Fakultas Filsafat karena sifatnya sebatas perkumpulan mahasiswa. Lapisan birokrasi yang tipis ini memudahkan advokasi kepentingan mahasiswa Fakultas Filsafat (Farid, 2022).

Namun, dalam praktiknya, Forkom juga belum menjadi bentuk yang ideal bagi mahasiswa Fakultas Filsafat. Melalui jajak pendapat yang dilakukan BPMF Pijar, ditemukan bahwa 20% mahasiswa angkatan 2021 menyatakan bahwa Forkom belum mampu menjadi bentuk alternatif dari mahasiswa. Pasalnya, paradigma yang digunakan Forkom sama halnya dengan bentuk pemerintahan mahasiswa pada umumnya. Tanpa adanya pergeseran paradigma, dasar organisasi, dan pranata organisasi yang setara, Forkom tidak mampu menjadi alternatif bagi mahasiswa Fakultas Filsafat. Kemudian, 16,7% mahasiswa 2020, 50% mahasiswa angkatan 2021, dan 33,3% mahasiswa angkatan 2022 masih ragu menyatakan bahwa Forkom menjadi alternatif bagi mahasiswa Fakultas Filsafat.

Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan dalam tugas pokok dan fungsi Forkom, serta relasinya dengan BKM maupun mahasiswa Fakultas Filsafat lainnya. Kendati demikian, 83,3% mahasiswa angkatan 2020, 30% mahasiswa angkatan 2021, dan 66,7% mahasiswa angkatan 2022 menyatakan bahwa Forkom telah mampu menjadi alternatif sebab di dalamnya terdapat unsur perwakilan dari tiap BKM. Selain itu, strukturnya yang tidak hierarkis dan alur pengambilan keputusan berdasarkan forum memungkinkan penyerapan aspirasi dari berbagai unsur mahasiswa Fakultas Filsafat.

Kendati demikian, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Forkom masih dinilai belum ideal oleh 33,3% mahasiswa angkatan 2020, 38,3% mahasiswa angkatan 2021, dan 62,5% mahasiswa angkatan 2021. Sebab, menurut mereka, forkom hanyalah legitimasi dari beberapa BKM guna menjaga "warisan kultural" sentimen terhadap pemerintahan mahasiswa.

**Tabel 4. Kritik Terhadap Forkom Filsafat**

<table>
<tr><th colspan="3">Jawaban</th></tr>
<tr><th>Angkatan 2020</th><th>Angkatan 2021</th><th>Angkatan 2022</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Kendati FORKOM tidak mendaku sebagai lembaga advokasi, tetapi kerja-kerja FORKOM nyatanya adalah kerja advokasi dalam arti tertentu. Oleh karena itu, FORKOM juga harus keras dan lantang kepada Dekanat agar hak-hak yang semestinya diterima mahasiswa, benar-benar terwujudkan.</td><td>Pertanyakan ulang arti "komunikasi" di sana. Lalu, pertegas. Komunikasi berlangsung dengan arah. Apakah Forkom Fakultas Filsafat sudah punya arah?</td><td rowspan="2">Forkom seharusnya menjaring kordinasi dari mahasiswa Filsafat lebih banyak, yang terdiri dari perwakilan tiap angkatan dan ketua BKM, jadi kerajaannya Forkom biar ngak cuman kayak event organizer</td></tr>
<tr><td>Eksklusif. Proker cuma party</td></tr>
<tr><td>Forkom seharusnya bisa lebih fungsional lagi, lebih koordinatif lagi.</td><td>Saya tidak pernah mengetahui raison d'etre Forkom FF. Pastinya, Forkom FF tidak mengiklankan diri sebagai lembaga yang patut didukung.</td><td rowspan="2">Forkom seharusnya lebih menyuarakan keresahan dan kesulitan mahasiswa dalam berdinamika di lingkungan kampus</td></tr>
<tr><td>Forkom perlu mempertimbangkan aspek keterbukaan agar bisa menjadi alternatif ideal bagi student government.</td><td>Saya rasa keterwakilan mahasiswa dalam Forkom hanya "itu-itu saja" sehingga kurang bisa mewakili suara mahasiswa secara keseluruhan.</td></tr>
</table>

Selain itu, beberapa kritik dilayangkan kepada Forkom karena perwakilan dalamnya dinilai eksklusif dan kurang mewakili keseluruhan mahasiswa Fakultas Filsafat. Bahkan, sejauh ini Forkom dinilai hanya sebagai pembuat acara, sama halnya dengan LMFF. Sementara itu, Forkom juga dinilai perlu mempertimbangan aspek keterbukaan dalam menjalin koordinasi antarelemen mahasiswa di Fakultas Filsafat.

**Pencarian Alternatif Lain bagi Fakultas Filsafat**

Kegagalan LMFF menciptakan wadah advokasi yang kontekstual dan kebuntuan Forkom dalam menjaring aspirasi seluruh elemen mahasiswa di Fakultas Filsafat mengisyaratkan sinyal pembentukan alternatif lain. Sebab, melihat masalah riil yang dialami mahasiswa Fakultas Filsafat, mengindikasikan kebutuhan bentuk yang paling mungkin dalam menampung idealitas individu dalam ranah personal maupun publik. Oleh karena itu, tawaran alternatif selain LMFF dan Forkom adalah hal yang niscaya. Alternatif ini diperlukan untuk mengubah paradigma kelembagaan secara keseluruhan serta teknis dari pelaksanaan fungsi lembaga tersebut. Lantas, alternatif seperti apa yang paling mungkin dipraktikan di Fakultas Filsafat.

Pencarian alternatif ini mengisyaratkan beberapa model yang dapat menjadi pakem bentuk pemerintahan mahasiswa. Mengenai tata kelola perguruan tinggi, pemerintahan mahasiswa harus mencari cara yang layak untuk berbagi manajemen, misalnya, di tingkat kelembagaan, divisi, atau departemen. Berangkat dari ini Don Creamer, pemerhati perguruan tinggi asal Amerika Serikat, menjelaskan beberapa bentuk pemerintahan mahasiswa yang dapat diterapkan di perguruan tinggi. Ada beberapa model: (1) Model majelis perwakilan. Model ini adalah bentuk umum dari majelis perwakilan yang terdiri dari fakultas dan senat mahasiswa atau beberapa bentuk dewan kampus. (2) Model komunitarian. Model ini dapat berupa badan pembuat keputusan atau badan dengar pendapat terbuka. (3) Model komunitas urban. Model ini ini beroperasi dengan mengikutsertakan peserta dari seluruh komunitas, bukan hanya partisipan kampus. Beberapa sistem bahkan menyertakan perwakilan dari sekolah menengah setempat. (4) Model *ad hoc*. Model ini beroperasi dengan membuat unit yang diperlukan untuk menjalankan urusan tertentu, lalu dibubarkan. (5) Model sindikalis. Bentuk ini beroperasi seperti serikat pekerja. Mahasiswa membentuk basis kekuatan nasional, atau regional, dan kemudian memberikan tekanan pada pembuat keputusan untuk bertindak. Selain beberapa model yang telah terjelaskan di atas, terdapat bentuk lainnya yang dapat menjadi bentuk alternatif. Bentuk tersebut bernama asosiasi komunitas.

Dallas College El Centro Campus di Texas, Amerika Serikat menerapkan sistem ini secara komprehensif. Model mereka terdiri dari pertemuan balai kota yang diadakan setiap bulan (melibatkan 100–400 orang setiap kali); Dewan Komunitas yang terdiri dari orang-orang dari semua kategori pekerjaan perguruan tinggi (termasuk siswa); dan kelompok semi-permanen (eksternal). Sistem ini lahir dari tujuan fundamental, yakni basis komunitas dalam pengambilan keputusan. Dallas College El Centro Campus menghapus sama sekali pemerintahan mahasiswa dan menggantikannya dengan sistem eklektik. Bentuk ini, dalam strukturnya, melibatkan semua komponen mahasiswa, administrator, sekretaris, personel pemeliharaan, dan kadang-kadang warga setempat.

Ketika orang menjadi prihatin, mereka melibatkan diri dengan orang atau kelompok yang paling mampu membantu mereka dengan keprihatinan mereka (Creamer, 1975). Hal ini mampu menggantikan struktur tersembunyi pemerintahan mahasiswa yang rapuh baik dalam LMFF maupun Forkom. Penyelidikan terkait struktur ideal bagi advokasi mahasiswa Fakultas Filsafat merupakan pekerjaan jangka panjang. Mahasiswa Fakultas Filsafat saat ini bertarung dengan alasan historis dan juga kebutuhan praktis-kontekstual.

Upaya advokasi dasar yang dilakukan LMFF dan komunikasi setara antarmahasiswa oleh Forkom belum mampu menjadi jawaban akhir. Nyatanya, mahasiswa Fakultas Filsafat masih menyelesaikan masalah yang dialami secara individual. Tipisnya sekat antara penyelesaian model kultural dan struktural tak kunjung mencapai garis akhir. Hal yang bisa diharapkan bukanlah mencari model yang paling ideal dalam garis teoretis saja, melainkan menemukan model yang mampu menyelesaikan problem keseharian mahasiswa Fakultas Filsafat tanpa harus terjerat oleh petinggi kampus nan jauh di sana.

**[Rafael, Isa, Gab]**

**Daftar Pustaka**


Amey, M. J., & David, M. E. (Eds.). (2020). *The SAGE Encyclopedia of Higher Education*. SAGE Publications.

Creamer, D. (1975). Alternatives to Traditional Student Government. *Peabody Journal of Education*, *52*(2), 110–115. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01619567509558537?journalCode=hpje20

Dorozhkin, E. M., Zaitseva, E. V., & Tatarskikh, B. Y. (2016). Impact of Student Government Bodies on Students' Professional Development. *IEJME — MATHEMATICS EDUCATION*, *11*(7). https://www.iejme.com/download/impact-of-student-government-bodies-on-students-professional-development.pdf

Farid. Wawancara oleh BPMF Pijar. Zoom Meeting. 21, Desember, 2022.

Husin, L. H. (2014). *Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan: Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari Masa Orde Lama hingga Pasca-Reformasi*. Penerbit PolGov.

Jofie. Wawancara oleh BPMF Pijar. Zoom Meeting. 24, November, 2022.

Mosi Tidak Percaya LMFF (2015). Diakses di s.id/arsipforkomfilsafat

Lingga, P. Wawancara oleh BPMF Pijar. Zoom Meeting. 15, Desember, 2022.

Pramono, A. Wawancara oleh BPMF Pijar. Zoom Meeting. 2, Desember, 2022.

Susilo, J. (2021). *Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi, Restrukturalisasi Institusi dan Perlawanan Gerakan Mahasiswa Kini, Studi Pasca PTN-BH* [Skripsi]. Yogyakarta. https://www.researchgate.net/publication/353730608_Neoliberalisasi_Pendidikan_Tinggi_Restrukturalisasi_Institusi_dan_Perlawanan_Gerakan_Mahasiswa_Kini_Studi_Pasca_PTN-BH_Joko_Susilo_Skripsi_S1_DMKP_FISIPOL_UGM_2021

Yunani, A. R. Wawancara oleh BPMF Pijar. 23, November, 2022.

Ilustrasi: Anas Abrar

# Impotensi Pemerintahan Mahasiswa dan Implikasi Praktisnya

Peran pemerintahan mahasiswa (*student government*) kian dipertanyakan kembali. Kehadirannya selama ini menjadi dilema, ada yang mendukung, menolak, dan ada pula yang apatis. Dilema tersebut menjadi sumber bagi beberapa pertanyaan. (1) Mengapa ada yang mendukung? (2) Mengapa ada yang menolak? Juga, (3) mengapa ada yang apatis? Pertanyaan tersebut perlu dijawab demi masa depan pemerintahan mahasiswa dan kehidupan mahasiswa itu sendiri. Dilanggengkan, digugat, atau bahkan dimusnahkan menjadi pertanyaan eksistensial dan juga modalitas dari pemerintahan mahasiswa yang ada.

Apakah pemerintahan mahasiswa adalah suatu keniscayaan—dalam arti bahwa tidak mungkin kalau ia tidak ada? Meskipun pemerintahan mahasiswa dimungkinkan hadir, tidak lantas kemudian hal tersebut menjadi suatu kemestian. Sebagaimana adagium *Potuit, Decuit, Ergo Fecit*, Tuhan yang dapat melakukan segalanya saja, tidak lantas melakukan segala hal sebab tidak semua hal adalah baik. Pemerintahan mahasiswa yang tidak sama sekali memiliki derajat ilahiah tentu saja harus pula tunduk di bawah adagium ini bahkan mungkin takluk terhadapnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan alasan dan argumen yang kuat sebagai justifikasi atas pemerintahan mahasiswa.

Bila tidak ditemukan justifikasi yang kuat tersebut, pemerintahan mahasiswa juga harus berbesar hati untuk menerima bahwa eksistensinya tidak lagi diperlukan. Untuk itu, penting bagi kita untuk sadar dan melihat terlebih dahulu *asbabun nuzul* dari pemerintahan mahasiswa yang ada. Tulisan ini berusaha menunjukkan sembari membawa bukti konkret, secara spesifik di Universitas Gadjah Mada (UGM), bahwa salah satu elemen pemerintahan mahasiswanya—Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM—bermasalah.

***Cukup banyak sistem pemerintahan, yang gagal menjaga dan melegitimasi dirinya sendiri karena adanya ketidaksesuaian antara fungsi ideal yang dirumuskan secara utopis dengan kondisi praktis dalam kenyataannya.***

**Pemerintahan Mahasiswa sebagai Juru Selamat**

Pelacakan atas pemerintahan mahasiswa dapat ditemukan, tentu terlebih dahulu bukan dari negara kita, melainkan Amerika Serikat (AS). Sejarawan sepakat bahwa sistem pemerintahan mahasiswa sudah eksis semenjak tahun 1700-an. Namun, memang pada masa itu sistemnya masih belum dimengerti dan diapresiasi oleh orang banyak.[1] Lokasi dari pemerintahan mahasiswa pertama ini masih banyak diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa sistem pertama ditemukan di Universitas William dan Mary, Universitas Virginia, dan banyak pula universitas yang kemudian mengklaim bahwa diri mereka yang pertama.[2] Namun, lokasi pertama yang pasti tidak terlalu penting untuk dibahas. Hal yang jauh lebih penting adalah pertanyaan tentang alasan pemerintahan mahasiswa dapat eksis dan urgensi eksistensinya tersebut.

***ketika segala bentuk pemerintahan menghasilkan hal-hal yang destruktif, adalah hak rakyat untuk menggulingkan pemerintahan tersebut.***

Terdapat beberapa faktor yang memantik mahasiswa untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan mahasiswa. Pemerintahan tersebut merupakan suatu perangkat yang secara ideal dianggap mampu mengakomodasi permasalahan dalam dinamika kehidupan kampus. Kebutuhan ekstrakurikuler, kurangnya informasi mengenai kurikulum akademik, ketidakpuasan terhadap aturan kelembagaan dan prosedur disipliner, serta keinginan untuk pemberdayaan mahasiswa menjadi persoalan utama yang coba diatasi melalui pembentukan pemerintahan mahasiswa.[3] Maka dari itu, pemerintahan mahasiswa dibentuk dan hadir sebagai "juru selamat" atas permasalahan tersebut.

Semua program mahasiswa berusaha untuk memenuhi satu atau lebih dari tiga tujuan. Menyediakan layanan institusional, mengajarkan keterampilan manajemen kehidupan, dan memberikan wadah supaya mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pengaturan kurikuler dan kokurikuler.[4] Dengan alasan-alasan di atas dapat disimpulkan, meminjam definisi dari Freidson dan Shuchman, hakikat dari pemerintahan mahasiswa adalah suatu sistem organisasi yang dengan komposisi dan konstitusinya memiliki justifikasi untuk mewakilkan dan merepresentasikan mahasiswa secara keseluruhan.[5]

**Kondisi Ideal dan Praktis: Tantangan Pragmatis**

Bagian pertama teks—yang mencoba untuk melacak aspek historis pemerintahan mahasiswa—membuat pemerintahan mahasiswa dikelilingi oleh nuansa yang menunjukkan bahwa keberadaannya sangat krusial. Pemerintahan mahasiswa memiliki fungsi-fungsi yang sangat esensial dan seolah tak tergantikan. Oleh karena itu, kita dapat mengerti alur pikiran orang-orang yang mendukung keberadaan pemerintahan mahasiswa ini seperti dalam pertanyaan (1). Namun, pertanyaan (2) dan (3) masih belum terjawab. Kedigdayaan pemerintahan mahasiswa tidak dapat dibantah lagi. Walaupun begitu, sama seperti bentuk representasi lain, pemerintahan mahasiswa tak luput dari masalah. Problematika yang muncul di antaranya adalah ketika kondisi ideal dan praktikal tidak berjalan dengan harmonis.

BPMF Pijar mencoba membuat demarkasi antara kondisi ideal dan kondisi praktis—yang-filosofis dan yang-teknis. Tentu hal ini, bila ditelaah cepat-cepat, bukanlah pemikiran yang revolusioner. Cukup banyak sistem pemerintahan yang gagal menjaga dan melegitimasi dirinya sendiri karena adanya ketidaksesuaian antara fungsi ideal yang dirumuskan secara utopis dengan kondisi praktis dalam kenyataannya. Kesalahan yang ada dapat berasal pertama-tama dari bentuk sistemnya, atau memang dalam ranah teknis, ketika penyelenggara gagal mengikuti apa yang didambakan sehingga tidak terjadi korespondensi.

Berkaca pada sejarah, Thomas Jefferson, dengan piawai menuliskan justifikasi dan pembenaran atas pelepasan Amerika Serikat dari Britania Raya (Inggris) di akta satu lembar yang tersohor. Melalui deklarasi kemerdekaannya, representatif Amerika menyatakan ketika segala bentuk pemerintahan menghasilkan hal-hal yang destruktif, adalah hak rakyat untuk menggulingkan pemerintahan tersebut. Transkripsi tersebut kemudian menunjukkan kesalahan demi kesalahan yang telah dilakukan oleh Inggris kepada negara koloninya. Mereka percaya sejarah Raja Inggris adalah sejarah yang berisi luka berulang dan perampasan, yang semua hal itu berakhir pada pendirian tirani absolut atas negara Amerika.

**Borok dalam Tubuh Mahasiswa**

Berdasar pada paparan di atas, kita mengetahui bahwa perbaikan terhadap kegagalan dan dekadensi sistem pemerintahan dapat didorong lewat kesadaran civitas terhadap bobroknya pemerintahan. Kemerdekaan Amerika dipantik oleh munculnya kesadaran atas kerugian-kerugian serta pengekangan raja Inggris terhadap negara koloninya. Oleh karena itu, Amerika, dengan para perwakilannya, menentang dominasi Inggris.

Hal yang sama juga semestinya dapat dilakukan dalam konteks pemerintahan mahasiswa. Di tataran pemerintahan mahasiswa, khususnya dalam lingkup UGM, pertanyaan selanjutnya adalah tentang peranan BEM KM UGM UGM sebagai representasi mahasiswa. Apa urgensinya? Atas dasar apa salah satu elemen keluarga mahasiswa yang satu ini punya otoritas eksekutif sebagai pemerintahan mahasiswa? Awalnya mungkin berasal dari Pemilihan Umum Mahasiswa. Namun, lebih dasar lagi, mengapa kita mesti memilih? Satu jawaban berangkat dari argumen tradisionalistik yang cukup rasional. Mahasiswa adalah kelompok yang dielu-elukan sebagai *agent of change* (agen perubahan). Meski argumen ini terdengar hiperbolis, tetapi kemunculannya bukan tanpa sebab. Sejarah pandangan ini dapat ditilik jauh sampai ke masa gerakan mahasiswa di masa Orde Baru yang mencapai puncaknya pada Reformasi '98. Berangkat dari peristiwa tersebut, mahasiswa dipandang sebagai agen yang mampu untuk menghasilkan sebuah kebaruan. Pada akhirnya, predikat agen perubahan tersebut melekat pada diri mahasiswa. Gerakan mahasiswa menjadi sebuah gerakan sosial yang bersumber dari tuntutan peran ini. Oleh karena itu, BEM KM UGM yang muncul hari ini merupakan pengemban amanat. BEM KM UGM idealnya menjadi penyambung lidah mahasiswa sebagai perwajahan pemenuhan amanat besar tersebut.

***Pembatasan demokrasi yang dilakukan pemerintahan mahasiswa terjadi ketika mereka tidak mampu—dan tidak mau—mengakomodir aspirasi-aspirasi mahasiswa yang diwakilinya.***

Sejarah menunjukkan, pemerintahan mahasiswa mulanya dibangun dan dilahirkan demi mewujudkan tujuan ideologi negara.[6] Dalam konteks Amerika Serikat misalnya—juga di Indonesia sejak upaya reformasi—mereka ingin mengupayakan terwujudnya demokrasi yang ideal. Bila ditelaah cepat-cepat, hal tersebut tentunya merupakan hal yang baik. Namun, petaka akan terjadi apabila pemerintahan mahasiswa justru menjadi sarana pembatasan demokrasi. Pembatasan demokrasi yang dilakukan pemerintahan mahasiswa terjadi ketika mereka tidak mampu—dan tidak mau—mengakomodir aspirasi-aspirasi mahasiswa yang diwakilinya. Tindakan semacam ini mungkin terjadi ketika pemerintahan mahasiswa justru berpihak pada pihak yang menjadi sasaran tuntutan kaum mahasiswa (para elitis). Ketika hal tersebut terjadi, alih-alih menjadi penyambung lidah mahasiswa, pemerintahan mahasiswa berubah menjadi penyambung mahasiswa dengan cita-cita yang dikehendakinya. Tegasnya, tidak mungkin demokrasi yang sehat—yang menjadi kondisi ideal terpenuhinya representasi yang autentik—terwujud apabila pemerintahan mahasiswanya hanya melulu berada dalam genggaman kaum elitis.

***BEM KM UGM yang semestinya menjadi representasi autentik mahasiswa yang menjunjung perjuangan, malah melanggengkan kendali sumber kedunguan yang mengawali berbagai persoalan.***

***pemerintahan mahasiswa secara diam-diam boleh jadi memang merupakan agenda kaum elitis dalam melanggengkan kekuasaannya.***

Kenyataannya, alih-alih menjadi penyambung lidah mahasiswa, BEM KM UGM justru menjadi perpanjangan tangan elitis. Ia berkhianat pada kondisi ideal pemerintahan mahasiswa. BEM KM UGM hanya menjadi boneka yang seakan-akan tidak punya kendali atas dirinya sendiri. BEM KM UGM yang semestinya menjadi representasi autentik mahasiswa yang menjunjung perjuangan, malah melanggengkan kendali sumber kedunguan yang mengawali berbagai persoalan. Berbagai sowan dilakukan demi memanifestasikan fungsi tersembunyi BEM KM UGM, yaitu sarana "pencarian nama". Peristiwa paling konyol terjadi pada akhir Juni 2021. Selepas BEM KM UGM menunjukan dukungan pada desa Wadas, mereka malah dengan bangga mengundang Ganjar Pranowo sebagai pembicara *webinar* mereka.[7] Bukan hanya itu, kekonyolan bertambah sebab topik pembicaraan yang adalah Pancasila semestinya menjadi bahasan yang menyinggung kemanusiaan. Kekonyolan BEM KM UGM tidak berhenti sampai di situ. Pada awal tahun 2023, pengurus BEM KM UGM mendatangi kantor gubernur Jawa Tengah dan meminta petuah kepada Sang Gubernur (Ganjar Pranowo) terkait berbagai hal.[8] Peristiwa ini jelas berkontradiksi dengan visi sentral pemerintahan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi BEM KM UGM beralih dari yang semestinya menjadi penyambung lidah mahasiswa menjadi suksesor kaum elitis.

Hal di atas menjadi indikasi bahwa pemerintahan mahasiswa secara diam-diam boleh jadi memang merupakan agenda kaum elitis dalam melanggengkan kekuasaannya. Gandengan demi gandengan dilakukan demi kepentingan oknum. Kembali sejenak pada tahun 2016 silam, terjadi pengambilan keputusan sepihak oleh Presma BEM KM UGM UGM pada saat itu, M. Ali Zaenal Abidin, yang melakukan negosiasi tertutup dengan pihak Rektorat di detik-detik akhir aksi 2 Mei 2016.[9] Hal ini menyalahi komitmen kesepakatan yang menolak segala bentuk perwakilan negosiasi tertutup.

***BEM KM UGM harus dibubarkan dan berbagai warisan prosedural yang dimilikinya harus diberedel.***

Tidak hanya bobrok dalam hal citra eksternal, BEM KM UGM juga menjadi luka menganga yang bernanah dan berbau di dalam tubuh mahasiswa. Alih-alih mengakomodir berbagai ide alternatif yang berpotensi akan muncul, BEM KM UGM justru melanggengkan pakem tradisi yang sudah mendominasi organisasi melalui prosedural kelembagaan-administratif dan perilaku senioritas.[10] Padahal, banyaknya ide alternatif akan memperbesar peluang terumuskannya solusi yang tepat guna bagi berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa. Ketika ide-ide alternatif tersebut dibendung, berbagai persoalan menjadi semakin rumit dan tak

kunjung terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa BEM KM UGM mengalami impotensi dalam melaksanakan fungsi idealnya. Tidak berhenti sampai di situ, BEM KM UGM malah memelihara kanker dalam bentuk hambatan terhadap kemajuan dalam perjuangan mahasiswa lantaran pembatasan ide alternatif yang dilakukannya.

**Juru Selamat yang menjadi Juru Celaka**

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa BEM KM UGM yang diharapkan menjadi representatif bagi mahasiswa justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan menjadi penghambat bagi kemajuan. BEM KM UGM yang idealnya dipersiapkan untuk menjadi "juru selamat" mahasiswa justru menjadi "juru celaka" yang berpotensi mengantarkan perjuangan mahasiswa, bahkan mahasiswa itu sendiri, pada kemuraman. Pertanyaan (2) telah terjawab, tetapi sekali lagi pertanyaan (3) masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita sebagai mahasiswa UGM masih perlu untuk menyadarkan secara luas dampak-dampak kerugian dan kebebalan BEM KM UGM sebagai "wajah" kita. Jika dan hanya jika kita semua memiliki kesadaran yang sama, maka perubahan ke arah yang baik lebih dapat terwujud dan signifikan. Oleh karenanya, berkaca pada sejarah, baik Revolusi Kemerdekaan Amerika Serikat maupun peristiwa Reformasi '98, merupakan hal yang masuk akal bila penolakan terhadap eksistensi BEM KM UGM muncul. Secara praktis, implikasi yang bisa disimpulkan adalah sebagai berikut: BEM KM UGM harus dibubarkan dan berbagai warisan prosedural yang dimilikinya harus diberedel.
[**Haycal, Novia, Steve]**

---

**Catatan Akhir**

1. Walter P. M., The History of Student Governance in Higher Education, (Charlotte: College Student Affairs Journal, Vol. 28 No. 2, 2010), 207-220.
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. Michael J. Cuyjet, Student government as a provider of student services, New Directions for Student Services, (1994) No. 66, 73.
5. Eliot Freidson dan Hedvah L. S., "Student government in American Colleges," dalam *Student Government, Student Leaders, and the American college,* E. Freidson (Ed.), (Philadelphia: United States National Student Association, 1955, 6), 3-8.
6. "Student Government," *Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society*, 5 Februari 2023, https://www.encyclopedia.com/children/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/student-government
7. BEM KM UGM, Berbagi Perspektif #3: Menyikapi Pancasila dalam Peradaban. https://www.youtube.com/live/6LaAh4phC6o?feature=share
8. "Pengurus BEM KM UGM Geruduk Kantor Ganjar Pranowo, Ada Apa?" *Jateng.inews.id,* https://jateng.inews.id/berita/pengurus-bem-km-ugm-geruduk-kantor-ganjar-pranowo-ada-apa
9. Susilo, J. (2021). Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi, Restrukturalisasi Institusi dan Perlawanan
10. Gerakan Mahasiswa Kini, Studi Pasca PTN-BH [Skripsi]. Yogyakarta. https://www.researchgate.net/publication/353730608_Neoliberalisasi_Pendidikan_Tinggi_Restrukturalisasi_Institusi_dan_Perlawanan_Gerakan_Mahasiswa_Kini_Studi_Pasca_PTN-BH_Joko_Susilo_Skripsi_S1_DMKP_FISIPOL_UGM_2021
11. *Ibid.*

Dok. Istimewa

# *Student Government* dan Representasi yang Tidak Perlu

*Oleh: Ayom Mratita Purbandani*

Diskusi mengenai kelayakan untuk mempertahankan bentuk-bentuk lembaga perwakilan mahasiswa dalam bentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sayup-sayup mulai terdengar kembali di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebetulnya, pembahasan relevansi lembaga perwakilan mahasiswa tidak pernah benar-benar redup, tetapi ia selalu timbul-tenggelam. Ia timbul saat ramai-ramai mendekati hingga memuncaknya Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) untuk memilih ketua lembaga perwakilan setiap tahun, dan tenggelam saat situasi tersebut telah usai. Namun, belakangan diskusi tersebut tampaknya bertahan lebih lama dari hanya sekadar sepanjang musim Pemilwa. Satu hal utama yang menjadi katalis, para mahasiswa tampaknya mulai kehilangan relevansi terhadap BEM karena tidak merasa terepresentasikan.

Sepanjang membaca cuplikan kesejarahan mengenai BEM sebagai *student government* 'pemerintahan mahasiswa' di berbagai tulisan, kita akan menemukan kata "perwakilan" dan "representasi" bertebaran di sana-sini. Memang, kata tersebut adalah kunci yang mengantarkan kepada konsep keseluruhan mengenai BEM sebagai pemerintahan mahasiswa. BEM yang berfungsi sebagai sebuah pemerintahan mahasiswa, membuatnya, setidaknya, berdiri di atas tiga asumsi: (1) legitimasi suara mahasiswa (*voice*); (2) keterwakilan kelompok dan komunitas (*representation*); (3) aksesibilitas organisasi dalam mengawal persoalan (*advocacy*)[1]. Artinya, BEM berkewajiban untuk menjadi "perantara" dan tak jarang justru merasa berhak akan hal tersebut.

> ***praktik representasi sering kali menghapus perbedaan.***

Peran mewakili tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa sebagaimana terangnya dalam nama lembaga perwakilan mahasiswa. Namun, BEM sering kali juga menjadi "wakil masyarakat" ketika menyinyalisasi ketidakberesan dalam tubuh pemerintahan. Pernyataan tersebut tak lain adalah turunan dari atribut semu yang disematkan dalam gerakan mahasiswa selama bertahun-tahun lamanya—bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Dalam sejarahnya, organisasi mahasiswa intrakampus semacam ini memosisikan diri sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeepers*) bagi kebijakan dan dinamika politik nasional secara umum. Jauh sebelum penyebutan nomenklatur BEM, sebutan Dewan Mahasiswa (DEMA) lebih dulu muncul pada tahun 1950[2]. Sebutan tersebut memiliki tujuan untuk menyatukan ragam aktivisme mahasiswa yang dipisahkan oleh sekat-sekat ideologis sekaligus menjadi ruang belajar mengenai keterampilan sosial dan politik.

Sebagai sebuah lembaga yang ketuanya dipilih bersama oleh seluruh mahasiswa setiap tahun, BEM KM UGM sesederhana lembaga representasi. Representasi di sini sering kali dianggap bersinonim dengan permainan peran advokasi untuk memformulasikan kepentingan mahasiswa secara riil dan tepat di lingkup universitas serta dengan demikian mengatasnamakan mahasiswa. Namun, kita perlu melihat lebih jauh dan mawas terhadap hal yang terkandung dalam kata "representasi" yang lebih tajam dari sekadar "mewakili" semata. Mengacu kepada pandangan Gayatri Spivak, representasi dapat berfungsi dalam dua bentuk: *vertretung,* yakni "berbicara atas nama" yang dilihat sebagai representasi politik; dan *darstellung* adalah penggambaran atau cerminan[3]. Peleburan kedua makna ini akan menjadi bahaya: salah mengira representasi estetika untuk benar-benar berada di posisi orang lain dan berbicara untuknya.

Representasi di sini perlu didudukkan sebagai sesuatu yang material, yang dapat menjadi sebuah kekuasaan untuk menciptakan normalitas yang dapat mengganggu relasi sosial. Sara Ahmed menyebut bahwa praktik representasi sering kali menghapus perbedaan.[4] Hal ini terlihat dari cara lembaga representasi mendeskripsikan mahasiswa sebagai identitas yang tunggal. Ragam atribut yang ramai-ramai disematkan pada identitas mahasiswa kemudian diyakini dimiliki oleh semua mahasiswa, adalah atribut sebagai agen perubahan, *generasi penerus bangsa*, dan berbagai turunannya. Penyeragaman identitas ini menyiratkan bahwa terdapat kesamaan kebutuhan dan kepentingan dari tiap-tiap kelompok mahasiswa. Oleh karena itu, representasi menjadi suatu proses inklusi dan eksklusi dalam satu tarikan napas. Ia tidak hanya mengancam sesuatu yang sebelumnya dimiliki—mengartikulasikan hasrat dan kepentingan mereka sendiri—tetapi juga mengerdilkan perbedaan epistemik dalam berbagai kelompok mahasiswa.

Universalisasi "berbicara atas nama" dalam representasi sering kali didasarkan kepada khayalan mengenai politik kedekatan. BEM KM UGM sebagai lembaga mahasiswa telah merasa sedemikian dekatnya dengan berbagai kelompok mahasiswa hingga merasa *being-together* atau *being-as-one*. Ahmed kembali mengingatkan bahwa hal semacam ini memiliki bahaya kekerasan, yakni melanggar hak politik dan aspirasi mahasiswa dengan mengambil tempatnya. Hal ini juga bertaut dengan menganulir keunggulan epistemik yang dimiliki tiap-tiap kelompok mahasiswa.

***Ia tidak hanya mengancam sesuatu yang sebelumnya dimiliki—mengartikulasikan hasrat dan kepentingan mereka sendiri—tetapi juga mengerdilkan perbedaan epistemik dalam berbagai kelompok mahasiswa.***

Kemungkinan kekerasan lainnya timbul atas dasar dari pertarungan dan kontestasi BEM sebagai pemerintahan mahasiswa sekarang ini adalah invasi ideologi eksternal dan bukannya kebutuhan sebenarnya dari mahasiswa. Representasi mahasiswa dalam BEM saat ini hanya melihat dirinya sebagai calon pengisi pos-pos birokrasi pemerintahan Indonesia ke depannya. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk menyampaikan sikap politik yang tidak mewakili apapun dari ragam mahasiswa selain kepentingannya mungkin terjadi. Sedemikian eratnya representasi dengan kemungkinan kekerasan, bahkan tindakan "mewakili" pun, adalah agenda yang ditujukan untuk melanjutkan kekuasaan.

Kekerasan juga dapat hadir dari kesulitan pencapaian independensi atas pengaruh kekuasaan yang lebih dominan. Hal ini tidak lain dapat ditilik dari pendanaan BEM yang berasal dari universitas. Ketidakmandirian finansial secara signifikan memperlihatkan bahwa lembaga representasi tidak dapat mandiri secara otoritas dari universitas. Pada titik ini, tindakan "mewakili" bukan hanya perpanjangan kepentingan sendiri saja, tetapi juga kepentingan institusi. Hal ini menegaskan tujuan esensial dari awal pendirian organisasi intrakampus, yakni kontrol terhadap mahasiswa.

Memahami bahwa representasi dari lembaga perwakilan merupakan aktivitas yang lekat dengan kekerasan. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan ruang bagi suara-suara yang menolak untuk diam atau terlibat dalam proyek yang berupaya "berbicara untuk orang lain". Perjumpaan yang dekat (*close encounter*) merupakan konsep yang muncul dalam pembacaan feminis pascakolonial yang bertujuan untuk menangkap momen etis dalam hubungan melalui perbedaan-perbedaan, dengan mengakui baik kedekatan dan kebaruan dari perjumpaan yang ada dan juga jarak yang dibawa oleh proses sosial yang lebih luas yang membuka, memengaruhi, dan mengikat perjumpaan dengan perbedaan[5].

***Perjumpaan yang dekat membawa kita untuk menyadari batas pengetahuan kita; dan kemungkinan yang ditawarkannya memungkinkan untuk belajar secara berbeda dari ragam kelompok mahasiswa.***

Konsep ini menjadi alternatif terhadap konsep representasi yang rentan terhadap kekerasan. Perjumpaan yang dekat memegang komitmen untuk berjuang, memahami kompleksitas, ambivalensi, tantangan, dan pengalaman dari ragam mahasiswa. Perjumpaan yang dekat membawa kita untuk menyadari batas pengetahuan kita; dan kemungkinan yang ditawarkannya memungkinkan untuk belajar secara berbeda dari ragam kelompok mahasiswa. Tindakan resistif ini berkenaan dengan keinginan mengambil bagian dalam menata kembali organisasi yang lebih peduli, afektif, dan berkeadilan sosial.

**[Ayom Mratita Purbandani]**

---

**Catatan Akhir**


1. Morolake O. Laosebikan-Buggs, "The role of student government: Perceptions and expectations," dalam *Student governance and institutional policy: Formation and implementation,* Miller dan Nadler (ed.), (Age Publishing: Greenwich, 2006), 1-8.
2. "Student Movement is Timeless; Student Government, Meanwhile, is Meaningless," *balairungpress,* 30 November 2022, https://www.balairungpress.com/2022/11/student-movement-is-timeless-student-government-meanwhile-is-meaningless/
3. Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the subaltern speak?" dalam *Marxism and the interpretation of culture,* C. Nelson dan L. Grossberg (ed.), (University of Illinois Press, 1988), 271-313.
4. Sara Ahmed, Strange encounters: Embodied others in post-coloniality (Routledge, 2000). \
5. *Ibid.*

# TEKA-TEKI SILANG NAN ASYIK!

## Mendatar

3.Filsuf yang selalu tidak bisa
4. Vokalis band guest star Hegemonia
5. Jalan panjang terapit sawah yang di dalamnya terdapat sumur
10. Lapangan surga tertinggi
11. Komunitas nyeni Fakultas Filsafat UGM
12. Tempat yang jarang dikunjungi mahasiswa di Fakultas Filsafat
13. Filsuf yang basah
14. Filsuf yang terlempar

## Menurun

1. Dosen Filsafat yang merah
2. Band yang terinspirasi Heidegger
6. Sifat mahasiswa yang paling disenangi dosen
7. Minuman tradisional Fakultas Filsafat UGM
8. Kuning-kuning di Filsafat
9. Asbak kebersamaan
15. Bangunan yang digusur dari lantai 4

# PIKSEL

FORUM KOMUNIKASI BADAN KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jl. Sosiohumaniora No. 01 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Yogyakarta, 30 Juni 2015

Lampiran : 1 Lembar Tuntutan Forum Komunikasi Badan Kegiatan Mahasiswa
Perihal: 1. Mosi Tidak Percaya atas Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat
2. Tuntutan Pembubaran Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Filsafat
Di Tempat

Dengan surat ini kami selaku **Forum Komunikasi Badan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Filsafat** Universitas Gadjah Mada menyatakan **MOSI TIDAK PERCAYA** atas **Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat.** Pernyataan ini didasari oleh permasalahan sebagai berikut:

1. LMFF telah melangkahi kewenangan Panitia PPSMB dengan mengumpulkan dan menjaring mahasiswa baru tanpa seizin panitia PPSMB.
2. LMFF telah melanggar fungsi semula sebagai badan advokasi fakultas filsafat menjadi badan representasi fakultas filsafat.
3. Kegiatan LMFF telah bersinggungan dengan kegiatan BKM lain.
4. Tidak ada transparansi yang jelas atas AD/ART dan struktur organisasi dalam LMFF.

Maka dengan ini forum komunikasi badan kegiatan mahasiswa fakultas filsafat melalui rapat bersama yang dilakukan pada **Jumat, 26 Juni 2015** mengajukan permohonan untuk **membubarkan LMFF** apabila LMFF tidak dapat memenuhi tuntutan yang terlampir.

Hormat Kami

BPMF Pijar
Pascal Caboet

Ketua Panta Rhei
Muhammad Najeb

Vio Pascalis

Ketua Sande Monink
Wara N

Ketua Retorika
Ismi Fauzia Nooraidha

Ketua LSF

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Dr. Munir

Lampiran 1

Tuntutan Forum Komunik...
Badan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Filsafa...

Berdasarkan pada kesepakatan hasil rapat forum komunikasi badan kegiatan mahasiswa fa...
filsafat pada **Jumat, 26 Juni 2015** maka kami, badan kegiatan mahasiswa fakultas filsafat mengajuk...
tuntutan **kepada LEMBAGA MAHASISWA FAKULTAS FILSAFAT** sebagai berikut:

1. Memutus hubungan dengan mahasiswa baru fakultas filsafat angkatan 2015 khususnya di jejaring sosial dan memberikan kewenangan penuh kepada panitia PPSMB Fakultas Filsafat untuk menjaring dan menyediakan informasi kepada mahasiswa baru fakultas filsafat angkatan 2015 setidak-tidaknya **dua hari** setelah tuntutan ini dipublikasikan. Interaksi dengan mahasiswa baru fakultas filsafat 2015 hanya diperbolehkan saat perkenalan BKM dan setelah PPSMB Fakultas Filsafat 2015 selesai.
2. Memberikan kejelasan AD/ART, kelembagaan, dan kegiatan kepada seluruh mahasiswa fakultas filsafat, khususnya badan kegiatan mahasiswa fakultas filsafat.
3. Mengubah bentuk Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat supaya tidak menimbulkan bias antara fungsi advokasi dan fungsi representasi.Direkomendasikan untuk mengubah nama "Lembaga Mahasiswa" dengan nama lain.

Tuntutan ini diselesaikan selambat-lambatnya **3 minggu** setelah perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2015/2016 dimulai.Apabila setelah waktu yang ditentukan tuntutan ini belum dipenuhi oleh Lembaga **Mahasiswa** Fakultas Filsafat, maka Forum Komunikasi Badan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Filsafat **menolak keberadaan dan kegiatan Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat** baik di dalam kampus **ataupun** di luar kampus.

Foto: Dika

**Mosi Tidak Percaya LMFF**
Mana berani tunjukkan wajah aslimu. Pemerintahan mahasiswa bersembunyi di balik narasi advokasi.
Masalah tidak selesai, hanya ada frustasi.

Foto: Dika

**Lorong Perpustakaan, Gedung A, Fakultas Filsafat UGM**
Langkah kaki sayup-sayup terdengar lirih dan berbisik,
"Jalan Gelap yang Kau Pilih."

Foto: Dika

**Menuju Selasar, Gedung B, Fakultas Filsafat UGM**
Setapak demi setapak, selangkah lawan selangkah.
Berlari membayar kebebasan. Bak cerobong kereta uap abad ke-19, asap seakan pengganti oksigen. *Udud sik!*

# KANVAS

MAHASISWA

DEKANAT

***"Risalah"***
*Wahyu Atika*

***"Terka"***
*Wahyu Atika*

# Jemari Zina

*Oleh: Shidqi Aldiansyah*

Kubiarkan jemari lancang menyebar apa yang
akal dan hati bincang

Kubiarkan ia memeluk dengan nafsu pada pena
lalu bercinta dengan kertas

Kubiarkan ia kalut mengoyak bingung jadi diksi,
merobek takut jadi puisi

Aku shidqi

Banyak hal yang kubiarkan

Tapi tak untuk lapar

Ya...

Semua lapar jangan dibiar

Lapar makanan, kau akan sakit

Lapar bacaan, kau akan selalu berkelumit

Lapar perasan, maaf aku pamit

Ilustrasi: Ari

# Telur

*Oleh: Beni Satryo*

Kepalaku terbuat dari sebuah kulkas.

Setiap malam berbunyi.

Sekali dibuka cuma ada sebutir telur.

Itupun tak pernah menetas.

# Selepas Azan

*Oleh: Beni Satryo*

Kau tak akan murtad
karena sebuah perjalanan.

Pada jeda istirahat
selepas azan, sandarkan
punggung lelah

di tiang-tiang agama.

Datanglah kepadaku.
Jiwaku penuh debu,
kau bisa bertayamum di situ.

# Siomay

*Oleh: Beni Satryo*

Ketika aku tidur, ada seorang tukang siomay
membuka pancinya di kepalaku. Aroma kentang
memenuhi gerobak malam, roda waktu semakin santai
melaju di atas ranjang yang lapang.

Tidurku semakin terbenam di wangi-wangi tenggiri.
Kembali kurasakan pelukanmu bagai lelehan saus kacang
merembes ke dalam tulang dadaku yang sering ngilu ini
dan keluar sebagai sebuah perasaan kehilangan.

Sebelum tidurku mengharu biru,
tukang siomay itu mangkal di sudut dengkurku.
Saat ia mengetuk kentungan bambu,
mimpiku bertak-tak-tuk-tuk memanggil namamu.

Foto: Dimas

# Relasi Kuasa dalam Obrolan Tongkrongan

***Bagaimana kita dapat membedakan pengetahuan dan kebenaran? Bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu? Apakah ada pengetahuan di luar manusia?***

Ketika berbicara tentang tongkrongan, rasanya sulit untuk terlepas dari obrolan yang pengetahuannya bukan berasal dari pihak pertama. Kebanyakan orang akan memercayai pengetahuan yang didapat tanpa harus mengalaminya secara langsung. Sebab, testimoni dianggap sebagai basis epistemologi yang sahih. Hal ini dapat disebut sebagai Pengetahuan Testimonial.

Berangkat dari fenomena tersebut, Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar menggelar diskusi bertajuk "Epistemologi Testimonial". Diskusi tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi basis epistemologi yang digunakan dalam obrolan tongkrongan yang bersifat testimonial. Diskusi ini dipantik oleh Rangga Kala Mahaswa, Dosen Fakultas Filsafat, dan dimoderatori oleh Steve Laurent Montong, mahasiswa Fakultas Filsafat. Bertempat di Ruang Persatuan, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, diskusi tersebut diadakan secara luring pada Jumat (2/12).

Rangga mengawali diskusi dengan mempertanyakan kembali mengenai seberapa penting manusia memiliki pengetahuan. Apakah pengetahuan dapat memberikan dorongan baru bagi manusia? Bagaimana manusia dapat mengetahui segala sesuatu, mulai dari yang dapat diidentifikasi ataupun tidak?

Rangga menggolongkan Pengetahuan Testimonial termasuk dalam jenis pengetahuan tidak langsung. Sebab, ketika seseorang melakukan testimonial atau penilaian terhadap suatu objek pengetahuan, menurut Rangga, hal tersebut termasuk dalam pengetahuan *a priori,* yakni pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman.

Rangga memberi contoh saat bertemu dengan orang baru lalu membicarakan Warung Yu Par, maka orang baru tersebut akan langsung mengetahui letak warung tersebut. "Kita memiliki kesamaan dalam mengetahui warung Yu Par yang menyudut pada sebuah kantin, hal inilah yang dimaksud sebagai *Justified to Believe*. Artinya, suatu pengetahuan sudah mencukupi syarat untuk dipercaya," terang Rangga.

***Apakah pengetahuan dapat memberikan dorongan baru bagi manusia? Bagaimana manusia dapat mengetahui segala sesuatu, mulai dari yang dapat diidentifikasi ataupun tidak?***

Lebih lanjut, Rangga juga menyebutkan bahwa ada pengetahuan yang berdasarkan keberuntungan (*lucky*). Ketika seseorang pertama kali memanah dan tepat sasaran, ia akan menjustifikasi bahwa dirinya ahli. Hal ini menunjukkan sifat keberuntungan dalam pengetahuan yang berlandaskan pada percobaan yang dilakukan. Berbeda ketika seseorang sudah berpengalaman memanah berkali-kali dan terbukti selalu tepat sasaran. "Hal ini tidak dapat disebut pengetahuan yang berdasarkan keberuntungan melainkan percaya bahwa faktanya memang ahli," jelas Rangga.

Kemudian, menurut Rangga, selayaknya membaca testimoni orang-orang yang tidak terbukukan, pengetahuan testimonial pada akhirnya menjadi suatu fondasi pengetahuan bagi masyarakat. “Misalnya kita mendapatkan suatu testimoni mengenai hal dari orang lain, maka testimoni ini dapat disebut sebagai sebuah pengetahuan,” ujar Rangga.

***“Ketika menyebutkan suatu kata dan itu dapat menjelaskan keseluruhan objek maka kata tersebut memiliki tingkatan yang berhubungan dengan kualitas itu,” jelasnya.***

Menanggapi penjelasan Rangga, Steve kemudian memberikan pandangannya terkait pengetahuan testimonial. Menurutnya, pengetahuan tersebut dianggap dapat diandalkan karena telah disetujui bersama. Sebagai contoh, kata “gurih” untuk menyebut ayam, atau kata “putih” untuk menyebut perempuan. Dua kata tersebut, menurut Steve, dianggap sudah mewakili nilai dari keseluruhan objek yang diberikan testimoni, terlepas dari sifat lain yang tidak disebutkan. “Ada beberapa situasi yang dilambangkan dalam bahasa yang disetujui sebagai sebuah kebenaran,” ucap Steve.

Rangga merespons Steve dengan menambahkan bahwa tingkat kemapanan pengetahuan berhubungan dengan kredibilitas, kejujuran, kompetensi, dan situasi dari transmisi pengetahuan. Kemudian, hal ini akan membentuk pengetahuan melingkar dengan kualitas dari tingkatan tersebut didasarkan oleh testimoni lain. “Ketika menyebutkan suatu kata dan itu dapat menjelaskan keseluruhan objek maka kata tersebut memiliki tingkatan yang berhubungan dengan kualitas itu,” jelasnya.

Menurut Rangga, tantangan dalam pengetahuan testimonial adalah bagaimana dapat mengandalkan memori dari si penyampai pengetahuan. Sebab, kemampuan memori seseorang tidak selalu bekerja dengan baik sehingga, bagi Rangga, pengetahuan yang disampaikan dapat diragukan kebenarannya. Ketidaksesuaian hasil ingatan, bias kesesuaian nalar, dan berbanding terbalik dengan pengetahuan ‘umum’ sangat mungkin terjadi. “Pengetahuan testimonial bukanlah segalanya,” tegas Rangga.

Kemudian, ketika pembahasan ini dihubungkan dengan tongkrongan, menurut Rangga, pengetahuan ini dapat dianggap sebagai dasar utama dari transmisi pengetahuan yang ada. Artinya, “Setiap jenis pengetahuan yang diterima ketika terlibat dalam obrolan tongkrongan hanya berdasar pada testimoni dari tiap orang yang berada di sana.”

***“Tongkrongan adalah contoh dari transmisi epistemologi yang berbasis kuasa,” jelasnya.***

Rangga juga menjelaskan bahwa dalam setiap tongkrongan, ada semacam relasi kuasa yang membentuk eksklusivitas setiap tongkrongan. Oleh karena itu, menurut Rangga, transmisi pengetahuan dalam satu tongkrongan tidak akan sama dengan tongkrongan lain. “Tongkrongan adalah contoh dari transmisi epistemologi yang berbasis kuasa,” jelasnya.

Dengan demikian, Rangga menyimpulkan bahwa cukup sulit untuk mendasarkan pengetahuan manusia hanya pada testimoni. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi berulang karena pengetahuan dapat berubah sepanjang waktu. “Pengetahuan tidak hanya berada dalam situasi formal, tetapi ia juga terdapat dalam obrolan tongkrongan,” pungkas Rangga sebagai penutup diskusi. **[Dian, Francois]**
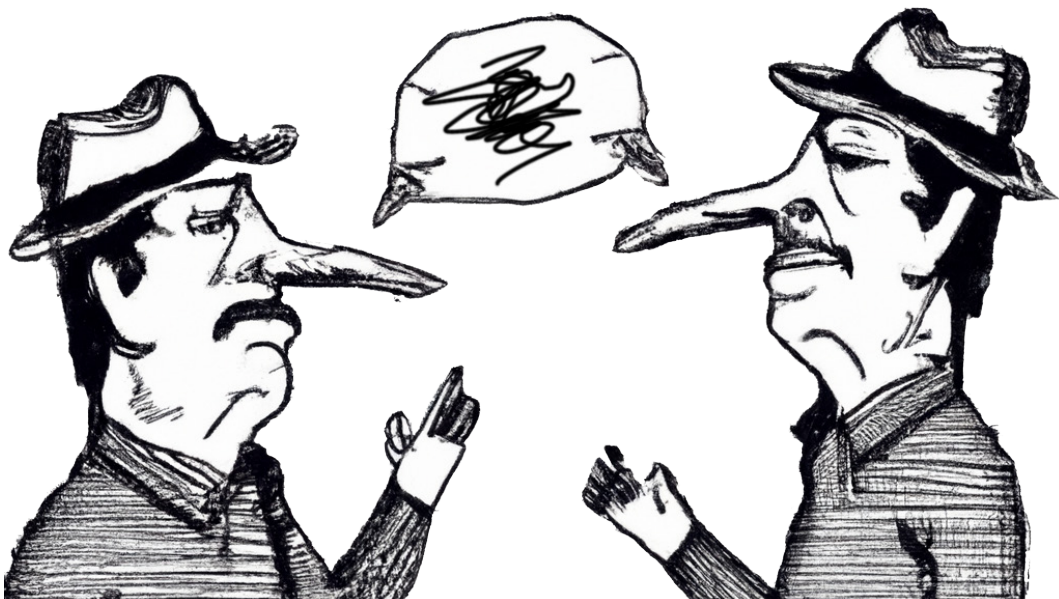
Dok. Istimewa

Foto: Gungun Gunawan - Kontributor

# Tour de Faculty,
## Arena Promosi atau Komedi?

***Ketika mahasiswa sudah muak dengan perebutan kursi. Arena politik elektoral pun disulap menjadi tontonan komedi.***

Spanduk-spanduk kritik dan penolakan terhadap Calon Ketua BEM (Cakabem) mewarnai berlangsungnya Tour de Faculty (TDF) beberapa waktu lalu. TDF ini merupakan rangkaian agenda Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) UGM. Agenda ini dilaksanakan di 18 fakultas dan 1 sekolah vokasi pada 26 Oktober - 22 November 2022. “TDF dilaksanakan guna memperkenalkan Cakabem kepada mahasiswa,” jelas M. Ridho Fitrianto, Ketua KPUM 2022.

***“Mereka hanya memaparkan visi-misi, tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah terkait KM UGM,”***

Upaya memperkenalkan Cakabem kepada mahasiswa melalui TDF ini justru direspons dengan berbagai penolakan, seperti yang terjadi di Fakultas Teknik, Fakultas Filsafat, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol). Penolakan yang digaungkan pun beragam, mulai dari pemasangan spanduk, poster, hingga dialog yang dikemas dengan lelucon. Sebagai contoh, TDF yang berlangsung di Fakultas Teknik direspons dengan spanduk bertuliskan, “*Kandani* abstain*, kok iseh teko*?”

***“Alih-alih hanya memaparkan visi-misi dan grand desain, lebih baik ketiga Cakabem merespons keresahan mahasiswa yang hadir,”***

Menurut Adiahmad Irfan Zidny, Ketua BEM Fakultas Teknik, spanduk ini bermula saat Kongres Istimewa KM UGM. Saat itu, BEM Fakultas Teknik mengajukan pertanyaan terkait posisi BEM Fakultas di KM UGM. Namun, pertanyaan tersebut, menurut Zidny, tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya, pada bulan Maret, BEM FT menyatakan sikap abstain terhadap Pemilwa 2022. “Kita sudah mempublikasikan sikap abstain. Namun, sampai berlangsungnya TDF, sikap tersebut tidak direspons,” jelas Zidny.

Dengan sikap tersebut, Zidny mengungkapkan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas segala kegiatan Pemilwa yang berlangsung di Fakultas Teknik. Lebih lanjut, Zidny mengungkapkan para Cakabem hanya mendukung sikap abstain BEM Fakultas Teknik. Namun, hal tersebut, menurut Zidny, sama sekali tidak menjawab keresahan yang dialami mahasiswa Fakultas Teknik. “Mereka hanya memaparkan visi-misi, tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah terkait KM UGM,” lanjut Zidny.

Berkaca dari kepengurusan BEM sebelumnya, Zidny berpendapat bahwa mereka sering kali melaksanakan program kerja asal-asalan. Maka dari itu, ia beranggapan bahwa Cakabem selanjutnya harus memahami kondisi dan masalah dalam ruang lingkupnya. Akan tetapi, program kerja yang diwacanakan ketiga Cakabem dalam TDF, bagi Zidny tidak kontekstual dengan permasalahan KM UGM saat ini. "Kalau program kerja tidak dikontekstualisasikan dengan kondisi yang ada, ya jadinya percuma," ujar Zidny.

***"Cakabem biasanya retoris dan politis. Jadi, kita tanggapi dengan aksi yang komedi,"***

Tidak berselang lama dari berlangsungnya TDF di Fakultas Teknik, tepatnya pada Jumat (11/2), KPUM menggelar TDF di Fakultas Filsafat. Jalannya TDF di Fakultas Filsafat juga direspons oleh penolakan simbolis dari mahasiswa Fakulta Filsafat**.** Penolakan ini dikemas dengan narasi humor dan spanduk anti-BEM KM. "Cakabem biasanya retoris dan politis. Jadi, kita tanggapi dengan aksi yang komedi," ungkap Surya Iman, mahasiswa Fakultas Filsafat.

Menurut Surya, penolakan tersebut terjadi secara spontan oleh mahasiswa Fakultas Filsafat. Sebab, menurut Surya, sedari awal mahasiswa Fakultas Filsafat tidak punya pandangan mengenai hadirnya lembaga eksekutif mahasiswa. Selain itu, bagi Surya, hadirnya lembaga eksekutif mahasiswa dan TDF ini hanya komika belaka. "BEM ini oportunistik elitenya dan bukan sesuatu yang prestise. Jadi, ya ngapain kita seriusin?" tutup Surya.

Selanjutnya, TDF yang berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, pada Selasa (22/11), juga tidak kalah menarik. Pasalnya, agenda tersebut diambil alih oleh mahasiswa UGM yang hadir. Menurut Renova Zidane Aurelio, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, pengambilalihan tersebut bertujuan menciptakan dialog terbuka antara Cakabem dengan mahasiswa UGM yang hadir. "Alih-alih hanya memaparkan visi-misi dan *grand design*, lebih baik ketiga Cakabem merespons keresahan mahasiswa yang hadir," jelas Reno.

Akibat pengambilalihan tersebut, menurut Reno, terjadi perdebatan antara KPUM dengan beberapa mahasiswa. Sebab, KPUM mengklaim bahwa mereka adalah pemilik acara. Namun, menurut Reno, TDF ini bersinggungan dengan ruang publik, maka siapa pun dapat menyampaikan pandangannya. Akhirnya, TDF tetap dilanjutkan dengan dialog terbuka antara Cakabem dengan mahasiswa yang hadir. "BEM KM mengklaim diri mereka adalah representasi mahasiswa, maka seharusnya TDF ini bukan hanya milik Cakabem atau KPUM saja," lanjut Reno.

***"Menurut pakta tersebut, Cakabem yang terpilih harus membubarkan KM UGM maksimal 100 hari setelah menjabat,"***

Lebih lanjut, menurut Reno. dialog terbuka ini tidak menemukan kesepakatan bersama. Akhirnya, ketiga Cakabem diminta untuk menandatangani pakta integritas berisi pembubaran KM UGM. Namun, dari ketiga Cakabem yang hadir, hanya Cakabem nomor urut 2 dan 3 yang menandatangani pakta tersebut. "Menurut pakta tersebut, Cakabem yang terpilih harus membubarkan KM UGM maksimal 100 hari setelah menjabat," terang Reno **[Alfi, Salma/Roni]**

Ilustrator: Gayuh

Foto: Bayu

# Tong Kosong "Pengembangan Filsafat Nusantara" Bunyinya

Guna menjembatani isu filsafat dengan masa depan kemanusiaan, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar International Conference on Nusantara Philosophy (ICNP). Acara tersebut digelar secara bauran pada 24-25 November 2022. Tema ICNP tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang secara spesifik membahas Filsafat Nusantara.

Dengan mengusung tajuk "The Role of Social Epistemology and Ontology for the Future Humanity", ICNP tahun ini mencoba mengakomodasi permasalahan ontologi dan epistemologi sosial. Menurut Risalatul Hukmi, Ketua ICNP 2022, tajuk tersebut berusaha untuk merekognisi pengetahuan lokal yang selama ini termarjinalisasi. Risal menganggap bahwa peran ontologi dan epistemologi sosial dapat disalurkan kepada khalayak umum. "Ontologi dan epistemologi sosial merupakan perspektif yang paling mampu mengakomodasi isu filsafat internasional dalam mencari alternatif cara berfilsafat yang cukup inklusif saat ini," jelasnya.

Menurut Risal, ICNP memiliki peluang untuk memperkenalkan hubungan filsafat dengan permasalahan kehidupan di Indonesia. Hal ini disebabkan, menurut Risal, hubungan filsafat tidak jauh dari kehidupan manusia. ICNP sendiri merupakan program tahunan yang dimandatkan oleh Fakultas Filsafat kepada Laboratorium Filsafat Nusantara (Lafinus). "Lafinus berperan sebagai penyelenggara acara yang ditunjuk oleh pihak Fakultas untuk menyelenggarakan konferensi tersebut," jelas Risal.

Menurut Septiana Dwiputri Maharani, Kepala Lafinus, Lafinus didirikan untuk mencari ide-ide pemikiran tentang kenusantaraan. Menurutnya, Lafinus juga sebagai wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset terkait pemikiran kenusantaraan. "Prinsipnya adalah ide-ide dan pemikiran tentang kenusantaraan harus kita gali, baik yang fisik maupun nonfisik," ujar Septi.

Selain itu, menurut Septi, Lafinus juga didirikan sebagai fasilitas pendukung guna mengembangkan kajian Filsafat Nusantara di luar pembelajaran mata kuliah wajib. Pengembangan tersebut juga melandasi hadirnya ICNP sebagai program tahunan dari Lafinus. Septi mengungkapan bahwa ia bangga dengan berlangsungnya ICNP tahun ini. "ICNP kali ini merupakan hasil dari ide-ide dosen muda yang luar biasa," ucap Septi.

***"Ontologi dan epistemologi sosial merupakan perspektif yang paling mampu mengakomodasi isu filsafat internasional dalam mencari alternatif cara berfilsafat yang cukup inklusif saat ini,"***

Kendati ICNP berhasil terselenggara, kajian Filsafat Nusantara belum tuntas dengan perdebatan-perdebatan mengenai teori dan metodologi. Hal tersebut diungkapkan oleh Risal. Menurutnya, sampai saat ini Filsafat Nusantara belum mempunyai satu paradigma sendiri tentang metodologi yang cukup kuat dan representatif. "Filsafat Nusantara saat ini masih terjebak justifikasi teori studi antropologi dan etnografi semata," ucap Risal.

***"Filsafat Nusantara saat ini masih terjebak justifikasi teori studi antropologi dan etnografi semata,"***

Oleh karena itu, menurut Risal, perdebatan kritis mengenai metodologi Filsafat Nusantara harus terus dibangun. Sebab, menurutnya, hal tersebut memungkinkan hadirnya terobosan baru guna pengembangan Filsafat Nusantara. "Saat ini kita masih terjebak pada tinjau-meninjau saja tanpa alat analisis yang kredibel serta *reasonable*," ungkap Risal. Akibatnya, Filsafat Nusantara terkesan 'cocoklogi' semata.

Senada dengan Risal, Albertus Arioseto, Pemimpin Redaksi Lingkar Studi Filsafat Cogito, juga mengungkapkan bahwa belum ada metodologi yang jelas dalam kajian Filsafat Nusantara. Hal tersebut merupakan alasan kemandekan kajian Filsafat Nusantara. Ia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari sedikitnya tenaga pengajar yang berusaha untuk melakukan pembaruan kajian. "Tenaga pengajar harus mulai membuka diri dengan gaya berfilsafat yang kosmopolitan, dalam arti berani bersaing di ranah metodologi," jelas Albert.

***"Tongkrongan adalah contoh dari transmisi epistemologi yang berbasis kuasa," jelasnya.***

Lebih lanjut, menurut Albert, tenaga pengajar Fakultas Filsafat UGM harus mulai mencari identitas yang otentik dari Filsafat Nusantara. Albert menganggap bahwa selama ini Filsafat Nusantara hanya mencerap metodologi filsafat asing dan kemudian mencari relevansinya untuk dapat diterapkan di Indonesia. "Coba cari keterbaruan mengenai kajian filsafat di Nusantara, mulai dari segi metafisika, epistemologi, aksiologi, dan sebagainya," tambahnya.

Bagi Albert, permasalahan Filsafat Nusantara hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi filsafat-filsafat lainnya, yaitu berkaitan dengan otentisitas identitas. Pertanyaan terbesar untuk para pengembang kajian Filsafat Nusantara, menurut Albert, adalah, "Apakah Filsafat Nusantara merupakan filsafat yang tumbuh di Indonesia dan buah pemikiran orisinal dari filsuf Indonesia?".

Menurut Albert, filsuf-filsuf yang turut mengembangkan Filsafat Nusantara, seperti Notonagoro, Toeti Heraty, dan Soerjono Soekanto, pun pemikirannya tidak terlepas dari Filsafat Barat. Albert menyebut bahwa sebelum lebih jauh dalam mengembangkan Filsafat Nusantara, pertanyaan terkait otentisitas pemikiran Filsafat Nusantara haruslah terjawab terlebih dahulu. "Jika persoalan-persoalan tadi belum terjawab, maka Filsafat Nusantara belum pantas disebut sebagai filsafat," pungkas Albert.
**[Bintang, Hanifa, Cahya]**
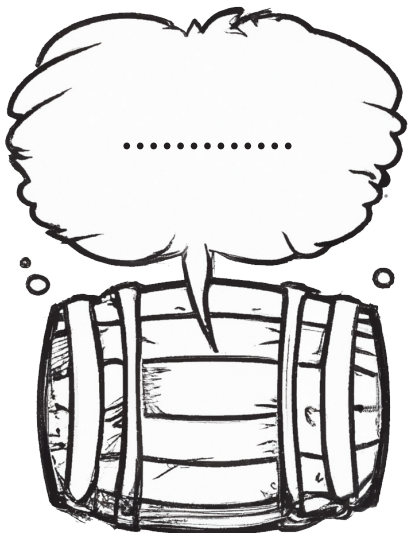
Dok. Istimewa

Ilustrator: Gayuh

# Eka Kurniawan, Menjelajah Belantara Filsafat hingga Mengarungi Luasnya Sastra

***Ketika filsafat menyediakan kayu, manusia yang berusaha membangun perahu. Dengan itulah, manusia memiliki bekal mengarungi lautan sastra yang rentan menenggelamkan.***

"Habis ini bikin apa, ya?" tulis Eka Kurniawan di salah satu unggahan akun Instagramnya. Penulis yang sukses dengan karya-karya sastra fenomenal ini membagikan kebahagiannya ketika mendulang Piala Citra Festival Film Indonesia 2022 kategori Penulis Skenario Adaptasi Terbaik. Penghargaan itu didapatnya dari salah satu bukunya yang diadaptasi menjadi film, *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*.

Eka Kurniawan atau kerap disapa Eka adalah alumnus Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada yang karyanya sudah banyak dikenal di dunia kepenulisan. Sebutlah *Cantik Itu Luka*, *Lelaki Harimau*, dan *O* yang hingga kini masih diterbitkan dan banyak diperbincangkan di berbagai komunitas literasi.

Sebagai penulis kondang, Eka sering kali menghadapi berbagai pertanyaan mengenai inspirasinya dalam menulis. Mengawali perbincangan dengan Eka, ia membagikan pengalamannya tergugah dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari. "Ketika membaca novel ataupun melihat film, sepertinya menyenangkan jika aku menulis suatu cerita," ujar Eka. Melalui permulaan itu, Eka pun menjajaki karirnya sebagai penulis.

**Berawal Filsafat, Bermuara di Sastra**

Sebagai alumnus Fakultas Filsafat, Eka mengungkapkan bahwa dalam menulis, terkadang ia dipengaruhi oleh ilmu-ilmu filsafat yang didapatkan semasa kuliah. Menurut Eka, filsafat memiliki alur pembahasan yang detail dan setiap filsuf juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan tertentu. Keduanya berkolaborasi menstrukturkan masalah hingga resolusi. Seperti halnya filsafat, bagi Eka, hal ini juga berlaku saat ia menulis novel. Ketika menulis novel, dibutuhkan landasan argumen sebagai pijakan menuju kesimpulan. Kendati demikian, terdapat juga pola perbedaan antara buku filsafat dengan novel. "Buku filsafat tidak memerlukan unsur 5W+1H seperti novel," tambah Eka.

Bagi Eka, setiap penulis memiliki caranya sendiri dalam mengeksekusi sebuah cerita. Ketika menulis, ia suka membayangkan dirinya sebagai seorang arsitek yang sedang menyusun suatu bangunan. Menurutnya, ketika menyusun suatu bangunan, yang pertama harus ada pilar-pilar yang menjadi struktur inti. Pilar ini ia bayangkan sebagai sebuah argumen dasar penyusun cerita. "Seperti pilar dalam konstruksi, premis tanpa argumen yang kuat akan menjadi roboh," jelasnya.

***Keduanya berkolaborasi menstrukturkan masalah hingga resolusi.***

Awalnya, Eka menganggap menulis hanya sekadar hobi. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut beralih menjadi sebuah pekerjaan. Dalam perjalanannya, Eka menemukan perbedaan ketika menulis sebagai hobi dan menulis sebagai pekerjaan. Menurutnya, dalam pekerjaan, mau dalam keadaan apa pun, hal tersebut harus dituntaskan. Seakan mengambil terapan cara kerja pegawai negeri, ia pun mempunyai standar minimum. "Walaupun suasana hati sedang tidak mendukung, standar minimum itu setidaknya harus tercapai," ungkapnya.

Sebagai seorang penulis, Eka seakan sudah kenyang dengan persoalan mencari ide. Menurutnya, kendala tersebut sangat mengganggu jalannya pekerjaan. Eka menguraikan bahwa ide dapat ditemukan di mana saja dan dari siapa pun. Namun, kesulitan sesungguhnya terletak pada bagaimana penulis itu dapat memilah dan menyaring ide yang cocok untuk dijadikan tulisan. "Menentukan penting atau tidaknya sesuatu dijadikan cerita, itulah yang sulit," tegasnya.

***"Walaupun suasana hati sedang tidak mendukung, standar minimum itu setidaknya harus tercapai," ungkapnya.***

Lambat laun, seiring dengan dinamikanya dalam menulis, permasalahan tersebut dapat ia tangani. Kini, Eka mendapat popularitas dari karyanya. Popularitas tersebut tidak pernah ia duga sebelumnya. Eka mengaku tidak pernah membayangkan akan sesukses sekarang. Tanggapan khalayak ramai atau pun kritikus yang ia harapkan, kini melebihi ekspektasi. Terlebih ketika salah satu karyanya berjudul *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* diadaptasi menjadi film.

Dalam proyek film tersebut, ia bergabung dalam tim produksi sebagai penulis naskah. Eka mengaku sempat mengalami kesulitan saat proses penulisan. Kendati cerita yang diangkat sama, bagi Eka, "Barang yang sama dibuat dua kali itu cukup berat dan melelahkan." Ia menambahkan, antara film dan novel sangatlah berbeda dalam media penyampaiannya.

Menurut Eka, cerita yang disampaikan melalui media audio visual memiliki keterbatasan dalam pengemasannya. Sebab, cerita yang awalnya memiliki banyak detail harus dipangkas agar sesuai dengan durasi film. Selain itu, Eka menganggap bahwa novel atau film adalah dua medium yang berbeda. Baginya, novel sepatutnya dinikmati sebagai novel saja, tanpa perlu difilmkan. "Difilmkan atau tidak, tidak mengurangi kualitas sebuah karya," tegas Eka.

***"Barang yang sama dibuat dua kali itu cukup berat dan melelahkan."***

Sebelum memutuskan untuk berkarir sebagai seorang penulis, Eka mengaku pernah berangan-angan menjadi seorang komikus. Namun, angan-angan itu harus pupus lantaran berbagai faktor yang menghalangi. Ia merasa dirinya kurang berkompeten dan tidak ada industri yang merealisasikan cita-citanya pada masanya. Kenyataan itu sejenak membuatnya terpuruk.

Namun kemudian, ia menyadari bahwa dirinya berkompeten di dunia kepenulisan. Akhirnya, ia mengesampingkan keinginannya menjadi seorang komikus dan fokus menjadi seorang penulis. "Menulis sudah jadi pekerjaan, *toh* juga menyenangkan dan cukup memenuhi kebutuhan finansial," ujarnya.

***"Bahkan sampai sekarang, aku masih akan reflektif, meskipun dengan cara yang berbeda sekalipun," pungkasnya.***

Pencapaian Eka saat ini membuatnya selalu semangat dalam menulis cerita baru kedepannya. Kendati ia menegaskan bahwa, bagi seorang penulis, karya ditolak oleh penerbit adalah perkara biasa. Terlebih, ketika merintis karya untuk pertama kali. Eka menyampaikan bahwa dalam menghadapi penolakan, refleksi adalah cara terbaik untuk bertahan. "Bahkan sampai sekarang, aku masih akan reflektif, meskipun dengan cara yang berbeda sekalipun," pungkasnya.

**[Angel, Ilham]**

Foto: Dika

# Orang Tua Bergerak,
## Perlawanan Terhadap Peradilan Sesat

***Perlawanan bisa datang dari mana saja dan kepada siapa saja yang tidak berpihak kepada kebenaran. Bahkan, orang tua juga akan mengepalkan tangan untuk melawan pengadilan yang tidak membuktikan anaknya bersalah.***

Malam itu, sekitar pukul dua dini hari, pada 3 April 2022 lalu, tragedi berdarah terjadi di jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta. Jalan Gedongkuning malam itu tidak lagi hanya terasa gelap dan sunyi. Kegelapan di jalan itu telah bercampur dengan warna merah dari tumpahan darah. Kesunyian di malam itu telah diisi oleh rintihan rasa sakit penuh tanya. Kejadian tersebut menjadi rangkaian peristiwa kelam karena telah menewaskan seorang korban yang masih pelajar, Daffa Adzin Albazith. Ia bernasib nahas setelah kepalanya harus merasakan perihnya hantaman senjata dari seseorang yang tidak dikenalnya.

> ***"Sebab, semua orang berpotensi menjadi korban," tegas Eko.***

Peristiwa malam itu dikenal sebagai Klitih Gedongkuning. Berita kejadian langsung melangsir dimana-mana. Enam hari setelah peristiwa tersebut, 9 April 2022, atas desakan Kapolda DIY, polisi menangkap terduga pelaku tragedi Klitih Gedongkuning. Polisi menetapkan lima terduga pelaku atas terjadinya peristiwa tersebut, yaitu Andi, Hanif, Fandhy, Ryan, dan Dhitto.

Penangkapan Andi, Hanif, Fandhy, Ryan, dan Dhitto membuat orang tua dari kelima anak ini bingung dan bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukti apa yang mendukung penangkapan tersebut? Semuanya semakin mencurigakan ketika para orang tua tidak diperbolehkan bertemu dengan anak mereka setelah anak mereka ditetapkan sebagai terduga pelaku klitih.

**Nurani yang Disakiti**

Andayani, Ibu dari Andi mengatakan bahwa anaknya tidak boleh didampingi pada saat proses pemeriksaan di kepolisian. Ia juga menerangkan bahwa anaknya telah disiksa hingga pagi. "Polisi bilangnya kena COVID, padahal alasan sebenarnya kami ga bisa langsung ditemui karena menunggu lukanya biar sembuh dulu," terang Andayani menirukan Andi yang ditemuinya 10 hari setelah penangkapan. Keterangan itu diperkuat dengan adanya sedikit bekas lebam di wajah Andi dan juga bekas luka dari terduga yang lainnya saat ditemui.

Peristiwa yang hampir serupa juga disampaikan oleh Menik, Ibu dari Fandhy. Ia bingung, anaknya tak kunjung berada di rumah hari Minggu itu. Fandhy dibawa oleh polisi tanpa ada pemberitahuan kepadanya terlebih dahulu. "Niatnya saya mau cari dia besok lagi, tetapi Senin siang, anak saya sudah masuk berita dan ditersangkakan atas kasus yang di Gedongkuning," ucap Menik. Ibu dari Fandhy itu langsung merasa badannya tak enak, pikirannya kalut.

Hal ini jelas melanggar kode etik profesi Polri yang seharusnya memberikan surat panggilan sebelum membawa seseorang yang diduga sebagai pelaku. "Ketika seseorang tidak dalam posisi tertangkap tangan, maka ia tidak boleh ditangkap, mereka harus dipanggil," ungkap Taufiqurrahman selaku Kuasa Hukum dari Dhitto.

Rekonstruksi kasus yang dilakukan di Polsek Kotagede, pada 23 Mei lalu, menambah daftar dugaan bahwa kasus ini telah direkayasa. "Waktu rekonstruksi itu tempatnya tertutup, biasanya rekonstruksi itu tempatnya terbuka. Alasan polisi karena ini kasus klitih dan demi keamanan, takut memicu amarah masyarakat," terang Andayani saat menjelaskan proses rekonstruksi.

Andayani juga menjelaskan bahwa rekonstruksi yang diadakan tidak boleh dihadiri oleh wartawan. Kejanggalan dalam rekonstruksi tersebut semakin tampak ketika para terduga pelaku terlihat kebingungan dalam mempraktikkan arahan dari polisi. "Harusnya kalau memang dia pelaku sebenarnya, dia lancar dan dia tahu. *Nah*, dia enggak lancar waktu rekonstruksi, jadi ketahuan banget itu cuma bohongan, abal-abal," tambah Andayani dalam menjelaskan kejanggalan pada proses rekonstruksi.

***Setiap proses hukum yang telah dijalani sama sekali tidak menunjukkan bukti kuat bahwa lima orang terdakwa telah melakukan kejahatan.***

Bahkan, sebenarnya bukti kejanggalan sudah ada sejak awal kasus pemeriksaan. "Kami dibuat *ga* berdaya, dibuat *ga* bisa protes, dan dimanipulasi," tambah Andayani. Terlebih lagi, perlakuan pihak aparat telah bertentangan dengan hak terduga pelaku untuk mendapatkan pendampingan selama masa pemeriksaan. Dengan berbagai kejanggalan tersebut, kelima orang tua dari korban salah tangkap memberikan keselarasan bahwa mereka harus berjuang dan melawan.

**Melawan Peradilan Sesat**

Para orang tua bersama dengan Kuasa Hukum menghadapi persidangan dengan beberapa bukti dan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini. Setiap proses hukum yang telah dijalani sama sekali tidak menunjukkan bukti kuat bahwa lima orang terdakwa telah melakukan kejahatan. "Saksi fakta, saksi dari korban itu semua menjelaskan tidak melihat pelakunya," ucap Roswati, Kuasa Hukum dari Andi. Namun, bukti yang telah dipaparkan selama proses hukum tidak membuahkan hasil karena kelima terduga pelaku tetap dijatuhi vonis hukuman. Ryan dianggap sebagai pelaku utama dan dijatuhi vonis 10 tahun, sedangkan keempat temannya masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

***Komunitas Orang Tua Bergerak sebagai sebuah wadah pergerakan informal juga menggandeng pihak-pihak lain guna menambah bantuan dan dukungan.***

Lantas, pengalaman para orang tua korban asal tangkap saat berhadapan dengan aparat menjadi latar belakang terbentuknya komunitas Orang Tua Bergerak. "Jadi, komunitas ini dibentuk mula-mula untuk strategi advokasi kepada korban peradilan sesat. Kita menganggap peradilan, dari proses penangkapan hingga putusan, itu ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum," ucap Eko Prasetyo, pendiri Social Movement Institute (SMI). Komunitas Orang Tua Bergerak melihat adanya kejanggalan dari pihak aparat dan lembaga peradilan dalam menangani sebuah kasus. Dari hal itu, komunitas ini ada untuk mengatasi kecurangan dan mengungkap kebenaran dalam proses peradilan.

Komunitas Orang Tua Bergerak sebagai sebuah wadah pergerakan informal juga menggandeng pihak-pihak lain guna menambah bantuan dan dukungan. Orang Tua Bergerak berkonsolidasi dengan SMI, Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan beberapa pihak lain untuk membongkar kasus ini. Konsolidasi yang telah dilakukan ditujukan untuk merancang strategi dan merencanakan upaya-upaya yang dapat dilakukan selanjutnya.

Banyak upaya telah dilakukan oleh komunitas Orang Tua Bergerak untuk membantu membebaskan lima anak yang "hilang" tersebut. Mulai dari gerakan yang sifatnya litigasi, seperti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mendorong Ombudsman Republik Indonesia untuk merilis hasil-hasil temuannya, hingga berusaha untuk mengajukan bukti CCTV yang belum terungkap hingga saat ini. "Kami juga sedang mendorong Komnas HAM agar memberikan pandangan. Terkait hal yang lain, kami juga meminta bantuan ke sejumlah pihak agar proses hukum ini bisa dilakukan secara adil terutama di kasasi itu," ucap Eko Prasetyo yang juga terlibat dalam komunitas Orang Tua Bergerak.

***Ketidakadilan proses peradilan yang ditambah dengan adanya kekerasan dalam penangkapan lima orang korban ini menjadi masalah serius.***

Selain itu, upaya advokasi nonlitigasi juga dilakukan. Mulai dari aksi Kamisan, menempel poster-poster, sampai membagikan selebaran ke masyarakat. Aksi tersebut menjadi salah satu taktik untuk mendapatkan dukungan publik dan menyebarkan gerakan tersebut secara luas.

Namun, tekanan juga dihadapi oleh sejumlah orang karena kasus ini semakin meluas dan masif. Eko menjelaskan adanya beberapa tanggapan yang tidak jelas dari berbagai pihak juga menjadi tantangan karena kasus ini tidak memiliki dimensi politik struktural yang kuat. Sebagai contoh, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang merobek serta merusak poster wajah lima anak yang ditangkap. Selain itu, menurut Eko, sejauh ini juga belum ada perhatian yang serius mengenai keberlanjutan korban yang sudah dirugikan. "Bahkan, kami juga bersurat kepada presiden dan DPR, ya artinya sekecil dan sebesar apapun upaya yang memungkinkan kami untuk meraih keadilan, pasti akan kami lakukan," tambah Taufiqurrahman dalam menjelaskan upaya yang telah dilakukan.

Komunitas Orang Tua Bergerak juga menghadapi kendala dengan peradilan yang tidak mengecek alat-alat bukti secara valid. Ketidakadilan proses peradilan yang ditambah dengan adanya kekerasan dalam penangkapan lima orang korban ini menjadi masalah serius. Menurut Eko, kendala dengan sistem hukum ini menghambat progres karena masyarakat tidak dapat mengintervensi lebih jauh sistem hukum tersebut.

Bermula dari mencari keadilan untuk anak-anaknya, bagi Eko, Komunitas Orang Tua Bergerak kini semakin memiliki kesadaran politik yang kuat. Hal tersebut makin diperkuat ketika mereka bertemu dan berdiskusi dengan para aktivis. "Menurutku, hal itu yang membuat mereka bukan lagi sekadar orang tua, kini mereka adalah aktivis," tambah Eko. Namun, komunitas ini melalui perjuangannya juga masih terus berharap anak-anaknya segera terbebas. "Dengan begitu, kebebasan itu tidak akan menyurutkan perjuangan orang tua untuk terus mewujudkan tumbuhnya suatu sistem peradilan yang benar. Sebab, semua orang berpotensi menjadi korban," tegas Eko.

**[Fais, Safira]**
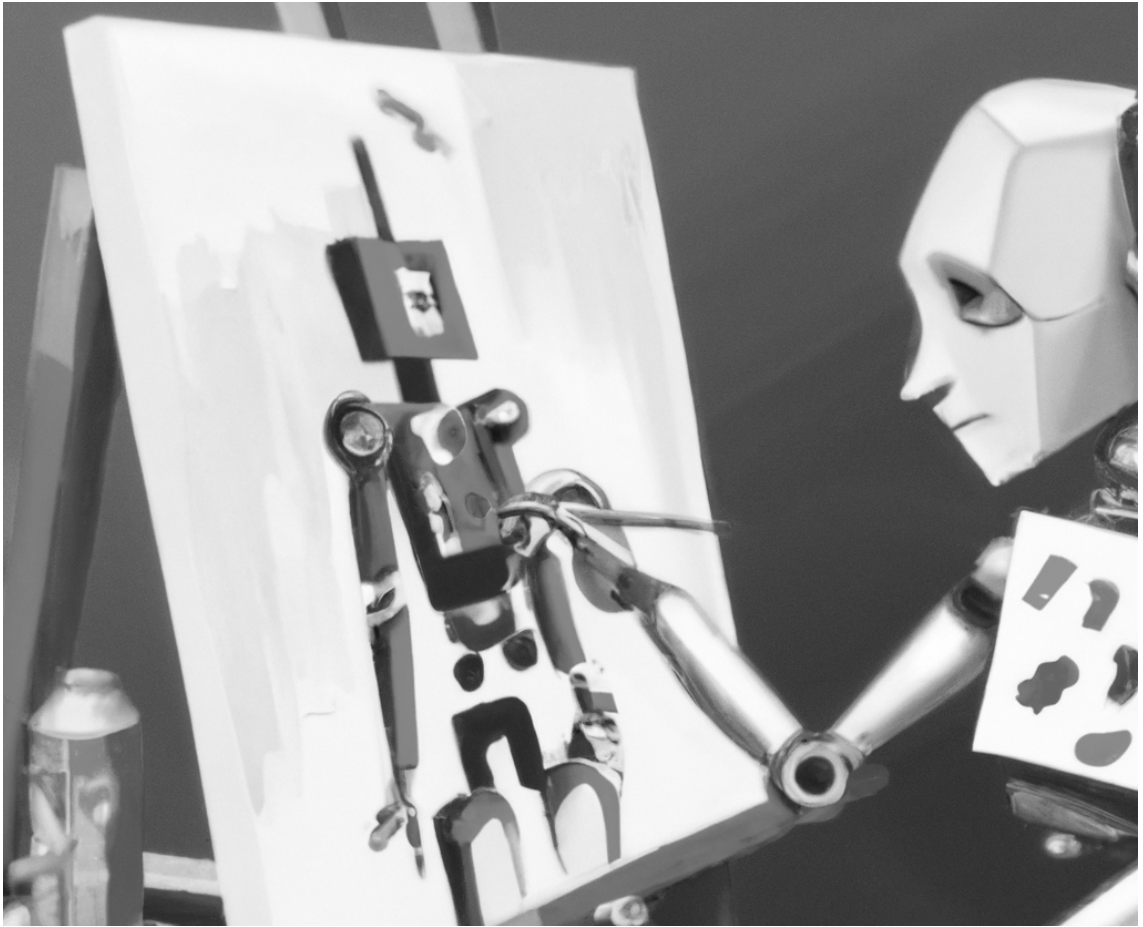
Dok. Istimewa

# Kematian Seniman Esensialis, Ketakutan Terhadap Teknologi

*"Some technologies are embodied, like a pair of glasses: we look through it, not at it."*

*Oleh: Vigo Joshua*

**Pendahuluan**

"Nanti kamu garap ilus *cover*-nya pakai AI saja," ujar seorang jurnalis muda di suatu pers mahasiswa kepada rekannya yang merupakan ilustrator. "*Moh*, di mana esensi seninya? Seni jadi *ndak* penting kalau udah pakai mesin," balasnya. "*Loh*, kamu garap desain juga pake laptop, bedanya apa?" balas si jurnalis muda. Perihal tenggat waktu, esensi karya, dan orisinalitas menjadi perdebatan mereka pada saat itu. Padahal, mereka tak sadar pertanyaan yang lebih penting, kapan manusia tidak berhubungan dengan teknologi? Kapan pula seni tidak bergantung dengan teknologi?

Seni, budaya, dan komunitas manusia yang adiluhur sering disalahpahami oleh masyarakat. Masyarakat mengagungkan kecakapan mereka dalam menciptakan suatu karya. Padahal, tak dapat dipungkiri hasil karya manusia senantiasa terealisasi berkat teknologi. Manusia sering menganggap estetika dalam seni merupakan sesuatu yang tak dapat diganggu gugat. Bak seorang esensialis sejati, kebanyakan pekerja seni, orang yang mengaku mereka seniman, dan ilustrator menolak kemajuan teknologi dalam seni. Kehadiran teknologi yang mereka tolak ini bernama *Artificial Intelligence* (AI). Dalam seni, AI hadir dalam rupa *generator* 'penghasil' karya berbasis *machine learning*. Misalnya, platform DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, dan lain sebagainya. Sebelum mendalami lebih jauh ke dalam polemik AI dan seni, penjelasan tentang AI akan menjadi pintu masuk yang baik bagi para seniman dangkal.

**Relasi Manusia dan AI**

Sistem AI membawa hubungan manusia-teknologi baru yang radikal. Alih-alih hanya "digunakan", AI mengembangkan bentuk "agensi" mereka sendiri; melakukan tugas kognitif dan fisik; dan menciptakan lingkungan teknologi baru. Pembahasan AI tak lekang dari pendalaman esensi teknologi itu sendiri. Relasi yang terbangun antara manusia dan AI muncul pertama kali bersamaan dengan relasi antara manusia dan teknologi.

Jauh sebelum kemunculan AI, para pemikir teknologi telah mendudukkan potensi masalah dari kehadiran teknologi. Karl Jaspers, misalnya, menganggap teknologi mengasingkan dalam arti eksistensial. Manusia menjadi tergantung pada teknologi. Menurut Jaspers, teknologi mengubah lingkungan sosial manusia menjadi “alat" besar; keaslian manusia kurang penting daripada fungsi setiap individu dalam sistem. Bagi Martin Heidegger, teknologi mengasingkan dalam arti hermeneutiknya sehingga memengaruhi pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri (Robson & Tsou, 2023, 42–45).
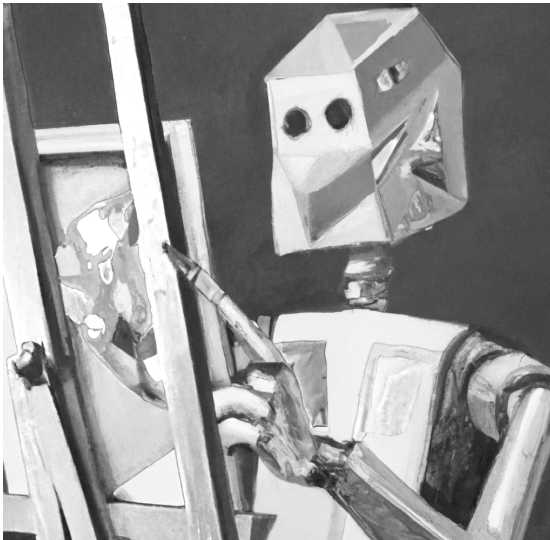
Dok. Istimewa

Filsuf teknologi klasik menggunakan pendekatan "transendental" terhadap teknologi. Mereka mengurangi esensi dari teknologi dengan mereduksi jarak teknologi dengan manusia menjadi jauh. Jaspers mengurangi teknologi ke sistem produksi massal, dan Heidegger ke cara teknologi untuk memahami dunia. Ketika menggunakan teknologi, manusia tidak hanya berinteraksi dengan teknologi itu, tetapi juga memiliki hubungan dengan dunia melalui teknologi itu (Robson & Tsou, 2023).

Teknologi membawa mediasi daripada keterasingan. Pemindai MRI, misalnya, membantu membentuk cara ahli saraf memahami otak dan pikiran. AI membantu dokter untuk memahami gejala pasien. Teknologi adalah media untuk hubungan manusia-dunia, dan mediasi ini membantu membentuk karakter hubungan tersebut, termasuk pemahaman orang tentang dunia (Verbeek 2015).

Don Ihde, seorang filsuf sains dan teknologi asal Amerika Serikat, menerangkan teknologi berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memediasi pengalaman kita. Kita membaca suhu melalui termometer, mengingat peristiwa melalui foto, berbicara satu sama lain melalui telepon, dan mengikuti peristiwa terkini melalui televisi. Dalam semua kasus ini, kita tidak secara langsung berada dalam pengalaman indrawi-tubuh yang hadir di dunia, tetapi melalui artefak teknologi.

Menurut Ihde manusia memiliki tiga jenis relasi dengan teknologi. Pertama, relasi perwujudan, relasi ini muncul ketika persepsi manusia dimediasi oleh artefak teknologi. Kedua, relasi alteritas, relasi ini muncul bukan melalui artefak ke dunia, melainkan melalui artefak itu sendiri. Ketiga, relasi latar belakang, artefak teknologi membentuk hubungan kita dengan realitas, tetapi dengan tetap berada di latar belakang, misalnya termostat yang secara otomatis menghidupkan dan mematikan panas tanpa campur tangan atau bahkan kesadaran manusia. Ketiga relasi tersebut memiliki karakteristiknya sendiri yang signifikan dalam pembahasan mengenai relasi manusia, seni, dan AI (Achterhuis, 2001, 119).

Dok. Istimewa

Karakteristik terpenting relasi perwujudan adalah bahwa teknologi memiliki transparansi tertentu. Teknologi tidak memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi mereka hanya melihat aspek dunia yang diberikan melalui mereka. Selanjutnya, dalam relasi alteritas, peran manusia tidak berkaitan dengan menengahi hubungan teknologi ke dunia, tetapi, sebaliknya, mereka terkait dengan teknologi. Peran yang dimainkan oleh teknologi dalam rangkaian hubungan ini dapat dicirikan sebagai "*quasi-other*". Terakhir, relasi manusia teknologi dalam relasi latar belakang tidak memainkan peran sentral dalam pengalaman manusia. Dalam hubungan latar belakang, manusia tidak terkait secara eksplisit dengan teknologi atau melalui teknologi dengan dunia, tetapi, sebaliknya, teknologi membentuk konteks pengalaman kita dengan cara yang tidak kita alami secara sadar (Achterhuis, 2001, 122).

Perwujudan relasi manusia dengan teknologi menunjukkan bahwa hubungan keduanya hampir mustahil terpisahkan. Kekhawatiran-individual-tak-beralasan terhadap kemunculan teknologi harusnya bisa dipisahkan dengan permasalahan yang lebih besar, yakni moral kolektif dalam memandang teknologi. Peran manusia tak berhenti hanya dengan mengeluhkan kehadiran mesin baru yang berpotensi menggantikan kerja manusia, tetapi juga menyadari bahwa adanya teknologi adalah suatu hal niscaya. Perlu ada upaya menilik problem ini ke level makro dan menyelisik mediasi moral dalam teknologi itu sendiri.

**Seni, Teknologi, dan Mediasi Moral**

Jarak antara teknologi dan manusia tampak begitu jauh. Manusia merasa superior atas teknologi. Anehnya saat teknologi yang digunakan manusia mulai mendominasi, manusia langsung mengadili teknologi bak penjahat. Anggapan buruk muncul karena ketakutan tak berdasar para seniman kontemporer. Sebut saja kasus seniman AI, Jason Allen. Allen memenangkan The Colorado State Fair and Rodeo Fine Arts Exhibition melalui karyanya Théâtre D’opéra Spatial. Kritik tajam dari seniman lainnya menimpali Allen karena menganggap kemenangannya adalah penanda kematian seni itu sendiri. Melalui hal ini, dapat dilihat bahwa banyak seniman yang menganggap bahwa seni adalah suatu hal yang jauh atas sana. Dan yang lebih miris lagi, hanya manusia yang bisa menggapainya.

Bila melihat perdebatan mengenai seni, tidak ada suatu limitasi konkret tentang seni sebenarnya. Plato menegaskan bahwa sebagian besar masalah dengan seni modern berasal dari salah membaca konsep "seni". Pada masanya, "*techne*" [τέχνη] merujuk pada semua bentuk produksi sensual manusia, termasuk kerajinan, ilmu sosial, bahkan tenaga kerja terampil. Pembahasan mengenai seni sendiri tak dapat terlepas dengan penilaian estetika itu sendiri. Immanuel Kant mengeklaim penilaian estetika menyangkut saat-saat ketika rasionalitas manusia kita diatur ke dalam keadaan "permainan bebas", yang menghasilkan klaim, "ini indah" (Boersema, 2019).

Lebih jauh lagi, ada beberapa pemikir yang mengaplikasikan seni sebagai ranah praktik-institusional, seperti Arthur Danto dan George Dickie. Bagi Danto, "Dunia Seni" menggambarkan sistem institusi, wacana, kritik, penerbit, dan seniman yang tertutup dan mereproduksi sendiri; semuanya ditanamkan dalam definisi seni yang disepakati. Fungsi utama "dunia seni" bukanlah produksi karya seni tertentu, melainkan reproduksi dan penyebaran gagasan seni yang dominan melalui lembaga budaya dan pendidikan, seperti sekolah, universitas, museum, atau galeri. Bagi Dickie, seni hanyalah artefak atau aktivitas apa pun yang telah ditetapkan oleh perwakilan dunia seni sebagai seni. Ini tidak berarti bahwa praktik artistik tidak dapat terjadi di luar "dunia seni", seperti aktivitas pelukis penghobi, atau seniman mahasiswa, hanya saja aktivitas ini tidak akan diakui sebagai seni tanpa pengakuan kelembagaan resminya (Boersema, 2019).

Melihat keberagaman pemahaman mengenai seni itu sendiri, lantas apa permasalahan dari seni yang diproduksi oleh AI? Hal yang paling mungkin diperdebatkan adalah mediasi moral oleh AI sebagai teknologi itu sendiri. Apakah seni produksi AI dapat tergolong dalam seni *ala* Plato, Kant, atau bahkan terinstitusionalisasi *ala* Danto dan Dickie? Nyatanya, manusia selalu bisa menggolongkan seni produksi AI sebagai *otherness* yang esensial. Alih-alih melihat AI sebagai mesin yang mengalienasi, AI justru mengokohkan kebutuhan sosial seni yang lebih mendesak (Boersema, 2019).

AI tidak hanya memediasi moralitas pada tingkat mikro hubungan manusia-teknologi individu, tetapi juga pada tingkat makro kerangka kerja dan nilai moral. Studi terbaru telah memperluas cakupan kerangka ini melalui kajian pascafenomenologis. Selain berfokus pada mediasi teknologi, studi pascafenomenologis juga memasukkan "apropriasi" teknologi oleh manusia. Kajian pascafenomenologi mengisyaratkan pemahaman bahwa manusia juga memiliki peran aktif dalam terjadinya hubungan manusia-teknologi. Mediasi teknologi dari tindakan dan interpretasi moral bukan hanya hasil dari karakteristik teknologi, melainkan cara manusia "mengaturnya" sebagai bagian dari hubungan mereka dengan dunia. Misalnya, peran mediasi moral dari sonografi, sebuah alat pendeteksi janin, tidak hanya dihasilkan dari kapasitas teknologi untuk membuat janin terlihat, tetapi juga dari penggunaan kapasitas ini oleh manusia sebagai kemungkinan untuk menyelidiki kondisi medis janin, dan dasar potensial untuk membuat keputusan untuk bertindak (Robson & Tsou, 2023).

Teknologi memediasi tindakan dan keputusan moral, membantu membentuk kerangka moral, dan memengaruhi konsep yang dapat kita gunakan untuk melakukan etika. Signifikansi moral ini tidak boleh dilihat sebagai properti intrinsik dari teknologi itu sendiri. Pascafenomenologi tidak mengeklaim bahwa teknologi adalah "agen moral" seperti halnya manusia. Sebaliknya, kajian pascafenomenologi mengeklaim bahwa agen moral tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang "murni manusia", tetapi secara intrinsik dimediasi oleh teknologi (Friedman & Hendry, 2019).

Semestinya seniman tidak mesti khawatir dengan kematian seni. Seni tidak akan mati, selama penilai seni masih berdiri tegak di sana. Kekhawatiran mereka terhadap dominasi AI dalam seni juga seharusnya didalami melalui pendekatan mutakhir. Pendekatan ini disebut *guidance ethics approach* yang mendalami kemungkinan problem AI secara sistematis:

Melalui pendekatan ini, siapa pun yang bermasalah dengan aplikasi AI yang memproduksi seni dapat terlebih dahulu melihat masalah sebenarnya. Pertanyaan tentang apakah AI telah melanggar permasalahan etis dapat terlepas dari asumsi hegemoni seniman esensialis. Ketakutan tak mendasar harusnya bisa dibuktikan secara esensial pula. Jika AI justru membuka peluang bagi penyelesaian masalah kontemporer, mengapa harus menakutkan asumsi populer soal dominasi AI? Bukankah seniman memperjuangkan seni itu sendiri, bukan kepentingan personalnya? Kalau landasan yang dipakai hanya ketakutan semata, biarlah seni itu roboh dan dikuasai AI. Seniman tak lebih hanya antek antroposen yang tergerus dominasi mereka sendiri.

**Daftar Pustaka**

Achterhuis, H. (Ed.). (2001). *American Philosophy of Technology: The Empirical Turn* (R. P. Crease, Trans.). Indiana University Press.

Beyond Interaction: A Short Introduction to Mediation Theory. (2015). *Interaction*, *22*(3). https://doi.org/10.1145/2751314

Boersema, D. (2019). *Philosophy of Art: Aesthetic Theory and Practice*. Taylor & Francis Group.

Friedman, B., & Hendry, D. G. (2019). *Value Sensitive Design: Shaping Technology with Moral Imagination*. MIT Press.

Robson, G. J., & Tsou, J. Y. (2023). *Technology Ethics: A Philosophical Introduction and Readings*. Taylor & Francis Limited.

Verbeek, P.-P., & Tijink, D. (2022). *Guidance Ethics Approach*. ECP. https://ecp.nl/publicatie/guidance-ethics-approach/

Ilustrasi: Ari
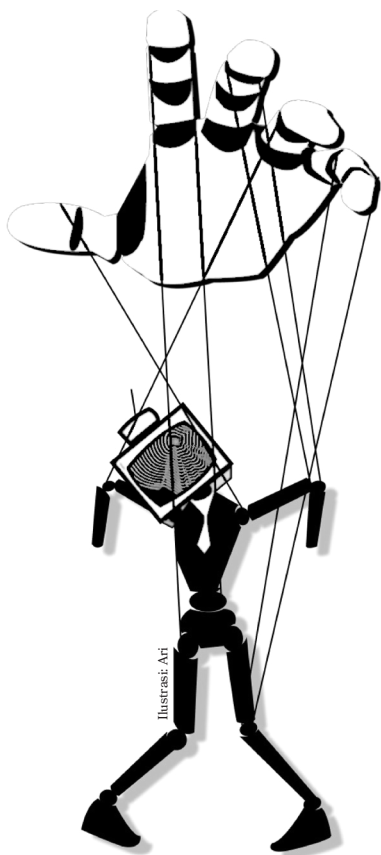
# Tangan Besi Rezim Representasi

*Rezim selalu membutuhkan representasi. Namun, apa jadinya jika representasi yang justru menjelma menjadi rezim?*

*Oleh Bangkit Adhi Wiguna, Pelajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM*

Pendingin udara di Ruang Rapat Komisi III DPR RI tampak bekerja dengan normal. Di dalamnya, tak ada orang yang tampak meneteskan peluh. Meskipun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa suasana ruangan itu tengah panas. DPR RI, pada waktu itu, tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, tiba-tiba naik pitam di tengah-tengah rapat. "Sudah, sudah. Stop! Stop! Anda pelajari dulu mekanisme yang ada di DPR. Anda ini seolah-olah menuntut kami. Anda nggak punya hak!" cecar Bambang.

Cecaran tersebut Bambang tujukan kepada Antoni Putra, salah satu anggota Aliansi Reformasi KUHP yang berasal dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Sebelum mendapat cecaran, Antoni mempertanyakan transparansi kerja DPR RI dalam mengakomodasi usulan revisi Aliansi Reformasi KUHP dalam perumusan RKUHP baru yang akan segera disahkan. "Kami tidak menekan supaya setiap masukan diakomodasi, tetapi kami menginginkan penjelasan, apabila ada usulan yang tidak diakomodasi, apa alasannya?" ujar Antoni.

Alih-alih mendapat penjelasan, Antoni justru menerima cecaran yang mempertanyakan haknya untuk melontarkan pertanyaan. Tidak cukup mempertanyakan hak Antoni saja, Bambang juga menuding Antoni sebagai warga negara yang tak berpartisipasi dalam pemilu sehingga, menurutnya, Antoni tidak berhak menuntut apa pun dari DPR RI. "Jangan-jangan Anda pun ketika pemilu nggak nyoblos, kemudian Anda menuntut. Ngaco aja kamu. Nggak boleh! Ini sudah kebaikan DPR mendengarkan dikau," tegas Bambang (detik.com, 2022).

Bambang bukan satu-satunya wakil rakyat yang malah mempertanyakan hak rakyat. Pada 2019, saat tekanan rakyat begitu tinggi terhadap DPR RI karena revisi UU KPK menuai kontroversi, seorang anggota DPR RI juga meledak di depan publik. Ia adalah Arteria Dahlan dari Komisi III DPR RI, komisi yang sama dengan Bambang. "Jangan bicara rakyat, kamu ikut pemilu dulu. Ikut pemilu dulu. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Indonesia! Jangan bicara wakil rakyat kamu!" cecar Arteria kepada Feri Amsari yang menjabat Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas saat diundang di acara "Mata Najwa".

Melalui pernyataannya, Bambang mencoba untuk memperjelas hak dan kewajibannya sebagai representasi rakyat dengan cara yang lebih menguntungkannya. Ada eksklusi dan inklusi beberapa hak serta kewajiban anggota DPR RI dalam pernyataan Bambang. Sementara itu, Arteria mencoba untuk berbicara secara lebih spesifik. Menurutnya, apabila seseorang bukan merupakan representasi rakyat yang resmi di DPR RI, ia tak berhak berkata apa pun tentang kondisi rakyat. Rangkaian pernyataan tentang "representasi" itu digunakan untuk mendelegitimasi wacana-wacana kontrahegemoni negara.

Beberapa aktivis gerakan rakyat mencoba untuk merespons dengan menegaskan ulang makna "representasi" yang demokratis. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, menyanggah pernyataan Bambang dengan menegaskan bahwa RDPU bukanlah kebaikan DPR RI. YLBHI menyatakan bahwa RDPU merupakan kewajiban DPR RI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

YLBHI juga menegaskan bahwa DPR RI tidak seharusnya membeda-bedakan hak warga negara dalam hal penyampaian pendapat, apalagi membeda-bedakan berdasarkan partisipasinya dalam pemilihan umum. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdiri berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, negara dan aparaturnya tidak boleh menempatkan warga negara dalam posisi subordinat atas dasar apa pun.

**Dua Genealogi Representasi**

Ungkapan Bambang dan Arteria mungkin membuat kita berang. Mereka terkesan memelintir pemahaman kita mengenai "representasi" demi menguntungkan posisi mereka sendiri. Di sisi lain, kita mungkin lebih memahami dan menaruh keberpihakan kepada wacana tandingan dari gerakan rakyat yang berupaya untuk menegaskan ulang makna "representasi" yang lebih demokratis. Meskipun demikian, dua pandangan yang berbeda tersebut ternyata memiliki basis argumen historis yang sama kuatnya.

Philip Resnick (1973), melalui penelusurannya terhadap literatur-literatur klasik mengenai demokrasi

konstitusional, menemukan bahwa ide mengenai "representasi" pada awal-awal perkembangan demokrasi konstitusional terbagi menjadi dua corak: borjuis dan sosialis. Para penganut teori representasi borjuis menganggap bahwa parlemen adalah keniscayaan. Sementara itu, teori representasi sosialis menganggap bahwa parlemen hanyalah salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat atas kehidupan bernegara.

Doktrin mendasar teori representasi borjuis adalah bahwa representasi merupakan upaya untuk menghadirkan suatu entitas besar secara keseluruhan dengan mereduksi sebagian besar bagiannya. Entitas yang sudah direduksi tersebut kemudian dianggap mewakili seluruh entitas keseluruhan. Dengan kata lain, representasi sebenarnya adalah proses eksklusi dan inklusi.

Salah satu bentuk awal teori representasi borjuis dapat ditemukan dalam teks-teks klasik Thomas Hobbes soal representasi. Hobbes (1981, hal. 90) mengatakan bahwa "seseorang, atau sekumpulan orang, harus diberikan hak oleh mayoritas orang untuk mewakili semua orang". Ide Hobbes tersebut merupakan bibit pemikiran mengenai representasi dalam demokrasi konstitusional modern. Menurut Macpherson (1962), argumen Hobbes merupakan argumen kelas borjuis yang berupaya untuk merebut kuasa atas seluruh sumber daya masyarakat. Sebab, "mayoritas" yang dimaksud oleh Hobbes merujuk pada sekumpulan kaum borjuis yang tengah bangkit tatkala Hobbes menelurkan pemikirannya tersebut.

Ide representasi yang bercorak borjuis semakin kental dalam pemikiran John Locke, yang dalam periodisasi pemikiran politik barat sering ditempatkan sebagai pemikir setelah Hobbes. Locke (1824, hal. 222) secara eksplisit menyatakan bahwa "kekuatan hukum yang dimiliki oleh penguasa, sebagai representasi rakyat, diberikan oleh rakyat dalam rangka melindungi properti yang menjadi hak milik mereka". Penguasa dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai representasi rakyat apabila mereka "menyerang properti yang menjadi hak milik rakyat" (Locke, 1824, hal. 168).

Pemikiran Locke tentang representasi secara eksplisit menegaskan bahwa tugas penguasa adalah melindungi kepemilikan pribadi warga negara atas suatu properti. Menurut Resnick (1973), dengan pemikiran semacam itu, Locke secara terang-terangan mengeksklusi kelas pekerja yang tidak memiliki hak milik atas properti dari sistem politik. Pemikiran Locke tersebut, pada gilirannya, menjadi pelopor berdirinya parlemen Inggris yang bercorak borjuis dan condong terhadap kepentingan kaum borjuis pasca-Revolusi Agung 1688.

Model parlemen Inggris kemudian banyak diadopsi di seantero Eropa seiring dengan kebangkitan kaum borjuis di benua tersebut. Montesquieu (2001, hal. 172), pemikir politik klasik dari Prancis, menyatakan bahwa representasi diperlukan karena tidak semua rakyat memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola sistem politik. Rakyat yang tidak memiliki kapasitas tersebut harus dieksklusi dari sistem politik dan dibebani kewajiban, yang sering kali dipelintir menjadi hak, untuk memilih seorang atau sekelompok ahli untuk mengelola sistem politik tempatnya bernaung (Montesquieu, 2001, hal. 173). Pemikiran Montesquieu yang mengadopsi Hobbes dan Locke serta model parlemen Inggris tersebut kemudian menginspirasi parlemen Prancis (Resnick, 1973).

Model parlemen sejenis itu kemudian ditiru dan digugu di seantero dunia. Bukan hanya model representasinya, melainkan juga sifat eksklusif yang terkandung padanya. Teori representasi sosialis pun muncul untuk mengkritiknya. John Stuart Mill menjadi salah satu pemikir pertama yang mengajukan teori representasi bercorak sosialis. Ia sadar betul bahwa parlemen pada awal pembentukannya merupakan institusi kelas borjuis (Mill, 1951, hal. 209). Dengan kesadaran itu, ia pun mengonstruksi sebuah sistem representasi yang mampu mengakomodasi banyak kepentingan kelas sekaligus, terutama kelas pekerja. Salah satu caranya adalah mengedukasi kelas pekerja mengenai tata kelola sistem politik di bawah pendidikan politik kaum borjuis (Mill, 1951, hal. 235). Kelas pekerja yang terdidik ini nantinya akan menjadi representasi kepentingan kelas pekerja di parlemen (Mill, 1951, hal. 285).

Pemikiran Mill tersebut menuai kritik. Pada praktiknya, melibatkan kelas pekerja dalam parlemen berarti menarik kelas pekerja untuk tunduk terhadap sistem yang dibangun oleh kelas borjuis, lalu membuatnya berada dalam posisi yang subordinat (Resnick, 1973). Di sisi lain, pemerintahan eksekutif masih dikuasai kelas borjuis sehingga penambahan representasi kelas pekerja di parlemen percuma. Kondisi semacam itu membuat visi emansipatoris Mill menjadi dimentahkan begitu saja.

**Jalan Ekstraparlementer**

Para ilmuwan politik sadar betul bahwa demokrasi konstitusional menjadi semakin prosedural alih-alih substansial. Oleh karena itu, pasca-Perang Dunia II, banyak ilmuwan politik yang memandang bahwa solusi moderat atas model representasi demokrasi konstitusional *ala* Mill bukan menjadi pilihan lagi. Berkompromi dengan parlemen bukan solusi lagi. Ide-ide representasi sosialis pun mengalihkan haluannya dari yang mendukung parlemen menjadi ekstraparlementer.

William Kornhauser (1959, hal. 227), misalnya, menyatakan bahwa "politik massa muncul apabila sejumlah besar orang terlibat dalam aktivitas politik di luar prosedur dan peraturan yang dibikin pemerintah sebagai representasi rakyat. Politik massa dalam masyarakat demokratis modern, dengan demikian, justru antidemokrasi". Ada juga ilmuwan politik yang melontarkan respons yang lebih moderat, seperti Giovanni Sartori. Ia menyatakan bahwa "para pemilih dalam pemilihan umum sebenarnya tidak melakukan tindakan politik apa-apa, mereka hanya sekadar memberikan respons" (Sartori, 1973, hal. 77). Di satu sisi, Sartori mengamini kelemahan demokrasi konstitusional yang semakin prosedural. Di sisi lain, ia menyatakan "secara partikular, itu (masalah demokrasi konstitusional) bukan salah siapapun, kita harus berhenti mencari kambing hitam" (Sartori, 1973, hal. 88).

Ide-ide ekstraparlementer menjelma menjadi tindakan. Gerakan rakyat di Prancis pada Mei 1968 dan di Jerman pada 1967, yang didominasi oleh akademisi, adalah dua contoh gerakan yang secara eksplisit menentang dominasi parlemen. Ada empat tesis utama yang dibawa dua gerakan tersebut dalam menentang dominasi parlemen (Resnick, 1973). *Pertama*, parlemen merupakan instrumen kelas borjuis yang digunakan untuk memaksa kelas pekerja menerima opresi terhadap mereka secara legal. *Kedua*, parlemen dipandang sebagai dekadensi peradaban karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah konkret dan hanya melakukan teknikalisasi masalah. *Ketiga*, demokrasi konstitusional modern sudah terlalu sering berkompromi dengan kapitalisme dan neoliberalisme karena keduanya sama-sama "menunggangi kuda" kebebasan. *Keempat*, adanya pengasingan kekuatan politik beberapa bagian rakyat, terutama rakyat tertindas, oleh parlemen yang seharusnya menjadi representasi mereka.

Empat tesis tersebut digali dari pemikir sosialisme utopis dan saintifik klasik, seperti Proudhon (1989), Blanqui (1957), Marx (1867), dan lain sebagainya. Keruntuhan Uni Soviet yang menjadi cagar alam ide-ide tersebut membuat gerakan ekstraparlementer yang terstruktur menjadi terpecah (Hardt & Negri, 2001). Ide post-Marxisme yang lebih menghendaki gerakan ekstraparlementer tanpa terstruktur kemudian datang menggantikan. Yang pertama masih membuka pintu terhadap kekuatan parlementer, sementara yang kedua cenderung menolak sepenuhnya.

**Menggugat Rezim Representasi**

Perbedaan pandangan tentang representasi dalam gerakan ekstraparlementer, akibat dikotomi gerakan rakyat Marxisme dan post-Marxisme, memperkeruh perdebatan tentang representasi itu sendiri. Ide representasi borjuis yang eksklusif tanpa disadari telah mengilhami model parlemen modern, yang dominan di dunia saat ini. Sementara itu, gerakan ekstraparlementer yang seharusnya menjadi kekuatan politik kontra terhadap sifat eksklusif parlemen borjuis malah terpecah ke dalam ide yang berbeda. Perebutan kontrol terhadap rezim representasi pun dimulai. Representasi macam apa yang akan kita pakai?

Gerakan ekstraparlementer bercorak post-Marxisme kini tampak dominan. Gerakan tanpa struktur dan melompat dari satu aksi ke aksi lain tanpa tujuan jangka panjang semakin banyak bermunculan (Wicaksono, 2022). Dengan dalih yang cenderung moralis, gerakan ini menolak segala afiliasi politik dengan entitas politik lainnya, terutama parlemen (Holloway, 2003). Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelas borjuis yang bercokol di parlemen untuk menegaskan ide representasi yang eksklusif. Hal itulah yang tercermin dalam pernyataan Bambang dan Arteria kala menjamu para aktivis gerakan rakyat. Mereka menegaskan bahwa merekalah orang yang mempunyai hak untuk bersuara, bukan yang lain. Lantas, sejauh mana kekuatan ekstraparlementer berusaha untuk mematahkan tangan besi rezim representasi borjuis tersebut?

Selama gerakan moral yang menolak "aktivitas politis" masih dominan, representasi borjuis akan tetap dominan. Sejauh ini, baru beberapa sektor gerakan rakyat yang mulai mengambil tindakan politik. Salah satu yang dominan adalah gerakan buruh. Di Indonesia pasca-Reformasi 1998, gerakan buruh beberapa kali berhasil menggagalkan kebijakan antikesejahteraan kelas pekerja melalui aksi protes jalanan yang terorganisasi (Juliawan, 2011). Sebagai gerakan ekstraparlementer yang mengandalkan aksi protes jalanan, gerakan buruh terbukti menjadi kekuatan politik yang signifikan.

Namun, tatkala negara mengerahkan aparatur represifnya untuk menekan mereka, gerakan buruh tak mampu berbuat banyak di jalanan. Oleh karena itu, beberapa pengamat gerakan buruh pun mengatakan bahwa gerakan buruh mau tak mau harus membentuk partai politik untuk merebut kontrol atas aparatur negara, satu-satunya hal yang bisa memukul mundur mereka selama ini (Habibi, 2013). Hal ini disadari oleh beberapa serikat buruh yang pada 2019 hingga 2020 melakukan berjilid-jilid protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Protes yang berujung kegagalan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai representasi rakyat, termasuk rakyat pekerja, di DPR RI secara sadar mengeksklusi kepentingan sebagian besar rakyat dalam pengesahan Undang-Undang Cipta kerja. Oleh karena itu, gerakan buruh tak boleh berhenti di protes jalanan saja, tetapi harus merebut dan menegaskan makna representasi yang propekerja melalui jalur elektoral sembari tetap melakukan mobilisasi massa. Partai Buruh pun dihidupkan kembali pada Oktober 2021 dan diproyeksikan untuk bersaing pada Pemilu 2024 sebagai respons terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (voi.id, 2021).

Tautan antara gerakan buruh dengan partai politik merupakan hal yang umum di negara-negara Skandinavia. Axel Danielsson; pemimpin sosialis di Kota Malmo, Swedia; menyatakan bahwa "serikat buruh dan partai buruh bagaikan kembar siam, keduanya tak dapat dipisahkan" (Blake, 1960). Serikat buruh Swedia sadar bahwa mobilisasi massa untuk aksi protes bisa berakhir sia-sia apabila representasi mereka di parlemen tidak memiliki kepentingan yang sama. Di sisi lain, partai buruh juga sadar bahwa kekuatan politik mereka sangat kecil tanpa bantuan mobilisasi buruh dari serikat buruh.

Meskipun demikian, gerakan buruh hanyalah satu sektor gerakan di tengah gerakan ekstraparlementer yang semakin terpolarisasi. Sektor gerakan ekstraparlementer lainnya masih sibuk meromantisasi gerakan tanpa struktur dan meledak-ledak mengikuti dinamika isu. Gerakan mahasiswa, misalnya, malah sibuk mereproduksi representasi borjuis di kampus-kampus alih-alih merebut dan menegaskan representasi yang lebih berpihak kepada rakyat. Dengan kondisi semacam itu, representasi macam apa yang sebenarnya ingin kita perjuangkan?

**Referensi**


Blake, D. (1960). Swedish Trade Unions and the Social Democratic Party: The Formative Years. *Scandinavian Economic History Review*, *8*(1), 19-44. https://doi.org/10.1080/03585522.1960.10411421

detik.com. (2022, November 18). *Viral Debat Bambang Pacul vs Aktivis di Rapat DPR Jadi Sorotan YLBHI Baca artikel detiknews, "Viral Debat Bambang Pacul vs Aktivis di Rapat DPR Jadi Sorotan YLBHI" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6413221/viral-debat-bambang-pacul-vs-aktivis-d*. detik.com. Retrieved Januari 20, 2022, from https://news.detik.com/berita/d-6413221/viral-debat-bambang-pacul-vs-aktivis-di-rapat-dpr-jadi-sorotan-ylbhi

Habibi, M. (2013). Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *16*(3), 200-216. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10903/8144

Hardt, M., & Negri, A. (2001). *Empire*. Harvard University Press.

Hobbes, T. (1981). *Leviathan*. Penguin Classics.

Holloway, J. (2003). *Changing the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*. Pluto Press. https://platypus1917.org/wp-content/uploads/readings/Holloway_Change_the_World.pdf

Juliawan, B. H. (2011). Street-level Politics: Labour Protests in Post-authoritarian Indonesi. *Journal of Contemporary Asia*, *41*(3), 349-370. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2011.582706

Kornhauser, W. (1959). *The Politics of Mass Society*. Free Press.

Locke, J. (1824). *Two Treatises of Government*. C. and J. Rivington. https://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-kley/verfg/grossbritannien/de/pdf/Two_treatises_of_government_orig.pdf

Macpherson, C. B. (1962). *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*. Clarendon Press.

Marx, K. (1867). *Das Kapital: A Critique of Political Economy*. Simon and Schuster.

Mill, J. S. (1951). *Utilitarianism, Liberty, and Representative Government*. Everyman's Library. https://ia903401.us.archive.org/11/items/utilitarianismli0000mill_t8w5/utilitarianismli0000mill_t8w5.pdf

Montesquieu. (2001). *The Spirit of Laws*. Batoche Books. https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf

Proudhon, P.-J. (1989). *General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century*. Pluto Press.

Resnick, P. (1973). The Political Theory of Extra-Parliamentarism. *Canadian Journal of Political Science*, *6*(1), 65-88. https://www.jstor.org/stable/3231892

Sartori, G. (1973). *Democratic Theory*. Greenwood Press.

Spitzer, A. (1957). *The Revolutionary Theories of Louis Auguste Blanqui*. Columbia University Press.

voi.id. (2021, Oktober 5). *The Labor Party Rises When Workers Are Not Politically Literate: Beware Of Practical Politicization*. voi.id. Retrieved Januari 20, 2022, from https://voi.id/en/bernas/91607

Wicaksono, R. A. (2022, Januari 1). Gerakan atau Gerakanisme: Tinjauan Singkat Aksi Massa. *Surat Kabar Pijar Edisi 24*. https://issuu.com/bpmfpijar/docs/layout_jadi_fix_2

# Mari Mengawali Malam Ini dengan Sebuah Pembunuhan

*Oleh: Alvi Saputra*

**Peringatan! Tulisan ini mengandung konten eksplisit kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.**

Ilustrasi: Gayuh

Malam hampir tiba. Matahari sedang sekarat menanti binasa, layu dan meredup ditelan mega-mega. Dengan sisa nyawanya yang tak seberapa, matahari berkedip lemah. Remang jingga mentari yang telah uzur termakan hari masih menggerayangi botol-botol hijau bekas miras yang berjajar di jendela kamar. Lewat selusin botol kaca itu, aku menerawang pemandangan di seberang rumah.

Caping-caping sudah diangkat. Buruh-buruh tani, baik lelaki maupun perempuan, segera mangkat. Mereka berduyun-duyun mengangkat kaki dari kubangan lumpur. Beberapa petani menggiring kerbau-kerbau yang dicucuk hidungnya kembali ke kandang.

"Apa dia sudah kembali?" tanya Ratih, wajahnya dipenuhi memar-memar keunguan. Ia berbaring di sampingku, terlentang menahan bobot dari jabang bayi yang bersemayam di dalam perut buncitnya. Terkadang aku cemas perut Ratih, yang benar-benar bundar dan pucuknya membiru, akan meledak sewaktu-waktu. Orok merah berbalut kulit ari-ari meluncur keluar bersama seluruh isi jeroan dalam perut Ratih.

"Siapa?"

"Burhan." Cepat-cepat Ratih meralat. "Mas Burhan."

Lelaki itu ada di sana. Dari belakang barisan kaca botol yang hijau, aku melihatnya berjalan dengan gagah menyisir pematang sawah. Kemeja putihnya berkibar tertiup hembusan angin. Dalam perjalanannya, ia singgah dahulu ke gubuk di tengah sawah. Di sana, dia bercengkrama dengan pekerja-pekerjanya. Berbagi rokok, gorengan, dan juga mungkin sepenggal cerita hari ini.

Mas Burhan adalah seorang sarjana. Penampilannya bersih dan bersahaja. Tidak seperti petani pada umumnya, bahu Mas Burhan ramping dan pipih sebab ia tak pernah mengayun cangkul untuk menggali tanah. Betisnya kurus dengan kulit halus yang membungkus daging lembut di baliknya. Ia tidak menggunakan betis itu untuk berendam dalam lumpur. Sehari-hari kerjanya sekedar memeriksa tingkah-polah buruh-buruh yang ia pekerjakan. Sesekali dia turut ikut menyelam sawah, lalu memetik sebatang atau dua batang padi dan membawanya ke rumah untuk diperiksa di bawah mesin kaca pembesar.

"Dia mampir ke gubuk, tapi sepertinya bakal segera kembali."

"Matilah aku!" Ratih menjerit. “Dia nanti pasti minta jatah lagi. Nggak peduli aku sedang hamil tua begini.”

Selama tujuh bulan terakhir ini, Mas Burhan semakin gencar mengajak Ratih bersenggama. Katanya, perut bundar Ratih membuat birahinya kian mengepul. Tidak peduli bila Ratih enggan, ia akan menggunakan segala cara demi membuka kedua kaki Ratih. Mula-mula ia hanya mengancam bakal pergi ke salah satu pondokan remang-remang dan memilih perempuan di sana untuk diajak berwisata tubuh. Lama kelamaan ia mulai menggunakan kekerasan. Terkadang dia memukul dengan tangan kosong, kerap kali ia juga memperalat perabot rumah sebagai senjata untuk menggebuki istrinya itu.

“Mari kita mengawali malam ini dengan persetubuhan yang menyakitkan,” keluh Ratih.

“Tih,” panggilku.

Ratih menoleh kepadaku. Ia masih saja cantik jelita walaupun diterpa derita, seperti Ibu. Bertubi-tubi tamparan dari suami tidak sanggup merontokkan kecantikan Ibu dan Ratih. Uap panas yang mengudara di dapur tak sanggup menggerus kulit kuning langsat keduanya. Kembang desa abadi.

Wajah Ratih yang lonjong tetap sebentuk dengan telur, sama sekali tidak penyok setelah sering menjadi sasaran tinju Mas Burhan. Memar, yang memahkotai mata sendunya, malah menyemarakkan paras Ratih. Memberi warna lembayung pada wajahnya.

“Ratih.” Kembali aku memanggil namanya.

Aku melanjutkan. “Mari kita mengawali malam ini dengan sebuah pembunuhan.”

***

Ratih dan aku lahir bersama dari rahim yang sama pada malam di penghujung musim hujan. Ia meluncur terlebih dahulu, kemudian aku menyusul tak lama setelahnya. Menangis meraung-raung. Kala itu, gemuruh petir, lolongan anjing dari kaki bukit, dan tangisan liarku beradu sahut meramaikan malam kelahiran kami. Orang-orang bilang andai saja aku tidak terkena tulah akibat dosa bapakku menembak monyet ekor panjang di Gunung Tidar saat Ibu sedang hamil, aku akan memiliki kecantikan yang setimpal dengan Ratih.

Sehari sebelum ketuban Ibu pecah, bapakku mendaki Gunung Tidar. Entah setan apa yang merasukinya, ia pulang menenteng jasad monyet ekor panjang yang dadanya dilubangi peluru. Sialnya, akulah yang harus tertimpa dosa keparat itu sendirian. Ratih tidak tersentuh barang sejengkal saja.

Separuh wajahku serupa dengan Ratih. Bagai pinang dibelah dua. Sisanya adalah kutukan yang saban hari meradang.

Sebelum matahari benar-benar lenyap dilahap cakrawala, untuk pertama kalinya aku menimpa tanda lahir merah membara yang tampak seperti bekas luka bakar di sisi kanan wajahku dengan taburan bedak. Rambut kusut yang biasanya dibiarkan mencuat liar ke sana kemari dibilas cermat dan disisir rapi. Wewangian yang biasanya dipakai Ratih kini dituang di sela-sela akar rambutku. Gincu sewarna buah delima dipoles menutupi luka codet yang membelah ujung kanan bibir. Selagi bercermin, aku tergelak menemukan parasku yang tampak sejelita Ratih. Supaya lebih menyerupai Ratih yang tengah bunting delapan bulan, aku memasukkan bantal untuk mengganjal perut.

Tak dirasa-rasa, malam sekejap tiba. Bulan mencapai peraduannya di pucuk langit sana. Sinar temaram rembulan menyeruak masuk lewat jendela. Menepis debu-debu yang menempel, merambah pecahan botol bir yang berserakan di lantai. Bersama dengan hadirnya malam, terdengar suara ketukan dari pintu depan.

Burhan sudah kembali. Entah apa yang ia bawa malam ini. Bisa saja gairah yang meletup-letup atau amarah yang masih mendidih. Mungkin saja keduanya.

“Dia kembali,” kataku, memberitahu Ratih yang sekarang bersembunyi di kolong tempat tidurku. Ratih mengangguk-angguk. Tangannya mengelus perut, sekali-kali berdendang lirih menyanyikan “Nina Bobo” supaya jabang bayinya damai terbuai ari-ari.

Berbekal pisau dapur yang biasa digunakan Ratih untuk memotong sayur-mayur, aku melesat ke balik pintu kamar. Pisau itu aku pegang erat di belakang punggung. Selangkah kemudian, pintu kamar telah tertutup rapat. Tertinggal Ratih di dalam sana. Sosoknya yang berselimutkan gelap mendadak sirna dari pandangan.

Keletak pintu kayu mengabarkan kepulangan Mas Burhan. Kemunculannya menepis kabut yang berarak menjelajahi malam. Gelap malam yang tak berujung mengintai di balik punggungnya. Seulas senyum miring tersulam di wajahnya. Senyum itu tidak pernah pudar, senantiasa bertengger di wajah halus Mas Burhan. Bagiku itu bukan senyum yang ramah, tetapi hanya sekadar mulut yang diciptakan melengkung. Hampa dan nihil makna.

“Berhias kamu malam ini? Seperti topeng monyet saja.” Ia mendengus.

Seperti yang telah terjadi malam-malam sebelumnya, Mas Burhan sedikit berbicara. Sepasang sepatu boot karet ia lemparkan ke ujung ruangan. Sepatu menghantam guci berisi karangan bunga cempaka putih sampai jatuh terguling dan pecah berkeping-keping setelah menghantam lantai. Lelaki itu tidak ingin berlarut-larut, kasak-kusuknya terhenti seketika. Ia menarik pergelangan tanganku. Diajaknya aku duduk di lincak bambu yang menghuni ruang tamu.

Mula-mula, ia meraih sisi wajahku. Ibu jarinya mengusap-usap rahangku, lantas menarikku ke dalam ciuman panjang yang menyesakkan. Mas Burhan adalah pencium yang rakus. Ciumannya terasa seperti sayatan, menggigit dan menyundut rasa perih. Ketika tangan kiriku, tangan yang tidak memegang pisau, mendorongnya supaya ia memutus mulut kami, cengkeramannya mendarat di leherku. Ia mengancam akan main tangan kalau aku masih memberontak.

Maka, kubiarkan saja ia menjajah tubuhku. Jemari Mas Burhan yang panjang dan dingin menari-nari di atas kulitku. Seperti tergelincir, tangannya jatuh menimpa buah dada bulat yang tertutupi kain. Telunjuk serta ibu jari Mas Burhan membuka keliman daster. Ia terpana memandangi kulit yang tersembunyi di sana.

“Ternyata perempuan seperti kamu...”

Kalimat itu tidak pernah berakhir. Selamanya menggantung di udara sebab aku merangkul erat leher Mas Burhan sampai ia menggelepar. Pisau yang tadi kusembunyikan di punggung membidik telak jantungnya. Begitulah jadinya, lelaki itu mati dalam pelukanku. Mulutnya tidak lagi tersenyum, tapi terkuak meneriakkan jeritan sunyi.

Karena ingin mendengarkan jeritan Burhan, aku melanjutkan pembunuhan ini. Dengan pisau dapur, aku mengiris kulit leher Burhan. Dalam-dalam aku menggosokkan mata pisau. Tanganku bergerak maju mundur memisahkan daging, saraf, dan sendi yang saling bertautan. Namun, teramat disayangkan, Burhan tetap bisu hingga kepalanya terlepas dari leher. Mulutnya masih menganga tanpa suara.

Malam benar-benar hening. Denging di telingaku bertambah nyaring. Bebunyian dari jangkrik maupun kodok tidak bertabuh riuh seperti malam biasa. Agaknya mereka bersekongkol bersamaku untuk mengawali malam ini dengan sebuah pembunuhan.

***

Aku selalu merenungi malam kelahiranku. Semenjak aku mampu mengingat, cerita tentang hari kelahiranku selalu terdengar dari mulut orang-orang. Bapak, Ibu, tetangga-tetangga. Ketika aku bergandengan tangan dengan Ratih saat meniti tangga langgar, kasak-kusuk para bocah yang belajar mengaji di sana menggema. Mereka mencuri pandang mukaku yang setengahnya dijangkiti tanda lahir seperti luka bakar.

"Itu si muka bakar!"

"Ngeri! Ngeri! Seperti muka Banaspati!"

Bila aku turut Ibu ke pasar, perempuan-perempuan yang sedang bunting akan mengalihkan mata dariku. Kalau ada suami di sebelah mereka, dengan bisikan tajam mereka memperingati, "Jangan sekali-kali kamu bunuh barang seekor semut saja di masa kehamilanku. Kalau tidak, anak kita bakal cacat seperti anak ibu itu."

Masa itu telah sekian lama berlalu. Hari-hari terus berkejaran memburu waktu yang perlahan menjelma bulan lalu tahun. Matahari sudah mati berkali-kali, gemintang sinarnya sirna ditelan gelap saban malam. Sekarang aku sudah dewasa, tumbuh bersama tanda lahir merah yang kian melebar dan tiada henti menggeramus sisi kanan muka.

Mengingat tanda lahir dan asal-muasalnya, aku jadi mencemaskan janin di dalam perut Ratih. Menjelang petang hari ini, ketuban Ratih pecah. Airnya *lambah-lambah*. Aku lari seperti orang kesetanan menuju rumah Hanun, bidan di desa kami. Ia tiba di pintu rumah sambil menenteng alat-alat medis tepat sebelum tabuhan bedug berkumandang.

"Mbak Ratna tunggu di luar kamar saja," ucap Hanun, sosoknya menyelinap ke balik pintu kamar tempat Ratih berbaring dan mengerang-erang.

Aku menanti di ruang tamu. Duduk menyilangkan kaki di lincak bambu. Selinting tembakau berada dalam jepitan jemariku. Tembakau itu masih utuh tak terjamah api. Pikiranku terlalu runyam. Aku tidak mampu menyalakan korek. Sekujur tubuhku lemas seperti kehilangan sendi. Hanya berupa seonggok tulang berbalut daging dan kulit yang membatu.

Di luar sana, langit tampak teramat pekat. Malam kembali meraja. Awan kelabu berarak melintasi pepohonan. Terdengar anjing-anjing saling bersahutan. Bukan menggonggong, tapi melolong. Panjang dan pilu. Mengais-ngais lubuk hati orang yang mendengarnya. Seketika setelahnya, badai mendadak berkecamuk. Jarum-jarum runcing air hujan tiada ampun menghujam tanah bumi. Segala keriuhan itu meredam suara dari persalinan Ratih. Erangannya kedengaran lamat-lamat, hampir hilang jika aku tidak menajamkan telinga.

Aku jadi teringat lagi malam kelahiranku. Anjing-anjing melolong buas. Badai mengamuk ganas. Selama menunggu Ratih beranak, aku terus memikirkan betapa miripnya malam ini dengan malam kelahiranku. Burhan memang tidak membunuh hewan semasa Ratih bunting seperti bapakku dahulu. Namun, aku, yang kini menjadi kepala rumah tangga bagi Ratih dan jabang bayinya, sudah menghabisi si bapak. Tak sekadar menikam lelaki itu sampai mati, aku juga memenggal kepalanya. Jasad lelaki itu kupendam di bawah naungan pohon mangga di pekarangan belakang.

Setelah menempuh menit-menit panjang yang melelahkan, akhirnya penantianku terhenti. Suara erangan Ratih benar-benar hilang. Tersisa gemuruh petir dan lolongan anjing yang terasa hampa. Aku menanti jerit tangis bayi.

Namun, bunyi *oek oek* itu tidak kunjung terdengar.

Jantungku berdebar. Ada sesuatu yang janggal sedang terjadi di dalam kamar Ratih. Keringat dingin mengkristal di sepanjang pelipis. Dengan perasaan carut marut, aku memberanikan diri memasuki kamar. Selepas menghempaskan pintu, aku terpana menonton pemandangan yang tersaji di mataku.

Hanun, bidan yang kupanggil tadi, duduk menyandar tembok. Wajahnya pucat pasi seakan-akan aliran darahnya terhenti. Kedua tangan Hanun terkatup menutupi mulut.

Pada sebuah ranjang berlapis kain jarik, Ratih tergolek pasrah. Napasnya terengah-engah. Di antara kedua kakinya yang mengangkang, kutemukan orok berkulit semerah fajar dini hari lengkap dengan tali pusar yang melilit pinggang. Jantungku serasa dicabut dari pangkalnya saat aku menyadari sesuatu yang janggal pada anak Ratih.

Bayi itu lahir tanpa kepala.

# Angels and Demons

*Oleh: Edo Saut Hutapea*
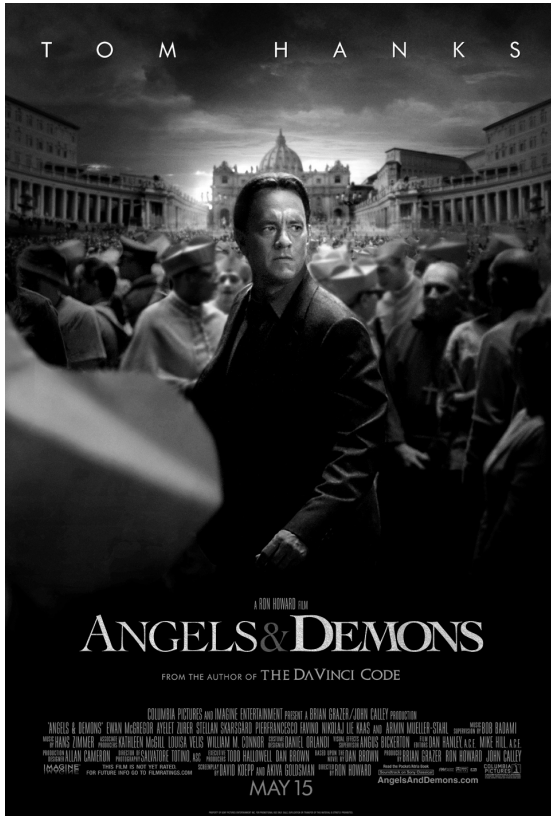
Dok. Istimewa

*Angels and Demons* merupakan film garapan Ron Howard yang diadaptasi dari novel karya Dan Brown dengan judul yang sama. Brown kerap menulis karya fiksi *pseudo* sejarah yang mengundang kontroversi. Tidak terkecuali untuk novel rujukan film ini. Film ini merupakan suatu bentuk kritik terhadap rivalitas agama dengan sains, dan bukan anti terhadap agama.

Film ini dimulai dengan memperlihatkan suasana berkabung saat kekosongan Tahta Suci Vatikan *(sede vacante)* pascakematian Paus. Masa berkabung ini seharusnya menjadi masa persiapan konklaf untuk memilih Paus baru bagi Tahta Suci, tetapi gereja malah berhadapan dengan konflik di saat paling rentannya. Empat kardinal yang paling potensial (preferiti) untuk terpilih menjadi Paus diculik saat konklaf hendak digelar. Telah dilakukan beberapa kali pemungutan suara dalam konklaf, tetapi tanpa keempat preferiti ini, Paus baru sulit untuk terpilih.

Karena kegentingan itu, kepala polisi Vatikan, Olivetti (Pierfrancesco Favino), mengundang ahli simbol dari Harvard, Robert Langdon (Tom Hanks), untuk membantu menyelidiki pelaku yang menculik empat preferiti Vatikan. Setelah diselidiki ternyata konspirasi penculikan itu didalangi oleh organisasi Illuminati yang ingin balas dendam atas perlakuan Gereja pada anggota kelompok mereka.

Di film ini, kelompok Illuminati digambarkan sebagai komunitas bagi para fisikawan, astronom, dan matematikawan yang sama sekali tidak pernah bermasalah dengan iman Gereja, tetapi mengedepankan sains. Illuminati bukanlah organisasi radikal hingga abad ke-17, saat gereja mulai melakukan penyiksaan pada ilmuwan yang mengancam kedaulatan Gereja. Ketamakan Gerejalah yang menjadikan Illuminati menjadi organisasi rahasia dan radikal.

Latar tempat kemudian beralih ke sebuah laboratorium rahasia yang meneliti antimateri, suatu sumber energi yang amat dahsyat. Penelitian ini dipimpin oleh Bapa Silvano Bentivoglio (Carmen Antimo Argenziano), seorang imam Katolik, dan didampingi oleh fisikawan, Vittoria Vetra (Ayelet Zurer). Pada awalnya penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif energi, walau pada akhirnya menjadi petunjuk bagi penemuan Partikel Tuhan, sumber segala materi.

Setelah antimateri berhasil diproduksi, konflik baru pun diperlihatkan. Ternyata dalang yang sama dengan kasus penculikan keempat preferiti berhasil mencuri tabung antimateri setelah membunuh Bapa Silvano. Akhirnya, Vittoria mengetahui bahwa tabung antimateri itu dibawa oleh pelaku ke Vatikan.

Kembali ke Vatikan, film berubah menjadi semakin menegangkan. Seakan-akan dua konflik itu saling terhubung, Langdon dan Vittoria bekerjasama untuk menemukan tabung itu. Pelaku mengirimkan video berisi ancaman untuk membunuh keempat preferiti sebelum tengah malam dan meledakkan seisi kota dengan tabung antimateri itu. Langdon mendapatkan petunjuk bahwa eksekusi itu akan dilaksanakan di empat gereja di kota Roma. Langdon juga berasumsi bahwa antimateri disembunyikan di Gereja Illuminati, sesuai tradisi dalam legenda itu.

Hal itulah yang membuat film ini unik dan menarik. Penonton dibawa untuk melawat sejarah legenda masa lalu, terlepas dari kebenarannya. Suasana rivalitas antara sains dan agama tergambar dengan sangat kental di atas dominasi Gereja. Sampai saat ini, di dalam film, penonton masih digiring pada rivalitas itu.

Langdon dan Vittoria ingin melanjutkan penyelidikan, tetapi mereka membutuhkan informasi untuk mengetahui lokasi Gereja Illuminati itu. Masih mengenai sejarah, dalam film ini, Galileo Galilei diceritakan sebagai anggota Illuminati sekaligus seorang Katolik yang taat. Langdon pun meminta akses ke arsip Vatikan untuk mendapatkan petunjuk dari buku Galileo. Pada akhirnya, Langdon mendapatkan petunjuk.

Singkat cerita, pelaku mulai mengeksekusi satu per satu dari keempat preferiti di lokasi yang mewakili empat elemen pengetahuan, yaitu api, tanah, udara, dan air. Langdon dan Vittoria mendapati bahwa tiga preferiti sudah tewas dibakar, ditembak, dan ditanam di bawah gereja. Mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan satu preferiti yang tersisa.

Langdon berhasil menyelamatkan satu-satunya preferiti yang masih hidup. Dari preferiti itu, Langdon mendapatkan informasi letak Gereja Illuminati yang mereka cari. Hal yang mengejutkan adalah letak Gereja Illuminati itu tepat berada di ruang bawah tanah, sebuah kastil yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah Gereja Santo Petrus. Mereka sampai di lokasi 15 menit sebelum tabung antimateri itu meledakkan seisi kota.

Setelah memeriksa lokasi, mereka tidak mendapati antimateri itu. Mereka malah berhadapan langsung dengan pelaku. Hal ini adalah bagian paling mengejutkan

di film. Kekacauan yang sejauh ini dianggap sebagai konflik nyata mulai dikupas satu per satu. Langdon mendapatkan informasi bahwa musuh yang mereka lawan adalah 'pasukan Tuhan', dalang sebenarnya ternyata orang terdekat dengan Tahta Suci.

Menurut tradisi dalam legenda itu, sebelum dieksekusi, setiap korban akan dicap dadanya dengan logam panas. Logam itu menggambarkan simbol keempat elemen dasar pengetahuan dan satu simbol lagi yang baru diketahui, yaitu simbol kepausan. Langdon menyadari bahwa target dari illuminati ini adalah 'pilar-pilar' kepausan, yang secara simbolik dikenali sebagai para kardinal dan Paus.

Permainan pemecahan simbol pun semakin kental. Kepausan masih dalam suasana *sede vacante* dan belum ada Paus baru. Mereka segera menyadari bahwa dalam masa *sede vacante*, tugas wewenang kenegaraan diserahkan sementara kepada Bendahara Rumah Tangga Kepausan, Camerlengo Carlo Ventresca (Ewan McGregor). Camerlengo dianggap akan menjadi target selanjutnya.

Langdon dan Vittoria kembali ke Vatikan. Mereka berupaya menyelamatkan Camerlengo. Pada akhirnya, Camerlengo selamat saat Kepala Garda Swiss, Maximilian Richter (Stellan Skarsgård), mengarahkan pistol ke arahnya. Kepala Garda Swiss ini diduga sebagai Illuminati yang menyusup ke dalam tubuh Gereja dan terbunuh saat itu juga. Camerlengo dengan dada tercap simbol kepausan, memberi petunjuk bahwa letak antimateri itu tepat berada di bawah Basilika Santo Petrus. Mereka hanya memiliki waktu tujuh menit sebelum daya tabung itu habis dan meratakan tembok Vatikan.

Setelah tabung itu ditemukan, mereka hanya punya waktu kurang dari lima menit, sedangkan kondisi tempat itu tidak memungkinkan untuk menambah daya tabung. Akhirnya, Camerlengo merampas tabung itu dan membawanya ke udara menggunakan helikopter. Ia berusaha untuk meledakkannya di udara supaya tidak menghancurkan kota. Upayanya berhasil dan peristiwa itu disaksikan oleh ribuan orang. Camerlengo dianggap mengorbankan diri bagi banyak orang. Kabar itu didengar oleh peserta konklaf. Mereka sempat berpikir untuk mengangkat Camerlengo atas jasanya, tetapi yang terlihat sejauh ini adalah kebohongan belaka.

Langdon mendapatkan informasi baru dari kamera pengawas yang dipasangkan secara rahasia di ruang kerja Paus, tempat yang sama saat Kepala Garda Swiss terbunuh, membuktikan bahwa dalang semua kejahatan itu adalah Camerlengo. Semuanya hanyalah sandiwara yang diciptakan begitu rapi oleh Camerlengo. Kepala Garda Swiss bukanlah Illuminati dan Illuminati bahkan tidak pernah ada di masa itu.

Sebelumnya, pemimpin penelitian, Bapa Silvano telah mengunjungi Paus sebelum kematiannya. Mereka membicarakan tentang produksi antimateri yang mendorong manusia untuk menemukan Partikel Tuhan, sumber segala massa. Paus menyetujui adanya penelitian itu. Paus mendorong untuk segera mempublikasikannya. Camerlengo yang mengetahui hal itu pun tidak menyukainya. Camerlengo menganggap sains terlalu tamak dan tidak menyisakan apapun pada agama, bahkan mengenai kuasa penciptaan. Ia menganggap sains memusuhi Gereja.

Dengan dasar kecemburuan terhadap sains, Camerlengo membangun suatu skenario dengan membangkitkan kembali legenda Illuminati sebagai kambing hitam. Camerlengo membuat seakan-akan Gereja sedang berada dalam peperangan dengan sains yang kejam. Ia mulai dengan membunuh Paus yang dikenal sangat progresif itu. Kemudian menyewa penjahat untuk mencuri keempat kardinal dan tabung antimateri untuk dihancurkan.

Cerita diakhiri dengan dilantiknya satu-satunya preferiti yang selamat menjadi Paus baru. Paus yang terpilih ini memilih nama 'Lukas' untuk pertama kali dalam sejarah kepausan. Dalam tradisi Gereja Katolik, Lukas adalah seorang dokter sekaligus penulis salah satu Injil. Dipilihnya nama Lukas seolah-olah memperlihatkan bahwa Gereja tidak pernah bermusuhan dengan sains.

Pada akhirnya, film ini bercerita mengenai fanatisme berlebihan oleh orang-orang beragama. Seakan-akan ada yang memaksa mereka untuk anti terhadap sains. Padahal, tidak sama sekali. Dalam film diceritakan bahwa Galileo pun tidak antisains, tidak anti-iman Gereja, terlepas dari benar atau tidak. Ia menganggap bahwa sains dan agama adalah sumber pengetahuan dengan dua bahasa yang berbeda. Fanatisme buta memang seakan-akan memperlihatkan kesetiaan kita kepada Gereja (agama), tetapi malah hampir menghancurkan agama itu sendiri. Agama akan rusak bukan oleh sains, tetapi oleh manusianya sendiri yang menyusup dan mencemari kemurnian agama dengan kepentingan tertentu. Agama dan sains bisa berjalan beriringan dengan bahasanya sendiri.

PADA SUATU SORE YANG SYAHDU...
Untuk itu kawan2 mahasiswa sekalian, dengan semangat perjuangan saya siap mengemban tugas dan amanah......

!?
Ada apa sih itu?
Biasalah, calon ketua BEM
Fafifuwasweswos... HIDUP MAHASISWA!

OMONG KOSONG! Stop romantitasi perjuangan mahasiswa!
Udah toh mas!, berhenti main negara-nya.
Mending bubar saja!

Oleh: Gayuh
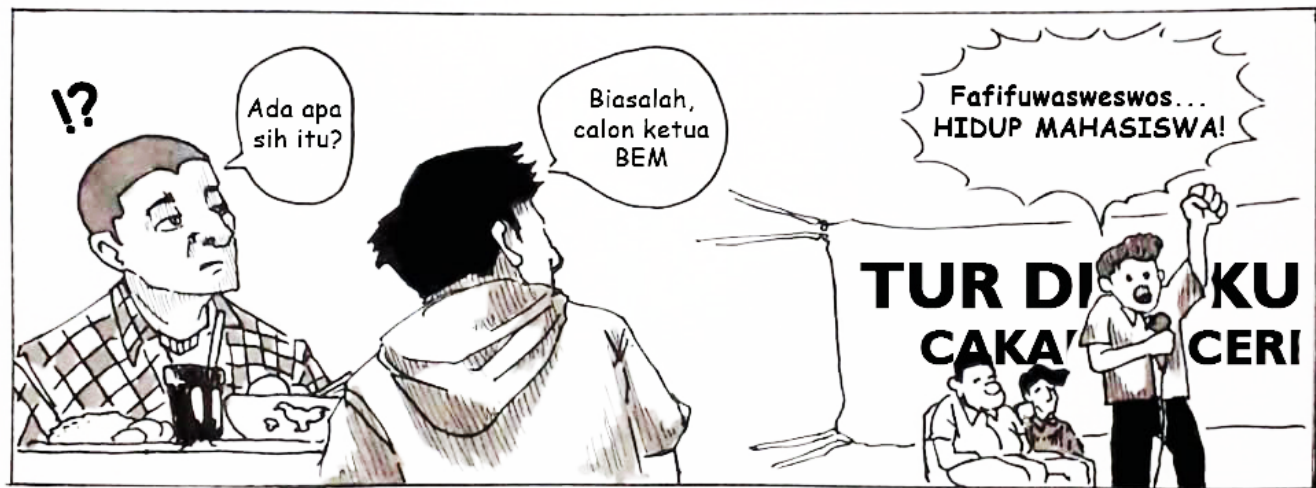
*Pijar, seperti matahari, naik dan turun ke dunia kita setiap hari dan tetap setia dengan sinarnya; sinar yang menyiangi gelap.*